

#### **KATA PENGANTAR**

Assalamu`alaikum Warrohmatullohi Wabarakatuh,

Alhamdullillahirrobbil'alamin, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Palu Tahun 2024 telah selesai disusun dan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa LPPD Kabupaten/Kota disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. LPPD disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Palu Tahun 2024 memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahaan daerah, terdiri atas capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah. Selain itu, LPPD juga memuat laporan penerapan standar pelayanan minimal, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Palu Tahun 2024 memuat data dan informasi yang akan digunakan oleh kepala daerah sebagai bahan untuk memantau keberhasilan implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan sebagai alat deteksi dini permasalahan dalam melaksanakan kebijakan. Keberhasilan kinerja maupun permasalahan dan hambatan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi bahan yang sangat berharga dalam perumusan kebijakan pemerintah dan Pembangunan daerah tahun berikutnya.

Demikian laporan ini disampaikan sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Kota Palu serta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, sehingga dapat mewujudkan Kota Palu menjadi Kota Global, Mantap Bergerak dan Berkelanjutan.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Palu, 27 Maret 2025

WALLKOTA PALU

HADIANTO RASYID, S.E

## **DAFTAR ISI**

KATA P	ENG/	ANTAR	i
DAFTAF	R ISI		iii
DAFTAF	R TAE	BEL	vi
DAFTAF	R GAI	MBAR	viii
BAB I	PEN	IDAHULUAN	I-1
	1.1.	latar Belakang	I-1
		1.1.1. Penjelasan Umum	I-1
		1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah	I-29
		1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal	I-45
BAB II	CAP	AIAN KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN	
	DAE	RAH	II-1
	2.1.	Capaian Kinerja Makro	II-1
		2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	II-1
		2.1.2. Angka Kemiskinan	II-5
		2.1.3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	II-7
		2.1.4. Laju Pertumbuhan Ekonomi	II-8
		2.1.5. Pendapatan Perkapita	II-10
		2.1.6. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	II-13
	2.2.	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	II-14
BAB III	CAP	AIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	III-1
	3.1.	Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	III-2
	3.2.	Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan	III-3
	3.3.	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan	III-3
		3.3.1. Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan oleh	
		Kota Palu	III-4
		3.3.2. Tugas Pembantuan Provinsi Yang Dilaksanakan Oleh	
		Kota Palu	III-6
	3 4	Permasalahan dan Kendala	III-6

#### BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL ..... IV-1 4.1. Urusan Pendidikan ..... IV-1 4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar..... IV-1 4.1.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal .......... IV-1 IV-2 4.1.3. Alokasi Anggaran ..... 4.1.4. Dukungan Personil..... IV-3 4.1.5. Hasil Capaian..... IV-3 4.1.6. Permasalahan dan Solusi..... IV-4 4.2. Urusan Kesehatan ..... IV-5 4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar..... IV-5 4.2.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal .......... IV-6 4.2.3. Alokasi Anggaran ..... IV-8 4.2.4. Dukungan Personil..... IV-8 IV-9 4.2.5. Hasil Capaian..... 4.2.6. Permasalahan dan Solusi..... IV-11 4.3. Urusan Pekerjaan Umum ...... IV-18 4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar..... IV-18 4.3.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal .......... IV-18

4.3.3. Alokasi Anggaran .....

4.3.4. Dukungan Personil.....

4.3.5. Hasil Capaian.....

4.3.6. Permasalahan dan Solusi.....

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar.....

4.4.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal ..........

4.4.3. Alokasi Anggaran .....

4.4.4. Dukungan Personil.....

4.4.5. Hasil Capaian.....

4.4.6. Permasalahan dan Solusi.....

Masyarakat.....

4.4. Urusan Perumahan Rakyat ......

4.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

IV-19

IV-20

IV-21

IV-22

IV-23

IV-23

IV-24

IV-24

IV-25

IV-26

IV-28

IV-28

I AMDTI	PAN		
BAB V	PEN	IUTUP	V-1
		4.6.6. Permasalahan dan Solusi	IV-40
		4.6.5. Hasil Capaian	IV-39
		4.6.4. Dukungan Personil	IV-38
		4.6.3. Alokasi Anggaran	IV-38
		4.6.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	IV-37
		4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar	IV-36
	4.6.	Urusan Sosial	IV-36
		4.5.6. Permasalahan dan Solusi	IV-34
		4.5.5. Hasil Capaian	IV-32
		4.5.4. Dukungan Personil	IV-31
		4.5.3. Alokasi Anggaran	IV-30
		4.5.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	IV-29
		4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar	IV-28

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	Kecamatan dan Kelurahan di Kota Palu Tahun 2024 I		
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Kota Palu Berdasarkan Kecamatan		
	Tahun 2024	I-5	
Tabel 1.3	Penduduk Kota Palu Berdasarkan Kelompok Umur		
	Tahun 2024	I-6	
Tabel 1.4	Rincian Perangkat Daerah Kota Palu Tahun 2024	I-7	
Tabel 1.5	Jumlah ASN Kota Palu Tahun 2024	I-9	
Tabel 1.6	Realisasi Pendapatan Menurut Jenisnya Tahun		
	Anggaran 2024 ( <i>unaudited</i> )	I-12	
Tabel 1.7	Rincian Realisasi dan Capaian Pendapatan Asli Daerah		
	Kota Palu Tahun Anggaran 2024 (unaudited)	I-13	
Tabel 1.8	Rincian Realisasi dan Capaian Pendapatan Transfer		
	Kota Palu Tahun Anggaran 2024 ( <i>unaudited</i> )	I-15	
Tabel 1.9	Rincian Realisasi dan Capaian Lain-Lain Pendapatan Yang Sah		
	Kota Palu Tahun Anggaran 2024 (unaudited)	I-15	
Tabel 1.10	Realisasi Belanja Daerah Menurut Jenisnya		
	Tahun Anggaran 2024 ( <i>unaudited</i> )	I-16	
Tabel 1.11	Rincian Realisasi dan Capaian Belanja Daerah		
	Kota Palu Tahun Anggaran 2024 (unaudited)	I-17	
Tabel 1.12	Realisasi Pembiayaan Menurut Jenisnya		
	Tahun Anggaran 2024 ( <i>unaudited</i> )	I-18	
Tabel 1.13	Program dan Anggaran Perjanjian Kinerja Perubahan		
	Kota Palu Tahun 2024	I-19	
Tabel 1.14	Agenda Prioritas Kota Palu	I-36	
Tabel 2.1	Capaian Kinerja Makro Kota Palu Tahun 2024	II-1	
Tabel 2.2	Kemiskinan Kota Palu Tahun 2020-2024	II-6	
Tabel 2.3	Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2020 - 2024	II-7	
Tabel 2.4	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga		
	Konstan (ADHK) Tahun Dasar 2010 Kota Palu Menurut Lapangan		
	Usaha (Miliar Rupiah), 2023-2024	II-11	

Tabel 2.5	Gini Ratio Kota Palu Tahun 2020-2024		
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Tugas Pembantuan Pemerintah Pusat Yang		
	Dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Palu	III-5	
Tabel 4.1	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Standar Pelayanan Minimal		
	Urusan Pendidikan	IV-1	
Tabel 4.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan		
	Pendidikan	IV-2	
Tabel 4.3	Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu	IV-2	
Tabel 4.4	Kondisi Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu	IV-3	
Tabel 4.5	Realisasi Capaian Penerima Layanan Dasar dan capaian		
	Mutu Layanan Minimal Layanan Dasar	IV-3	
Tabel 4.6	Realisasi Pencapaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal		
	Bidang Urusan Pendidikan	IV-4	
Tabel 4.7	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Urusan Kesehatan	IV-6	
Tabel 4.8 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan			
	Kesehatan	IV-7	
Tabel 4.9	Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM	IV-8	
Tabel 4.10	Kondisi Pegawai Menurut Golongan	IV-9	
Tabel 4.11	Konsisi Pegawai Menurut Jabatan		
Tabel 4.12	Realisasi Capaian Penerima Layanan Dasar dan Capaian		
	Mutu Layanan Minimal Layanan Dasar Urusan Kesehatan	IV-9	
Tabel 4.13	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	IV-10	
Tabel 4.14	Jenis Pelayanan dan Indikator SPM Urusan Pekerjaan Umum	IV-19	
Tabel 4.15	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	IV-19	
Tabel 4.16	Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM	IV-20	
Tabel 4.17	Kondisi Pegawai ASN Menurut Golongan	IV-20	
Tabel 4.18	Kondisi Pegawai ASN Berdasarkan Jabatan	IV-20	
Tabel 4.19	Realisasi Capaian Penerima Layanan Dasar dan Capaian Mutu		
	Layanan Minimal Layanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum	IV-21	
Tabel 4.20	Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan		
	Pekerjaan Umum	IV-21	
Tabel 4.21	Jenis Pelayanan dan Indikator Urusan Perumahan Rakyat	IV-23	

Tabel 4.22	2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan		
	Perumahan Rakyat	IV-24	
Tabel 4.23	Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM	IV-25	
Tabel 4.24	Kondisi Pegawai Menurut Golongan		
Tabel 4.25	Kondisi Pegawai Berdasarkan Jabatan		
Tabel 4.26	Realisasi Capaian Penerima Layanan Dasar dan Capaian		
	Mutu Layanan Minimal Layanan Dasar	IV-26	
Tabel 4.27	Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan		
	Perumahan Rakyat	IV-27	
Tabel 4.28	Jenis Pelayanan dan Indikator Urusan Ketentraman, Ketertiban		
	Umum Dan Perlindungan Masyarakat	IV-29	
Tabel 4.29	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan		
	Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	IV-29	
Tabel 4.30	Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM	IV-30	
Tabel 4.31	Kondisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	IV-31	
Tabel 4.32	Kondisi Pegawai (ASN) Berdasarkan Golongan	IV-31	
Tabel 4.33	Realisasi Capaian Penerima Layanan Dasar dan Capaian Mutu		
	Layanan Minimal Layanan Dasar	IV-32	
Tabel 4.34	Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan		
	Perumahan Rakyat	IV-33	
Tabel 4.35	Jenis Pelayanan dan Indikator Urusan Sosial	IV-36	
Tabel 4.36	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial	IV-37	
Tabel 4.37	Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Urusan Sosial	IV-38	
Tabel 4.38	Kondisi Pegawai Menurut Golongan	IV-38	
Tabel 4.39	Realisasi Capaian Penerima Layanan Dasar dan Capaian		
	Mutu Layanan Minimal Layanan Dasar	IV-39	
Tabel 4.40	Realisasi Pencapaian Standar Pelavanan Minimal Urusan Sosial .	IV-40	

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1	Peta Wilayah Kota Palu	
Gambar 1.2	Persentase Penduduk Kota Palu Berdasarkan Gender	
	Tahun 2024	I-5
Gambar 1.3	Misi Pemerintah Kota Palu	I-33
Gambar 1.4	Fokus Pengembangan Kota Palu Tahun 2021-2026	I-33
Gambar 1.5	Tema Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2022-2026	I-34
Gambar 1.6	Hubungan Visi, Misi, dan Agenda Pembangunan	
	Kota Palu 2021-2026	I-35
Gambar 2.1	IPM Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Indonesia	
	Tahun 2020-2024	II-2
Gambar 2.2	IPM Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Tengah	
	Tahun 2023	II-3
Gambar 2.3	Usia Harapan Hidup Kota Palu Tahun 2020-2024	II-3
Gambar 2.4	Dimensi Pendidikan	II-4
Gambar 2.5	Dimensi Daya Beli Masyarakat	II-5
Gambar 2.6	Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020-2024 (persen)	II-9
Gambar 2.7	Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK Kota Palu	
	Tahun 2020-2024	II-9
Gambar 2.8	Pendapatan Perkapita Kota Palu Tahun 2020-2024	II-12
Gambar 2.9	Indeks Gini Tahun 2020-2024	II-13

### **BAB I PENDAHULUAN**

### 1.1. Latar Belakang

### 1.1.1. Penjelasan Umum

### a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Pembentukan suatu wilayah tidak bisa lepas dari sejarah pembentukannya sebagai perjalanan sejarah dari masa ke masa. Secara historis yuridis. Pembentukan wilayah Kota Palu atas dasar asas dekonsentrasi sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya tahun 1978, Palu ditingkatkan menjadi Kota Administratif melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1978 tentang Pembentukan Kota Administratif Palu dan pada tahun 1994 Kota Administratif Palu ditingkatkan kembali statusnya menjadi Kotamadya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

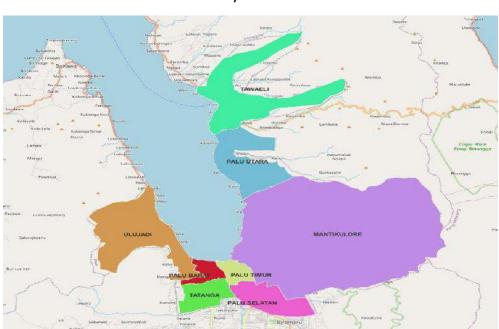
### b. Data Geografis Wilayah

Kota Palu merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah terletak pada kawasan dataran lembah Palu dan teluk Palu. Wilayahnya terdiri dari lima dimensi yaitu wilayah pegunungan, lembah, sungai, teluk dan lautan.

Secara astronomis, Kota Palu berada antara 0°,36″-0°,56″ Lintang Selatan dan 119°,45″ – 121°,1″ Bujur Timur, sehingga tepat berada digaris khatulistiwa

dengan ketinggian 0-700 meter dari permukaan laut. Luas wilayah Kota Palu mencapai 395,06 kilometer persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Donggala
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sigi
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi



**Gambar 1.1** Peta Wilayah Kota Palu

Secara tipologi, letak Kota Palu berbentuk memanjang dari timur ke barat yang terdiri dari dataran rendah, dataran bergelombang dan dataran tinggi. Berdasarkan topografinya, wilayah Kota Palu dapat dibagi menjadi 3 zona ketinggian yaitu:

- Sebagian kawasan bagian barat sisi timur memanjang dari arah utara ke selatan, bagian timur ke arah utara dan bagian utara sisi barat memanjang dari utara ke selatan merupakan dataran rendah/pantai dengan ketinggian antara 0
   100 meter di atas permukaan laut.
- Kawasan bagian barat sisi barat dan selatan, kawasan bagian timur ke arah selatan dan bagian utara ke arah timur dengan ketinggian antara 100 – 500 meter di atas permukaan laut.

• Kawasan pegunungan dengan ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut.

Seperti halnya daerah lain yang berada di sekitar garis khatulistiwa, Kota Palu beriklim tropis dan mengenal 2 (dua) musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan dengan suhu udara berkisar antara 20 s.d 35 derajat Celsius.

Secara administrasi wilayah Kota Palu terbagi atas 8 (delapan) Kecamatan dan 46 (empat puluh enam) Kelurahan, secara rinci luas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.1**Kecamatan dan Kelurahan di Kota Palu Tahun 2024

No.	Kecamatan	Kelurahan
1.	Palu Timur	<ol> <li>Besusu Barat</li> <li>Besusu Tengah</li> <li>Besusu Timur</li> <li>Lolu Selatan</li> <li>Lolu Utara</li> </ol>
2.	Palu Barat	<ol> <li>Ujuna</li> <li>Balaroa</li> <li>Kamonji</li> <li>Baru</li> <li>Lere</li> <li>Siranindi</li> </ol>
3.	Palu Selatan	<ol> <li>Tatura Utara</li> <li>Birobuli Utara</li> <li>Petobo</li> <li>Birobuli Selatan</li> <li>Tatura Selatan</li> </ol>
4.	Palu Utara	<ol> <li>Mamboro</li> <li>Taipa</li> <li>Kayumalue Ngapa</li> <li>Kayumalue Pajeko</li> <li>Mamboro Barat</li> </ol>

No.	Kecamatan	Kelurahan		
		1. Buluri		
		2. Donggala Kodi		
5.	Ulujadi	<ul><li>3. Kabonena</li><li>4. Silae</li></ul>		
		5. Watusampu		
		6. Tipo		
		0. Προ		
		1. Nunu		
		2. Palupi		
6.	Tatanga	3. Tawanjuka		
0.	Tatanga	4. Pengawu		
		5. Duyu		
		6. Boyaoge		
		1. Pantoloan		
		2. Pantoloan Boya		
7.	Tawaeli	3. Baiya		
		4. Lambara		
		5. Panau		
		1. Layana Indah		
		2. Tondo		
		3. Talise		
8.	Mantikulore	4. Tanamodindi		
0.	Paramana	5. Lasoani		
		6. Poboya		
		7. Kawatuna		
		8. Talise Valangguni		

Sumber : palukota.go.id

### c. Data Penduduk

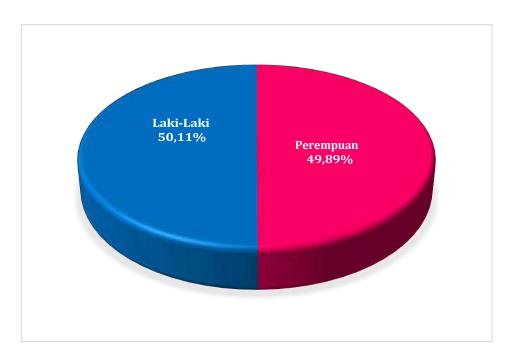
Secara demografi, berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, jumlah penduduk Kota Palu di tahun 2023 berjumlah 386.555 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sejumlah 193.715 jiwa (50,11%) dan penduduk perempuan sejumlah 192.840 jiwa (49,89%), dengan Kecamatan Mantikulore menjadi kecamatan dengan penduduk terbesar dan Kecamatan Tawaeli dengan jumlah penduduk paling sedikit. Jumlah penduduk tiap kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.2**Jumlah Penduduk Kota Palu Berdasarkan Kecamatan Tahun 2024

No.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1.	Palu Timur	21.989	22.502	44.491	11,51
2.	Palu Barat	23.791	23.507	47.298	12,24
3.	Palu Selatan	35.858	36.141	71.999	18,63
4.	Palu Utara	12.861	12.603	25.464	6,59
5.	Ulujadi	18.569	18.353	36.922	9,55
6.	Tatanga	27.312	27.166	54.478	14,09
7.	Tawaeli	11.968	11.542	23.510	6,08
8.	Mantikulore	41.367	41.026	82.393	21,31
	Jumlah	193.715	192.840	386.555	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu

**Gambar 1.2**Persentase Penduduk Kota Palu Berdasarkan Gender Tahun 2024



Jika dilihat dari sebaran penduduk berdasarkan kelompok umurnya, jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) tahun 2023 sejumlah 267.609 jiwa jiwa, dan jumlah penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) sejumlah 118.946 jiwa. Dengan membandingkan antara jumlah penduduk tidak

produktif dengan penduduk yang produktif, maka akan dapat diketahui Angka Beban Ketergantungan (*dependency ratio*). Angka beban ketergantungan Kota Palu pada tahun 2023 adalah sebesar **44,45%**. Secara rinci, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.3**Penduduk Kota Palu Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2024

No.	Kelompok Umur (Thn)	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1.	0 - 4	32.288	8,35
2.	5 - 9	35.001	9,05
3.	10 - 14	33.869	8,76
4.	15 - 19	27.818	7,20
5.	20 - 24	34.951	9,04
6.	25 - 29	33.996	8,79
7.	30 - 34	33.410	8,64
8.	35 - 39	29.951	7,75
9.	40 - 44	29.489	7,63
10.	45 - 49	24.975	6,46
11.	50 - 54	22.505	5,82
12.	55 - 59	17.932	4,64
13.	60 - 64	12.582	3,25
14.	65 - 69	8.377	2,17
15.	70 - 74	4.907	1,27
16.	>74	4.504	1,17
	Jumlah	386.555	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu

# d. Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukkan Perangkat Daerah

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, potensi daerah dan fleksibilitas, Pemerintah Kota Palu telah menindaklanjuti kebijakan penataan kelembagaan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Penataan kelembagaan di Kota Palu diatur melalui Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yaitu:

**Tabel 1.4**Rincian Perangkat Daerah Kota Palu Tahun 2024

NO	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
1	Sekretariat Daerah Kota Palu	Peraturan Daerah Kota Palu Nomor
2	Sekretariat DPRD Kota Palu	10 Tahun 2016 tentang   Pembentukan dan Susunan
3	Dinas Kesehatan Kota Palu	
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu	Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10,
5	Dinas Pekerjaan Umum	Tambahan Lembaran Daerah Kota
6	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu	Palu Nomor 10) sebagaimana telah
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas
8	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu	tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun
9	Dinas Pemadam Kebakaran dan	2016 tentang Pembentukan dan
9	Penyelamatan Kota Palu	Susunan Perangkat Daerah
10	Dinas Sosial Kota Palu	(Lembaran Daerah Kota Palu Tahun
11	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan	2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran
11	Menengah, dan Tenaga Kerja Kota Palu	Daerah Kota Palu Nomor 1)
12	Dinas Perdagangan dan Peridustrian Kota	,
12	Palu	
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Kota Palu	
14	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Kota Palu	
15	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota	
	Palu	
16	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu	
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	
	Perlindungan Anak Kota Palu	

NO	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
18	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu	
19	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu	
20	Dinas Penananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu	
21	Dinas Pariwisata Kota Palu	
22	Dinas Perhubungan Kota Palu	
23	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu	
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu	
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
26	Kepala Badan Pendapatan Kota Palu	
27	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Palu	
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu	
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu	
30	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Palu	
31	Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Kota Palu	
32	Inspektorat Daerah Kota Palu	
33	RSUD Anutapura Palu	
34	Kecamatan Palu Selatan	
35	Kecamatan Palu Barat	
36	Kecamatan Palu Utara	
37	Kecamatan Palu Timur	
38	Kecamatan Mantikulore	
39	Kecamatan Ulujadi	
40	Kecamatan Tawaeli	
41	Kecamatan Tatanga	

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Palu

## e. Rincian Aparatur Sipil Negara

Keseimbangan proporsi PNS laki-laki dan perempuan untuk menunjukkan keterlibatan perempuan dalam jajaran birokrasi di Pemerintah Kota Palu, terutama dilihat dari aspek kualitas dalam kaitannya dengan kedudukan PNS perempuan sebagai pemimpin di perangkat daerah. Namun sejalan dengan pelaksanaan

Permen PANRB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, sejumlah PNS pada jabatan eselon IV mengalami perpindahan jabatan ke fungsional. Jumlah PNS perempuan pada Pemerintah Kota Palu yang menduduki jabatan Eselon II sampai dengan Eselon IV masih lebih sedikit jika dibandingkan dengan PNS laki-laki. Adapun kondisi Sumber Daya Manusia untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kota Palu pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.5
Jumlah ASN Kota Palu Tahun 2024

		Urusan		Rincian ASN		
NO	Nama Perangkat Daerah Penunjang Penunjang	Struktural	Fungsional	Pelaksana	Total	
1	Sekretariat Daerah Kota Palu	Urusan Pemerintahan	17	34	68	119
2	Sekretariat DPRD Kota Palu	Urusan Pemerintahan	3	6	32	41
3	Dinas Kesehatan Kota Palu	Urusan Pemerintahan	10	570	141	721
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu	Urusan Pemerintahan	9	9	55	73
5	Dinas Pekerjaan Umum	Urusan Pemerintahan	8	6	66	80
6	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu	Urusan Pemerintahan	7	4	23	34
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Urusan Pemerintahan	8	5	24	37
8	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu	Urusan Pemerintahan	15	-	38	53
9	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu	Urusan Pemerintahan	13	3	56	72
10	Dinas Sosial Kota Palu	Urusan Pemerintahan	7	6	30	43
11	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kota Palu	Urusan Pemerintahan	7	11	13	31

		Urusan		Rincian ASN		
NO	Nama Perangkat Daerah	Pemerintahan /Fungsi Penunjang	Struktural	Fungsional	Pelaksana	Total
12	Dinas Perdagangan dan Peridustrian Kota Palu	Urusan Pemerintahan	9	15	16	40
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu	Urusan Pemerintahan	7	9	22	38
14	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu	Urusan Pemerintahan	16	54	35	105
15	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu	Urusan Pemerintahan	1	27	6	34
16	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu	Urusan Pemerintahan	7	9	15	31
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu	Urusan Pemerintahan	6	11	6	23
18	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu	Urusan Pemerintahan	5	4	22	31
19	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu	Urusan Pemerintahan	11	8	61	80
20	Dinas Penananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu	Urusan Pemerintahan	7	9	14	30
21	Dinas Pariwisata Kota Palu	Urusan Pemerintahan	7	7	18	32
22	Dinas Perhubungan Kota Palu	Urusan Pemerintahan	13	2	81	96
23	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu	Urusan Pemerintahan	6	12	14	32
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu	Urusan Pemerintahan	6	20	15	41
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Urusan Pemerintahan	7	6	40	53
26	Kepala Badan Pendapatan Kota Palu	Urusan Pemerintahan	17	6	44	67

	_	Urusan		Rincian ASN		
NO	Nama Perangkat Daerah	Pemerintahan /Fungsi Penunjang	Struktural	Fungsional	Pelaksana	Total
27	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Palu	Urusan Pemerintahan	5	7	11	23
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu	Urusan Pemerintahan	7	4	10	21
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu	Urusan Pemerintahan	6	10	17	33
30	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Palu	Urusan Pemerintahan	7	13	40	60
31	Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Kota Palu	Urusan Pemerintahan	2	2	8	12
32	Inspektorat Daerah Kota Palu	Urusan Pengawasan	8	44	8	60
33	RSUD Anutapura Palu	Urusan Pemerintahan	10	639	51	700
34	Kecamatan Palu Selatan	Urusan Penunjang	33	-	38	71
35	Kecamatan Palu Barat	Urusan Penunjang	37	0	21	58
36	Kecamatan Palu Utara	Urusan Penunjang	33	-	17	50
37	Kecamatan Palu Timur	Urusan Penunjang	33	0	26	59
38	Kecamatan Mantikulore	Urusan Penunjang	49	-	45	94
39	Kecamatan Ulujadi	Urusan Penunjang	38	0	14	52
40	Kecamatan Tawaeli	Urusan Penunjang	34	0	17	51
41	Kecamatan Tatanga	Urusan Penunjang	39	0	27	66
	JUMLAH TOT	AL	570	1.572	1.305	3.447

Sumber : BKPSDM Kota Palu

## f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palu ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

### 1) Pendapatan Daerah

Sesuai dengan laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2024 (*unaudited*), realisasi pendapatan daerah mencapai Rp. 1.590.218.616.623,07 terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 366.637.272.204,07; pendapatan transfer sebesar Rp. 1.211.098.478.867,00; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 12.482.865.552,00. Realisasi pendapatan menurut jenisnya terinci sebagai berikut:

Tabel 1.6
Realisasi Pendapatan Menurut Jenisnya
Tahun Anggaran 2024 (unaudited)

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	Pendapatan Asli Daerah	534.606.500.974,00	366.637.272.204,07	68,58
2	Pendapatan Transfer	1.256.399.943.003	1.211.098.478.867,00	96,39
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	23.305.051.452,00	12.482.865.552,00	53,56
PE	NDAPATAN DAERAH	1.814.311.495.429,00	1.590.218.616.623,07	87.65

Sumber: BPKAD Kota Palu, 2024

Pendapatan Daerah meliputi 3 komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dengan rincian:

### a. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2024 (*unaudited*) meliputi realisasi pajak daerah sebesar Rp. 256.277.964.087,57; retribusi daerah sebesar Rp. 20.198.242.809,00; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 4.156.827.667,00; lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp. 366.637.272.204,07 dari target yang telah ditetapkan. Rincian realisasi dan capaian PAD tahun anggaran 2024 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 1.7
Rincian Realisasi dan Capaian Pendapatan Asli Daerah
Kota Palu Tahun Anggaran 2024 (*unaudited*)

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	Pajak Daerah	301.400.000.000,00	256.277.964.087,57	85,03
1.1	Pajak Hotel	13.500.000.000,00	14.700.374.892,50	108,89
1.2	Pajak Restoran	70.000.000.000,00	41.727.361.320,40	59,61
1.3	Pajak Hiburan	9.500.000.000,00	9.098.349.858,30	95,77
1.3	Pajak Reklame	4.500.000.000,00	5.037.555.546,40	111,95
1.4	Pajak Penerangan Jalan	59.335.000.000,00	60.215.817.577,58	101,48
1.5	Pajak Parkir	700.000.000,00	826.796.645,00	118,11
1.6	Pajak Air Tanah	900.000.000,00	1.145.502.600,40	127,28
1.7	Pajak Sarang Burung Walet	65.000.000,00	55.575.596,00	85,50
1.8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	70.000.000.000,00	64.796.655.944,81	92,57
1.9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	34.400.000.000,00	22.916.728.005,53	66,62
1.10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	38.500.000.000,00	35.757.246.100,65	92,88
2	Retribusi Daerah	47.487.308.034,00	20.198.242.808,00	42,53
2.1	Retribusi Jasa Umum	30.877.354.444,00	12.322.407.537.00	39,91
2.2	Retribusi Jasa Usaha	12.773.613.590,00	3.847.167.605,00	30,12
2.3	Retribusi Perizinan Tertentu	3.836.340.000,00	4.028.667.667,00	105,01

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.900.000.000,00	4.156.827.667,00	106,59
3.1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah	3.900.000.000,00	4.156.827.667,00	106,59
4	Lain-Lain PAD Yang Sah	181.819.192.940,00	86.004.237.640,50	47,30
4.1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.200.000.000,00	440.336.614,00	39,69
4.2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	950.000.000,00	0,00	0,00
4.3	Jasa Giro	5.650.000.000,00	1.998.653.480,20	35,37
4.4	Pendapatan Bunga	1.000.000.000,00	1.378.487.295,00	137,85
4.5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	555.380.163,00	520.297.037,94	93,68
4.6	Pendapatan Denda Pajak Daerah	7.393.500.000,00	913.969.902,23	12,36
4.7	Pendapatan dari Pengembalian	61.105.075.317,00	6.564.839.462,74	10,74
4.8	Pendapatan BLUD	103.000.000.000,00	74.182.516.328,09	72,02
4.9	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	0,00	0,00
4.10	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	965.237.460,00	5.137.520,30	0,53
JUI	MLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	534.606.500.974,00	366.637.272.204,07	68,58

Sumber: BPKAD Kota Palu, 2024

## b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer tahun 2024 meliputi realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp. 1.074.489.747.728,00 dan pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp. 136.608.731.139,00 dari target yang telah ditetapkan. Rincian target, realisasi dan capaian pendapatan transfer tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.8
Rincian Realisasi dan Capaian Pendapatan Transfer
Kota Palu Tahun Anggaran 2024 (unaudited)

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.125.780.761.926,00	1.074.489.747.728,00	95,44
1.1	Dana Perimbangan	1.113.641.115.926,00	1.062.350.101.728,00	95,39
1.2	Insentif Fiskal	12.139.646.000,00	12.139.646.000,00	100,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	130.619.181.077,00	136.608.731.139,00	104,59
2.1	Pendapatan Bagi Hasil	119.909.181.077,00	128.535.052.545,00	107,19
2.2	Bantuan Keuangan	10.710.000.000,00	8.073.678.594,00	75,38
JU	MLAH PENDAPATAN TRANSFER	1.256.399.943.003,00	1.211.098.478.867,00	96,39

Sumber: BPKAD Kota Palu, 2024

### c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun 2024 yang terealisasi meliputi pendapatan hibah sebesar Rp. 3.594.000.000,00 dan realisasi lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp. 8.888.865.552,00. Rincian realisasi dan capaian disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.9
Rincian Realisasi dan Capaian Lain-Lain Pendapatan Yang Sah
Kota Palu Tahun Anggaran 2024 (unaudited)

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	Pendapatan Hibah	2.460.000.000,00	3.594.000.000,00	146,10
1.1	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pusat	1.866.000.000,00	0,00	0,00
1.2	Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	594.000.000,00	3.594.000.000,00	605,05

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
2	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang- Undangan	20.845.051.452,00	8.888.865.552,00	42,64
2.1	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	20.845.051.452,00	8.888.865.552,00	42,64
LA	AIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	23.305.051.452,00	12.482.865.552,00	53,56

Sumber: BPKAD Kota Palu, 2024

### 2) Belanja Daerah

Sesuai dengan laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2024 (*unaudited*), realisasi belanja daerah mencapai Rp. 1.607.254.821.999,50; terdiri atas: belanja operasi sebesar Rp. 1.307.845.757.929,50; belanja modal sebesar Rp. 299.363.085.070.00; dan belanja tak terduga sebesar Rp. 45.979.000,00. Realisasi belanja menurut jenisnya terinci sebagai berikut:

Tabel 1.10
Realisasi Belanja Daerah Menurut Jenisnya
Tahun Anggaran 2024 (unaudited)

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	Belanja Operasi	1.473.411.367.449,31	1.307.845.757.929,50	88,76
2	Belanja Modal	361.575.616.149,99	299.363.085.070.00	82,79
3	Belanja Tidak Terduga	750.000.000,00	45.979.000,00	6,13
	BELANJA DAERAH	1.835.736.983.599,30	1.607.254.821.999,50	87,55

Sumber: BPKAD Kota Palu, 2024

### a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Belanja operasi pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 1.307.845.757.929,50 atau 88,76%.

### b. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya, dan belanja modal aset lainnya. Belanja modal pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 299.363.085.070,00 atau 82,79%.

### c. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Belanja tidak terduga pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 45.979.000,00 atau 6,13%.

Rincian dari ketiga belanja sebagaimana dijelaskan di atas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.11
Rincian Realisasi dan Capaian Belanja Daerah
Kota Palu Tahun Anggaran 2024 (unaudited)

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	Belanja Operasi	1.473.411.367.449,31	1.307.845.757.929,50	88,76
1.1	Belanja Pegawai	691.703.696.560,30	697.482.376.549,00	100,84
1.2	Belanja Barang dan Jasa	686.041.204.414,01	538.408.617.634,50	78,48
1.3	Belanja Hibah	93.006.466.475,00	69.938.780.058,00	75,20
1.3	Belanja Bantuan Sosial	2.660.000.000,00	2.015.938.688,00	75,79
2	Belanja Modal	361.575.616.149,99	299.363.085.070,00	82,79
2.1	Belanja Modal Tanah	14.513.708.403,00	12.690.813.324,00	87,44
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.867.969.559,00	44.223.187.779,00	71,48
2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	127.501.082.630,99	104.202.604.918,00	81,73

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	149.780.097.307,00	131.370.741.049,00	87,71
2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.903.800.000,00	6.425.448.000,00	93,07
2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	1.008.958.250,00	450.290.000,00	44,63
3	Belanja Tidak Terduga	750.000.000,00	45.979.000,00	6,13
3.1	Belanja Tidak Terduga	750.000.000,00	45.979.000,00	6,13
JUM	LAH BELANJA DAERAH	1.835.736.983.599,30	1.607.254.821.999,50	87,55

Sumber : BPKAD Kota Palu, 2024

## 3) Pembiayaan Daerah

Realisasi pembiayaan daerah mencapai Rp. 21.425.488.170,27 terdiri atas: penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 21.425.488.170,27; dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 0,00. Realisasi pembiayaan menurut jenisnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.12
Realisasi Pembiayaan Menurut Jenisnya
Tahun Anggaran 2024 *(unaudited)* 

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	Penerimaan Pembiayaan	21.425.488.170,30	21.425.488.170,27	100,00
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	21.425.488.170,30	21.425.488.170,27	100,00
2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
2.1	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO		21.425.488.170,30	21.425.488.170,27	100,00

Sumber: BPKAD Kota Palu, 2024

# g. Pelaksanaan Program Urusan Pemerintan, Anggaran dan Realisasi Belanja

Adapun program dan anggaran perubahan perjanjian kinerja Pemerintah Kota Palu untuk mendukung capaian sasaran pada tahun 2024 sebagai berikut:

**Tabel 1.13**Program dan Anggaran Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Palu Tahun 2024

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaaran Belanja	Realisasi Belanja
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Palu	39.653.942.625	36.209.392.055
1	Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	28.170.283.884	20.319.405.055
		Program Perekonomian dan Pembangunan	3.544.647.450	3.250.176.871
2	DPRD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Palu	502.076.900	463.873.855
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Palu	85.605.234.749	82.684.122.741
	Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	73.933.782.879	68.819.851.358
3		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.147.273.800	939.842.900
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	426.900.850	423.585.000
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	4.038.433.250	3.960.479.740
	Pendidikan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Palu	339.092.799.006	333.641.661.479
		Program Pengelolaan pendidikan	105.672.045.562	100.256.896.638
4		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	88.032.600	86.464.608
		Program Pengembangan Kebudayaan	10.464.469.311	10.420.267.680
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	392.993.766	391.146.666
5	Pekerjaan Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.066.173.008	12.867.828.350

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaaran Belanja	Realisasi Belanja
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	2.054.269.600	2.028.207.655
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	5.867.823.240	5.218.641.779
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	268.686.400	212.235.800
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	4.253.122.155	3.500.444.055
		Program Penataan Bangunan Gedung	107.238.417.680	83.708.153.457
		Program Penyelengaraan Jalan	116.879.021.003	98.936.618.458
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	357.436.500	92.886.500
	Penataan Ruang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Palu	6.195.952.745	5.880.300.957
		Program Penataan Bangunan Gedung	505.539.750	414.363.350
6		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	184.034.200	94.834.000
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	36.785.200	35.930.200
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	20.795.250	18.195.250
		Program Penatagunaan Tanah	106.335.000	104.788.381
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Palu	6.871.975.967	6.115.289.134
	Dinas Porumahan	Program Pengembangan Perumahan	652.817.902	330.027.600
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman	7.565.227.200	6.251.614.400
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	8.121.884.300	4.018.885.000
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	52.589.724.499	50.367.215.604
	Satuan Polisi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Palu	14.159.857.924	13.027.355.926
8	Pamong Praja	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	14.696.100.000	14.310.870.000

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaaran Belanja	Realisasi Belanja
	Dinas Pemadam Kebakaran dan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Palu	10.575.638.547	10.182.033.640
9	Penyelamatan Kota Palu	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	662.792.700	623.023.856
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Palu	6.921.329.790	6.654.218.749
		Program Pemberdayaan Sosial	659.434.600	611.889.750
		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	23.520.000	23.423.340
		Program Rehabilitasi Sosial	776.184.950	629.510.100
10	Dinas Sosial Kota Palu	Program Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial	12.756.315.250	8.106.949.275
		Program Penanganan Bencana	996.879.110	996.746.778
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	91.405.800	26.971.800
		Program pelatihan keja dan Produktivitas Tenaga Kerja	538.925.000	74.766.000
		Program Penempatan Tenaga Kerja	53.224.250	52.666.650
		Program Hubungan Industrial	248.475.100	167.753.100
		Program Pemberdayaan Usaha Menangah, Usaha Kecil	531.572.540	321.682.223
		Program Pengembangan UMKM	6.216.673.092	4.487.338.450
11	Dinas Koprasi,	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	63.209.900	-
11	UMKM dan Tenaga Kerja	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	4.810.000	4.810.000
		Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	190.678.400	113.542.580
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Palu	5.708.824.019	4.939.763.691
	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Palu	6.644.773.421	6.246.571.087
12		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	35.700.000	29.750.000
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2.620.450.800	2.483.523.740

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaaran Belanja	Realisasi Belanja
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	899.230.000	816.345.000
		Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	182.215.000	158.099.064
		Program Perencanaan dan Pembangunan Insdustri	2.181.458.242	1.393.762.748
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	39.900.000	33.950.000
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	21.517.200	21.517.200
		Program Pendaftaran Penduduk	109.050.000	109.050.000
	Kependudukan	Program Pencatatan Sipil	108.211.750	107.911.750
13	Dan Pencatatan Sipil	Program Pengelolaan Informasi Kependudukan	42.550.000	42.550.000
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	24.420.000	24.429.000
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	245.793.100	228.180.048
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	61.809.850	13.806.390
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	9.266.800	7.316.300
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.653.667.000	1.635.792.360
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.299.247.400	771.832.649
	Dinas Pertanian	Program Pengelolaan dan pemasaran Hasil Perikanan	141.078.200	78.749.800
14	dan Ketahanan Pangan	an Ketahanan Program Penunjang Urusan 16.941.874.33	16.941.874.335	16.407.743.289
	Tungun	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.078.352.500	2.231.424.415
		Program Penyediaan dan pengembangan Prasarana Pertanian	327.097.000	257.773.140
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	391.588.244	290.197.594
		Program Perizinan Usaha Pertanian	11.242.250	11.242.250
		Program Penyuluhan Pertanian	360.989.350	307.002.100

	11		Al-I	
No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaaran Belanja	Realisasi Belanja
	Dinas Kearsipan	Program Pembinaan Perpustakaan	334.927.550	334.796.150
15		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	5.785.000	5.785.000
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Palu	6.083.133.510	5.742.360.970
	dan Perpustakaan	Program Pengelolaan Kearsipan	45.972.100	45.882.100
		Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	12.024.000	12.024.000
		Program Perizinan Penggunaan Arsip	3.850.000	3.850.000
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Palu	4.904.226.285	4.112.410.063
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	84.193.900 68.893.900	
16	Dinas Pemuda dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	193.886.200	192.130.200
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	4.053.627.500	3.766.498.940
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	2.073.111.300	1.395.758.300
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Palu	4.612.355.999	4.243.540.054
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	7.163.050	6.113.050
	Dinas Pemberdayaan	Program Perlindungan Perempuan	152.738.450	152.403.450
17	Perempuan dan Perlindungan	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	21.348.250	12.868.250
	Anak	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	21.935.750	21.935.750
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	105.891.000	103.642.500
		Program Perlindungan Khusus Anak	6.778.750	6.778.450
18	Dinas Pengendalian	Program Pengendalian Penduduk	6.000.806.193	5.389.491.073
	Penduduk dan Keluarga	Program Pengendalian Penduduk	288.462.500	275.215.300
_				

	Hwyses		Alakasi	
No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaaran Belanja	Realisasi Belanja
	Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	3.072.861.511	2.600.786.301
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	2.669.669.860	2.403.063.660
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Palu	12.828.629.561	11.857.988.128
		Program Perencanaa Lingkungan Hidup	423.092.700	410.405.462
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	637.788.550	561.794.900
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	10.215.188.650	8.193.055.250
19	Dinas Lingkungan Hidup Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Iz Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelo Hidup (PPLH) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dar	Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan	124.653.050	40.385.600
		Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	2.788.389.200	2.636.474.220
			39.146.870.810	35.159.429.941
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Palu	5.725.389.301	5.514.515.732
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1.225.000	1.225.000
20	Dinas Penanaman	Program Promosi Penanaman 76.000.000 Modal	76.000.000	75.865.260
	Modal	Program Pelayanan Penanaman Modal	119.575.600	119.414.300
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	592.729.750	583.799.750
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	60.175.000	45.175.000
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Palu	4.926.621.907	4.712.690.759
		Program Daya Tarik Destinasi	284.877.600	224.904.000
21	Dinas Pariwisata	Program Pemasaran	3.277.069.350	2.878.444.881
21	Dinas Pariwisata	Program Pengembangan Sumber daya Manusia Pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	823.459.250	360.390.410

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaaran Belanja	Realisasi Belanja
22	Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Palu	12.954.836.899	12.136.475.031
22	Dinas remubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	9.420.598.200	7.040.272.640
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Palu	7.650.596.948	7.448.846.436
23	BAPPEDA	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	4.185.053.700	3.903.683.469
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.261.177.225	4.877.793.084
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	3.934.027.350	3.675.514.033
24	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik dan Persandian	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.718.370.000	1.566.370.000
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	108.758.250	94.395.833
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	195.083.500	159.971.584
	Badan Kepegawaian dan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Palu	7.336.815.147	6.915.361.823
25	Pengembangan	Program Kepegawaian Daerah	1.579.891.750	1.410.634.993
	Sumber Daya Manusia Daerah	Program Pengembangan Sumber daya Manusia	919.210.650	902.755.808
26	Badan Pendapatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Palu	25.704.163.559	20.419.343.947
22 Dinas  23 BAPPE  24 Dinas  24 Dinas  Dan I Statis Persa  25 Penge Sumb Manus  26 Penda Daera  27 Badar Inova	Daerah	Program Pendapatan Daerah	9.000.854.700	8.431.596.972
27	Badan Riset	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Palu	4.057.748.908	3.861.621.903
	Inovasi Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	290.589.400	186.604.700
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Palu	4.072.890.824	3.760.356.656
28	Kesbangpol	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3.832.787.045	3.429.172.558

	Urusan		Alokasi		
No	Pemerintahan Daerah	Nama Program	Anggaaran Belanja	Realisasi Belanja	
		Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	57.690.607.537	57.054.466.558	
		Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	22.659.000	8.585.500	
		Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1.553.660.650	1.052.280.150	
		Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	445.185.280	271.138.930	
29	Badan Penanggulangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Palu	5.242.092.956	4.861.848.379	
	Bencana	Program Penanggulangan Bencana	881.722.960	652.023.327	
	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Palu	11.713.864.888	10.984.610.871	
30		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	5.289.232.650	4.456.223.501	
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.445.435.200	1.409.553.087	
	Administrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.929.113.560	2.799.666.867	
31	Kawasan Ekonomi Khusus	Program Promosi Penanaman Modal	92.192.000	91.467.400	
		Program Pelayanan Penanaman Modal	193.848.000	134.805.000	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.961.677.617	10.416.014.686	
32	Inspektorat Kota Palu	Program Penyelenggaraan Pengawasan	693.124.300	592.450.881	
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	34.513.450	32.938.450	
33	RSUD Anutapura	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	169.633.552.532	167.621.834.339	
		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan	33.569.978.250	32.034.914.414	

	Urusan		Alokasi	
No	Pemerintahan Daerah	Nama Program	Anggaaran Belanja	Realisasi Belanja
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Masyarakat	113.783.000	63.397.180
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.667.447.460	9.001.673.213
34	Kecamatan Palu Selatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	8.425.350	5.925.350
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	8.774.553.700	8.650.086.977
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	106.282.500	104.730.000
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.733.409.961	8.220.943.990
35	Kecamatan Palu Barat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	17.208.500	16.879.950
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	6.907.475.551	6.158.312.380
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	281.996.000	251.566.000
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.504.822.105	6.837.292.496
36	Kecamatan Palu Utara	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	7.116.200	7.116.200
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	7.858.480.348	7.267.582.640
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	179.460.000	168.960.000
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.164.326.183	7.824.627.932
37	Kecamatan Palu Timur	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	3.341.700	3.341.700
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	6.458.159.031	6.223.833.432
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	143.194.800	60.254.500

	Urusan		Alokasi	
No	Pemerintahan Daerah	Nama Program	Anggaaran Belanja	Realisasi Belanja
	Daeran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.025.606.328	11.687.231.926
38	Kecamatan Mantikulore	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	23.356.800	21.156.800
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	11.292.319.161	11.071.626.338
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	232.450.000	229.950.000
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.185.141.915	6.660.313.406
39	Kecamatan Tawaeli	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	18.519.850	18.519.850
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	7.602.838.524	7.517.864.100
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	192.250.000	183.250.000
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.981.548.605	8.426.875.747
40	Kecamatan Tatanga	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	15.513.200	12.775.000
	J	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	7.639.631.625	7.304.757.639
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	143.450.000	130.850.000
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.344.701.457	7.866.341.804
41	Kecamatan Ulujadi	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	21.211.600	21.211.600
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	9.114.379.760	8.923.937.396
	por i Pagian Romba	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	181.585.000	177.085.000

Sumber : Bagian Pembangunan Setda Kota Palu Tahun 2024

#### 1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

#### a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan strategis Pemerintah Daerah merupakan kondisi penting dan mendesak yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena berdampak besar bagi masyarakat dan daerah saat ini dan dimasa datang yang apabila tidak diantisipasi serta ditindaklanjuti berpotensi menimbulkan permasalahan yang lebih kompleks. Pada hakikatnya permasalahan merupakan bagian tidak terpisah dari pembangunan namun perlu dilakukan manajemen yang tepat atas permasalahan yang terjadi. Dalam merumuskan permasalah strategis daerah maka perlu memperhatikan karakteristik dari isu permasalahan strategis yakni kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka Panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang.

Pembangunan Kota Palu terus dipacu untuk mengejar target pertumbuhan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dimana dalam upaya pemenuhan target tersebut terdapat permasalahan strategis daerah yang dihadapi sebagai diantaranya:

- 1. Rendahnya APK Pendidikan Usia Dini
- 2. Jumlah tenaga Kesehatan belum memenuhi SPM
- 3. Masih tingginya angka prevalensi stunting
- 4. Tingginya angka pengangguran
- 5. Kurangnya keterlibatan masyarakat
- 6. Luas Kawasan kumuh Kota Palu 33 Ha
- 7. Belum sepenuhnya efektif tata kelola pemerintahan

Selanjutnya, Isu Strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu strategis daerah menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah dan perangkat daerah.

Program dan kegiatan pembangunan daerah Kota Palu di tahun 2024 diprioritaskan untuk mengatasi masalah-masalah pembangunan dari kondisi gambaran umum dan dari hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun berjalan. Selain itu prioritas program dan kegiatan tahun 2024 juga untuk menjawab isu-isu strategis yang muncul dari adanya permasalahan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 seiring dinamika perkembangan jaman, maka secara khusus, prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah Kota Palu di tahun 2024 diarahkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, inklusif, dan merata
- 2. SDM Unggul, Tangguh, dan Berdaya Saing
- 3. Infrastruktur Kota yang Aman, Nyaman, Tangguh, dan Inklusif
- 4. Pengurangan Risiko Bencana dan Perubahan Iklim, serta Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
- 5. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
- 6. Pencapaian Target dan Sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

#### b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan adanya visi dan misi yang merupakan arahan bagi penyusunan program dan kegiatan selama lima tahun. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin diwujudkan pada akhir periode perencanaan, yang dilaksanakan pada rentang waktu tertentu. Visi akan menjadi arahan bagi keseluruhan kebijakan yang diambil dan dijalankan. Visi dilaksanakan melalui sejumlah misi yang merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Visi Kota Palu 2021-2026 merupakan tujuan pembangunan Kota Palu yang diangkat dari isu strategis yang harus diselesaikan pada jangka menengah. Merujuk kepada RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026, Visi Kota Palu yakni:



"Membangun Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan" Pernyataan visi Kota Palu Tahun 2021-2026 memiliki makna sebagai berikut:

**Kota Palu,** Meliputi seluruh wilayah Kota Palu dan isinya. Artinya Kota Palu dan seluruh warganya serta entitas yang ada di dalamnya yang berada didalam satu wilayah dengan batas-batas tertentu secara administratif berdasarkan peraturan dan ketentuan perundang-undangan.

**Mandiri,** Pembangunan yang diarahkan pada suatu keadaan yang menumbuhkan perekonomian kota yang positif sehingga memiliki daya saing yang kuat serta kemandirian usaha masyarakat dan ekonomi.

**Aman dan Nyaman,** Aman dan nyaman dimaknai sebagai pembangunan yang dilaksanakan diberbagai sektor dan wilayah Kota Palu sehingga menjadikan kota yang aman nyaman untuk dihuni yang tercermin dari kualitas lingkungan hidup yang baik serta infrastruktur yang berkualitas dan berketahanan.

**Tangguh,** Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati, mengupayakan peningkatan kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat dan ketangguhan menghadapi risiko bencana.

**Profesional,** Pembangunan yang diarahkan pada sebuah kondisi sumber daya aparatur semakin profesional, kelembagaan yang efektif dan efisien, serta pelayanan yang selalu hadir melayani.

**Pembangunan Berkelanjutan,** Merupakan pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

**Kearifan Lokal,** Kearifan lokal sebagai basis dalam pembangunan. Kearifan lokal merupakan bentuk pengetahuan asli masyarakat lembah Kaili yang berasal dari nilai luhur budaya di lembah Kaili yang memiliki relevansi penyelesaian permasalahan kemasyarakatan.

**Keagamaan,** Nilai-nilai keagamaan sebagai pondasi dalam melakukan ikhtiar pembangunan. Keagamaan merupakan sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata

kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.

Untuk melaksanakan dan mewujudkan Visi Kota Palu, selanjutnya dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan daerah, yaitu:

# Misi 1 : Membangun Perekonomian yang Mandiri dan Siap Bersaing dalam Perkembangan Ekonomi Regional dan Global

Ekonomi akan menjadi salah satu pilar utama dalam pengembangan Kota Palu. Perekonomian Kota Palu akan dikembangkan untuk menjadi ekonomi yang mandiri dan berdaya saing sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pemerataan, dan mampu bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global.

## Misi 2 : Membangun Kembali Tatanan Lingkungan yang Aman dan Nyaman dengan Dukungan Infrastruktur yang Berketahanan terhadap Bencana

Dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, lingkungan menjadi salah satu pilar utama dengan daya dukungnya terhadap beragam bentuk kegiatan yang ada. Lingkungan kota harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi masyarakat dalam beraktivitas untuk saat ini hingga masa yang akan datang. Sementara itu, dalam mendukungan aktivitas dan kenyamanan lingkungan kota, infrastruktur menjadi hal vital yang harus terintegrasi dan berkualitas, serta berketahanan terhadap bencana.

## Misi 3 : Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Tangguh Menghadapi Perkembangan Global dan Mampu Beradaptasi terhadap Bencana dan Covid-19

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam pembangunan. SDM Kota Palu didorong untuk tangguh, berkualitas, dan berkarakter guna menghadapi perkembangan dan dinamika global, serta harus mampu beradaptasi terhadap bencana, baik bencana alam maupun bencana non alam.

## Misi 4 : Menciptakan Pemerintahan yang Profesional dan Selalu Hadir Melayani

Pengelolaan pemerintahan akan dilakukan secara profesional dengan menerapkan prinsip *good governance* yang menyeluruh. Dengan demikian,

diharapkan pengelenggaran pemerintahan dapat mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan kota melalui reformasi birokrasi, reformasi pelayanan publik, peningkatan pendapatan daerah, serta penguatan hubungan antar pemangku kepentingan dan kerja sama.



Misi 1

Membangun perekonomian yang mandiri dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global



Misi

Membangun kembali tatanan lingkungan yang aman dan nyaman dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana



Misi 3

Mengembangkan sumber daya manusia yang tangguh menghadapi perkembangan global dan mampu beradaptasi terhadap bencana dan Covid-19



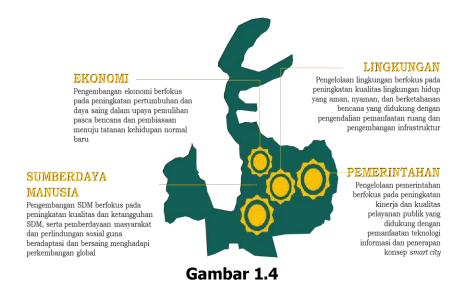
Misi 4

Menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani

## **Gambar 1.3**Misi Pemerintah Kota Palu

## c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Palu 2021-2026 dicapai dengan menentukan beberapa fokus pengembangan inti (*core*) yang menjadi panduan dalam menentukan strategi dan arah kebijakan pengembangan ke depan, dimana core tersebut yaitu ekonomi, lingkungan, sumberdaya manusia, dan pemerintahan.



Fokus Pengembangan Kota Palu Tahun 2021-2026

Arah kebijakan merupakan keputusan dari *stakeholder* sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Untuk memudahkan pemahaman terhadap kesinambungan pembangunan setiap tahun dalam jangka 5 (lima) tahun, terlebih dahulu disederhanakan dalam agenda atau tema pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap.

Secara umum program prioritas pembangunan Kota Palu diklasifikasi kedalam agenda pembangunan yang didasari pada visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan yang dijabarkan dalam tema pembangunan tahunan yang selanjutnya dijadikan dasar dalam penyusunan RKPD. Adapun tema yang menjadi program pembangunan daerah sebagai berikut:



**Gambar 1.5**Tema Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2022-2026

Program dan kegiatan pembangunan daerah Kota Palu di tahun 2023 diprioritaskan untuk mengatasi masalah-masalah pembangunan dari kondisi gambaran umum dan dari hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun sebelumnya. Selain itu prioritas program dan kegiatan tahun 2023 juga untuk menjawab isu-isu strategis yang muncul dari adanya permasalahan tersebut.

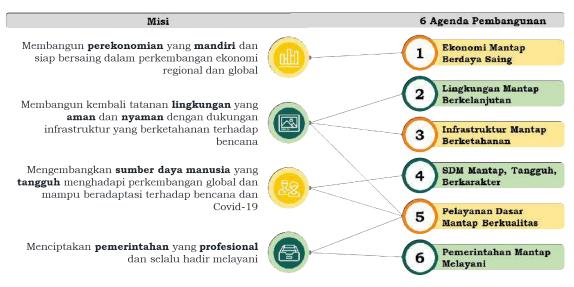
Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan transformasi digital dalam penatakelolaan pemerintah menuju palu adipura merupakan tema pembangunan Kota Palu Tahun 2023, upaya pelaksanaan dari tema tersebut terinci dalam Renja hingga DPA berbagai OPD berdasarkan tugas fungsi masing-masing.

## d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan dasar bagi penentuan prioritas pembangunan daerah. Prioritas pembangunan daerah menjadi pelaksana dari arah kebijakan yang telah ditetapkan, sesuai dengan rencana waktu pelaksanaan.



"Membangun Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan"



Gambar 1.6

Hubungan Visi, Misi, dan Agenda Pembangunan Kota Palu 2021-2026

Prioritas pembangunan daerah disajikan selama 5 (lima) tahun mulai Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026, disajikan berdasarkan sasaran pembangunan jangka menengah. Dengan sifat prioritas pembangunan daerah yang bersifat strategis, maka pelaksanaan dan penganggarannya diutamakan.

Penentuan prioritas pembangunan daerah Kota Palu juga merupakan bentuk pelaksanaan program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2021- 2026 yang diturunkan ke dalam enam Agenda Pembangunan Kota Palu Tahun 2021-2026, yaitu:

- Ekonomi Mantap Berdaya Saing;
- 2. Lingkungan Mantap Berkelanjutan;
- Infrastruktur Mantap Berketahanan;

- 4. SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter;
- 5. Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas; dan
- 6. Pemerintahan Mantap Melayani.

Enam agenda pembangunan Kota Palu 2021-2026 kemudian dijabarkan menjadi 53 (lima puluh tiga) agenda prioritas dimana pelaksanaannya dilakukan secara sistematis dan bertahap dalam periode 5 tahun sesuai masa waktu RPJMD Kota Palu. Agenda prioritas dimaksud sebagai berikut:

**Tabel 1.13**Agenda Prioritas Kota Palu

NI.	Program	Sasaran Program	Indikasi	ОРІ	) Pelaksana
No.	Unggulan	Unggulan	Sumber Pendanaan	Pengampu	Pendukung
A.	_	onomi Mantap Berdaya S			
1	4 Miliar Bedah Rumah + Modal Usaha per Kelurahan	<ul> <li>100 rumah/ kelurahan pada 46 kelurahan. Total 4.600 rumah</li> <li>30 juta untuk bedah rumah</li> <li>10 juta untuk modal usaha</li> </ul>	APBN, APBD, CSR	OPD Pelaksana Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	OPD Pelaksana Urusan Sosial, OPD Pelaksana Urusan Koperasi, UMKM
2	Inkubator Bisnis berbasis Digital per Kelurahan	<ul><li>1 inkubator bisnis per kelurahan</li><li>Mengembangkan usaha berbasis digital</li></ul>	APBN, APBD, CSR	OPD Pelaksana Urusan Koperasi, UMKM	OPD Pelaksana Urusan Perdagangan, OPD Pelaksana Urusan Perindustrian, OPD Pelaksana Urusan Komunikasi dan Informatika
3	Penguatan UMKM	<ul> <li>Dukungan permodalan</li> <li>Peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan</li> <li>Peningkatan jangkauan pasar dan <i>branding</i></li> </ul>	APBN, APBD, CSR	OPD Pelaksana Urusan Koperasi, UMKM	OPD Pelaksana Urusan Perdagangan, OPD Pelaksana Urusan Perindustrian
4	Revitalisasi Perparkiran	<ul> <li>Pemetaan lokasi parkir tepi jalan dan lokasi khusus</li> <li>Pengembangan sistem e-parking</li> <li>Pengembangan parkir berlangganan</li> <li>Penanganan juru parkir</li> </ul>	APBD, KPBU, Swasta, CSR	OPD Pelaksana Urusan Perhubungan	OPD Pelaksana Urusan Keuangan (pendapatan)
5	Reformasi dan Revitalisasi Moda Transportasi	<ul> <li>Pengembangan moda angkutan massal</li> </ul>	APBD, KPBU, Swasta, CSR	OPD Pelaksana Urusan Perhubungan	

No.	Program	Sasaran Program	Indikasi Sumber	OPI	D Pelaksana
NO.	Unggulan	Unggulan	Pendanaan	Pengampu	Pendukung
		<ul> <li>Mendorong berkembangnya moda transportasi alternatif</li> </ul>			
6	Kawasan Ekonomi Kreatif dan Wisata Religi	<ul> <li>Kawasan/koridor ekonomi kreatif</li> <li>Kawasan/koridor wisata religi</li> </ul>	APBN, APBD, Swasta, CSR	Pariwisata	OPD Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum, OPD Pelaksana Urusan Penataan Ruang, OPD Pelaksana Urusan Koperasi, UMKM, OPD Pelaksana Urusan Perdagangan, OPD Pelaksana Urusan Perindustrian
7	Kawasan Agrowisata Layana dan Petobo	<ul> <li>Kawasan agrowisata berbasis peternakan di Layana</li> <li>Kawasan agrowisata berbasis tanaman pangan dan holtikultura di Petobo</li> </ul>	APBN, APBD, Swasta, CSR	OPD Pelaksana Urusan Pertanian, OPD Pelaksana Urusan Pangan	OPD Pelaksana Urusan Pariwisata, OPD Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum, OPD Pelaksana Urusan Penataan Ruang
8	Revitalisasi Pasar berbasis Segmentasi	<ul> <li>Pengembangan pasar khusus, seperti pasar burung, pasar buah, dan sebagainya</li> <li>Target revitalisasi pasar eksisting</li> </ul>	APBN, APBD, KPBU, Swasta	OPD Pelaksana Urusan Perdagangan, OPD Pelaksana Urusan Perindustrian	OPD Pelaksana Urusan Pariwisata, OPD Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum, OPD Pelaksana Urusan Penataan Ruang
9	Wisata Pasar Ikan	Pasar ikan yang akan terintegrasi dengan tempat penyedia makanan <i>seafood</i>	APBN, APBD, KPBU, Swasta	OPD Pelaksana Urusan Perdagangan, OPD Pelaksana Urusan Perindustrian	OPD Pelaksana Urusan Pariwisata, OPD Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum, OPD Pelaksana Urusan Penataan Ruang
10	1.000 Perahu untuk Nelayan	<ul> <li>10 juta/ 1 perahu/ keluarga nelayan</li> <li>Dapat kumulatifkan ke dalam kelompok nelayan. Contoh 1 kelompok beranggotakan 10 nelayan, dapat diberikan 1 kapal senilai 100 juta</li> </ul>	APBN, APBD, CSR	OPD Pelaksana Urusan Kelautan dan Perikanan	OPD Pelaksana Urusan Koperasi, UMKM
11	Kerjasama antar Pemerintah Daerah	<ul><li>Kerjasama ketenagakerjaan</li><li>Kerjasama ekonomi dan perdagangan</li></ul>	APBN, APBD, KPBU	Sekretariat Daerah	OPD Pelaksana Urusan Perencanaan OPD Pelaksana Urusan Koperasi, UMKM

No.	Program	Sasaran Program	Indikasi	OP	D Pelaksana
NO.	Unggulan	Unggulan	Sumber Pendanaan	Pengampu	Pendukung
		<ul> <li>Dapat dilakukan kerjasama dengan BUMN dan swasta</li> </ul>			OPD Pelaksana Urusan Tenaga Kerja
12	Forum Komunitas Kreatif	<ul> <li>1 forum komunitas kreatif</li> <li>Membangun 1 bangunan sebagai creative hub</li> <li>Fasilitasi kegiatan forum kreatif</li> </ul>	APBN, APBD, CSR	OPD Pelaksana Urusan Pariwisata	OPD Pelaksana Urusan Pemuda dan Olahraga
B.	_	<mark>gkungan Mantap Berke</mark> l			
1	Palu Adipura	<ul> <li>Pengelolaan sampah terpadu</li> <li>Penerapan 3R di kelurahan dan RT/RW</li> <li>Pembentukan UPTD pengelola sampah di setiap kecamatan</li> <li>Penanganan TPA sampah</li> <li>Penghargaan Adipura tahun 2023</li> </ul>	APBN, APBD, KPBU, Swasta, CSR	Hidup	OPD Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum, OPD Pelaksana Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kecamatan
2	Palu Terang	<ul><li>Cakupan listrik 100%</li><li>Seluruh jalan di Kota Palu mendapatkan PJU</li></ul>	APBN, APBD, KPBU, Swasta, CSR	OPD Pelaksana Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
3	Palu Hijau	<ul> <li>Kualitas lingkungan meningkat</li> <li>Pengembangan kota hijau</li> <li>Peningkatan luasan ruang terbuka hijau</li> <li>Penanaman dan pemeliaharan pohon</li> </ul>	APBN, APBD, CSR	OPD Pelaksana Urusan Lingkungan Hidup	OPD Pelaksana Urusan Penataan Ruang, OPD Pelaksana Urusan Pertanahan
4	Palu Ramah, Aman, dan Tertib	<ul> <li>PKL tertib</li> <li>Tingkat kejahatan menurun</li> <li>Bebas pengemis, anak jalanan, gepeng, dsb</li> <li>Bebas hewan ternak berkeliaran</li> </ul>	APBD, CSR	OPD Pelaksana Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik	OPD Pelaksana Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)
5	CSR Forum	<ul><li>Terbentuknya 1 forum</li><li>Pengalokasian pembangunan dengan</li></ul>	APBD, CSR	Sekretariat Daerah	

	Program	Sasaran Program	Indikasi	ОРІ	) Pelaksana
No.	Unggulan	Unggulan	Sumber Pendanaan	Pengampu	Pendukung
		dana CSR guna mendukung program prioritas			
6	Satgas Cepat Tanggap	Terbentuknya 1 satgas yang beranggotakan lintas OPD     Tersusunnya SOP pelaksanaan tugas     Terintegrasi dengan web/aplikasi lapor	APBN, APBD, CSR	Urusan Ketenteraman	OPD Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum, OPD Pelaksana Urusan Kesehatan, OPD Pelaksana Urusan Sosial, OPD Pelaksana Urusan Perhubungan, OPD Pelaksana Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)
7	Kelurahan Mantap 2 Miliar	<ul> <li>Award bagi kelurahan terbaik dari sisi pelayanan dan kebersihan lingkungan</li> <li>Total 2 miliar/ tahun. Terbaik 1 1 miliar, terbaik 2 600 juta, terbaik 3 400 juta</li> </ul>	APBD, CSR	Sekretariat Daerah	OPD Pelaksana Urusan Lingkungan Hidup
C.	Agenda 3: Inf	rastruktur Mantap Berk	etahanan		
1	Bangun Palu Tahan Gempa	<ul> <li>Rencana tata ruang berbasis mitigasi bencana</li> <li>Perda standar bangunan tahan gempa</li> <li>Pembangunan kota dengan konsep mitigasi bencana</li> <li>Edukasi mitigasi bencana</li> </ul>		OPD Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum	OPD Pelaksana Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (BPBD) OPD Pelaksana Urusan Penataan Ruang, OPD Pelaksana Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Pembangunan Gudang Logistik Bencana	<ul> <li>1 pusat gudang logistik dan 4 gudang yang tersebar di setiap TEA</li> <li>Kerjasama dengan BUMN dan swasta</li> </ul>	APBN, APBD	OPD Pelaksana Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (BPBD)	OPD Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum, OPD Pelaksana Urusan Sosial
3	Waterfront Park Talise	Pengembangan waterfront sisi timur dan sisi barat Teluk Palu	APBN, APBD, Swasta	OPD Pelaksana Urusan	OPD Pelaksana Urusan Penataan Ruang,

	Program	Sasaran Program	Indikasi	OPI	D Pelaksana
No.	Unggulan	Unggulan	Sumber Pendanaan	Pengampu	Pendukung
	(Monumen Tsunami)			Pekerjaan Umum	OPD Pelaksana Urusan Pariwisata, OPD Pelaksana Urusan Pemuda dan Olahraga
4	Pembangunan Kawasan Olahraga	<ul> <li>Kawasan olahraga terpusat</li> <li>10 lapangan bola direvitalisasi untuk mendukung event olahraga tahun 2022</li> </ul>	APBN, APBD, CSR	OPD Pelaksana Urusan Pemuda dan Olahraga	OPD Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum, OPD Pelaksana Urusan Penataan Ruang
5	RTH Publik per Kecamatan	1 RTH 1 kecamatan	APBD, CSR	OPD Pelaksana Urusan Lingkungan Hidup	Kecamatan
6	Pembangunan Gedung Kesenian	1 gedung pusat kesenian beserta pengembangan kawasannya	APBN, APBD, Swasta	OPD Pelaksana Urusan Kebudayaan	OPD Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum, OPD Pelaksana Urusan Penataan Ruang
D.	Agenda 4: SD	M Mantap, Tangguh, da	n Berkarakt	er	
1	Peningkatan Kesejahteraan dan Kualitas Kerja Masyarakat Padat Karya	<ul> <li>Meningkatnya nilai insentif padat karya secara bertahap hingga Rp 1 juta/orang</li> <li>Pembagian wilayah kerja per orang per ruas jalan</li> <li>Usia &gt; 55 tahun akan dipensiunkan dari padat karya</li> </ul>	APBD	Kecamatan	OPD Pelaksana Urusan Lingkungan Hidup, OPD Pelaksana Urusan Sosial, OPD Pelaksana Urusan Kesehatan
2	Badan Pelayanan Rumah Ibadah	<ul> <li>Terfasilitasinya pembangunan rumah ibadah</li> <li>Pembangunan rumah ibadah lebih terrencana dan teratur</li> <li>Meningkatnya peran rumah ibadah</li> <li>Meningkatnya peran tokoh agama</li> </ul>	APBD, CSR	Sekretariat Daerah	OPD Pelaksana Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	Palu Berbagi	<ul> <li>Dapat berupa hibah yang diberikan Pemkot kepada lembaga/individu maupun ke daerah lain</li> <li>Dapat berupa penggalangan dana bersama untuk korban bencana, dsb</li> </ul>	APBD, Swasta, CSR	Sekretariat Daerah	

	Program	Sasaran Program	Indikasi	OPI	D Pelaksana
No.	Unggulan	Unggulan	Sumber Pendanaan	Pengampu	Pendukung
4	Palu Religi	<ul> <li>Menanamkan nilai-nilai keagamaan dalam karakter SDM kota</li> <li>Meningkatnya kerukunan antarumat beragama</li> <li>Dapat terintegrasi dengan pelayanan rumah ibadah</li> <li>Meningkatnya peran rumah ibadah dan tokoh agama</li> </ul>		Sekretariat Daerah	OPD Pelaksana Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik, OPD Pelaksana Urusan Pendidikan, OPD Pelaksana Urusan Kebudayaan
5	Palu Ramah Difabel	Pemberian pelatihan dan modal usaha	APBN, APBD, CSR	OPD Pelaksana Urusan Sosial	OPD Pelaksana Urusan Koperasi, UMKM, OPD Pelaksana Urusan Tenaga Kerja
6	Pembangunan Prasarana dan Pelestarian Seni Budaya	Prasarana dan sarana pelestarian seni budaya pada gedung kesenian dan kawasannya	APBN, APBD, Swasta	OPD Pelaksana Urusan Kebudayaan	OPD Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum, OPD Pelaksana Urusan Penataan Ruang
7	Event Olahraga Tahunan	<ul> <li>Event 11 cabang olahraga dimulai tahun 2022 dan selanjutnya rutin setiap tahun</li> <li>Kerjasama dengan persatuan/asosiasi olahraga</li> <li>Konsep pekan olahraga dan sport tourism</li> </ul>	APBN, APBD, Swasta	OPD Pelaksana Urusan Pemuda dan Olahraga	OPD Pelaksana Urusan Pariwisata
8	Event Komunitas Anak Muda	<ul> <li>Event komunitas anak muda dimulai tahun 2022 dan selanjutnya rutin setiap tahun</li> <li>Kerjasama dengan seluruh komunitas anak muda dari berbagai fokus pergerakan</li> <li>Konsep pekan pemuda dan festival</li> </ul>	APBN, APBD, Swasta	OPD Pelaksana Urusan Pemuda dan Olahraga	OPD Pelaksana Urusan Pariwisata
E.		layanan Dasar Mantap B	erkualitas		
1	Palu Kota Sehat	<ul> <li>Program Palu Kota         Sehat didorong dari sisi             kesehatan fisik dan             mental     </li> <li>Mendorong kesehatan             keluarga</li> <li>Turunnya persentase             stunting</li> </ul>	APBN, APBD, Swasta, CSR	OPD Pelaksana Urusan Kesehatan	OPD Pelaksana Urusan Pengendalian Penduduk dan KB, OPD Pelaksana Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, OPD Pelaksana Urusan Sosial,

No	Program	Sasaran Program	Indikasi Sumber	ОРІ	D Pelaksana
No.	Unggulan	Unggulan	Pendanaan	Pengampu	Pendukung
		<ul> <li>Meningkatnya rumah sehat</li> <li>Psikolog di puskesmas dan penyediaan mobil curhat</li> </ul>			OPD Pelaksana Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Transformasi Puskesmas menjadi Klinik Modern	<ul> <li>Pelayanan dan fasilitas puskesmas layaknya klinik modern</li> <li>Penempatan dokter spesialis di puskesmas yang menjadi klinik modern</li> </ul>	APBN, APBD, CSR	OPD Pelaksana Urusan Kesehatan	
3	Satu Ambulans Satu Kelurahan	<ul> <li>Ambulans dapat berupa mobil siaga yang ditempatkan di kelurahan</li> </ul>	APBN, APBD, CSR	OPD Pelaksana Urusan Kesehatan	Kecamatan
4	BPJS Gratis Warga Tidak Mampu	<ul> <li>Pemutakhiran data penerima langsung oleh RT/RW dan kelurahan</li> <li>Pemberian BPJS gratis sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan</li> </ul>	APBD	OPD Pelaksana Urusan Sosial	OPD Pelaksana Urusan Kesehatan
5	Tunjangan Kesehatan dan Santunan Duka RT/RW dan Petugas Rumah Ibadah	<ul><li>Seluruh ketua RT dan ketua RW</li><li>1 orang petugas per 1 rumah ibadah</li></ul>	APBD	Sekretariat Daerah	Kecamatan
6	1.000 Beasiswa	Total 1.000 beasiswa yang akan diberikan bertahap setiap tahun	APBN, APBD, Swasta, CSR	Sekretariat Daerah OPD Pelaksana Urusan Sosial	OPD Pelaksana Urusan Pendidikan
7	Reward Prestasi SD dan SMP 2 Miliar	<ul> <li>Total reward Rp 2 miliar. Terbaik 1 Rp 1 miliar, terbaik 2 Rp 600 juta, terbaik 3 Rp 400 juta</li> <li>Penilaian berdasarkan kriteria yang ditetapkan dari sisi sekolah berpresatsi, pengembangan, inovasi, dan kriteria lainnya</li> </ul>	APBD	OPD Pelaksana Urusan Pendidikan	OPD Pelaksana Urusan Penelitian dan Pengembangan
8	Percepatan Peningkatan Persamaan Kualitas Sekolah SD	<ul><li>Pemerataan penempatan guru</li><li>Pemerataan pembangunan sekolah</li></ul>	APBN, APBD, Swasta, CSR	OPD Pelaksana Urusan Pendidikan	OPD Pelaksanan Urusan Kepegawaian OPD Pelaksana Urusan Pendidikan dan Pelatihan

	Program	Sasaran Program	Indikasi	ОРІ	D Pelaksana
No.	Unggulan	Unggulan	Sumber Pendanaan	Pengampu	Pendukung
	dan SMP se- Kota Palu				OPD Pelaksana Urusan Penelitian dan Pengembangan
9	Pelatihan Tenaga Kerja Bersertifikat per Kelurahan	<ul> <li>Terintegrasi dengan program nasional</li> <li>Kerjasama dengan asosiasi/ lembaga pelatihan kerja</li> <li>Tenaga kerja bersertifikat akan didorong mengikuti program kerjasama ketenagakerjaan dengan daerah lainnya</li> </ul>	APBN, APBD, Swasta	OPD Pelaksana Urusan Tenaga Kerja	Kecamatan
10	Update Berkala Kompetensi dan Kapasitas Guru/ Pengajar	<ul> <li>Skill upgrading         dilakukan pada setiap         sekolah</li> <li>Peningkatan         kemampuan guru dari         sisi teknis dan non         teknis, termasuk         pemahaman kondisi         psikologis peserta didik</li> </ul>	APBN, APBD	OPD Pelaksana Urusan Pendidikan	OPD Pelaksanan Urusan Kepegawaian OPD Pelaksana Urusan Pendidikan dan Pelatihan OPD Pelaksana Urusan Penelitian dan Pengembangan
11	Bus Gratis untuk Siswa Sekolah	<ul> <li>Bus gratis khusus bagi anak sekolah</li> <li>5 koridor bus gratis setiap pagi dan sore</li> </ul>	APBN, APBD	OPD Pelaksana Urusan Perhubungan	OPD Pelaksana Urusan Pendidikan
12	Magang	<ul> <li>Kepala sekolah SMP akan dimagangkan di sekolah berkualitas pada skala nasional</li> <li>Target seluruh kelapa sekolah SMP se-Kota Palu</li> </ul>	APBN, APBD	OPD Pelaksana Urusan Pendidikan	OPD Pelaksanan Urusan Kepegawaian OPD Pelaksana Urusan Pendidikan dan Pelatihan
F.		merintahan Mantap Mel			
1	oleh Auditor Independen	Audit khusus terhadap proyek dan BUMD	APBD	Inspektorat	OPD Pelaksana Urusan Keuangan (pengelola keuangan)
2	E-Government	<ul> <li>Penerapan smart city</li> <li>Pengembangan e- planning, e-budgeting, e-monitoring, dll</li> </ul>	APBN, APBD, Swasta, CSR	OPD Pelaksana Urusan Komunikasi dan Informatika OPD Pelaksana Urusan Statistik	Seluruh OPD

No.	Program	Sasaran Program	Indikasi Sumber	ОРІ	) Pelaksana
140.	Unggulan	Unggulan	Pendanaan	Pengampu	Pendukung
				OPD Pelaksana Urusan Persandian	
3	Quick Service Lisence	Penyusunan SOP pelayanan publik	APBD	Sekretariat Daerah	Seluruh OPD Pelayanan Publik
4	One Touch Info Kota Palu	<ul> <li>Satu aplikasi digital untuk seluruh informasi</li> <li>Bank data</li> </ul>	APBN, APBD, Swasta, CSR	OPD Pelaksana	Seluruh OPD
5	Penerapan ISO atas Pelayanan Publik di Semua Instansi	Penerapan ISO Pelayanan Publik	APBD	Sekretariat Daerah	Seluruh OPD Pelayanan Publik
6	Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Honor	<ul> <li>Reformasi sistem         penerimaan honorer</li> <li>Merampingkan jumlah         honorer</li> <li>Meningkatnya nilai         insentif honorer</li> <li>Mengembangkan sistem         pegawai kontrak daerah</li> </ul>	APBD	OPD Pelaksanan Urusan Kepegawaian	Seluruh OPD
7	PNS Magang Nasional	<ul> <li>Magang PNS ke kementerian/lembaga/ BUMN</li> <li>2-6 PNS per OPD</li> <li>PNS yang mengikuti program diseleksi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan</li> </ul>	APBN, APBD	OPD Pelaksanan Urusan Kepegawaian OPD Pelaksana Urusan Pendidikan dan Pelatihan	Seluruh OPD
8	Pelayanan Pembuatan KTP, KK, dan Akte Lahir di Kantor Kelurahan	<ul> <li>Seluruh urusan dokumen kependudukan selesai di kelurahan</li> <li>Pemutakhiran data kependudukan secara mendetail</li> <li>Terhubung dengan sistem digital</li> </ul>	APBN, APBD	OPD Pelaksana Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	OPD Pelaksana Urusan Komunikasi dan Informatika, Kecamatan

Sumber Data : BAPPEDA Kota Palu

#### 1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

#### a. Dasar Pertimbangan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dalam UU No 23 Tahun 2014 TentangPemerintah Daerah pasal 18, dijelaskan Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal diatur dengan peraturan pemerintah.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Standar Pelayanan Minimal diterapkan pada urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal ini kemudian dijabarkan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan acuan bagi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan SPM dan menjadi pokokpokok acuan bagi pemerintah daerah dalam penerapan SPM.

SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SPM diterapkan pada urusan wajib Daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota. Untuk urusan pemerintahan lainnya, Daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar/indikator kinerja.

Salah satu bentuk upaya yang nyata dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang *excellent*, Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan setiap instansi pemerintah menyusun Standar Pelayanan Minimum (SPM) sesuai dengan urusan wajib yang menjadi tanggung jawabnya dan mewajibkan pemerintah daerah di Indonesia untuk menerapkannya sesuai dengan kondisi potensi dan permasalahan setempat.

Kebijakan ini dimanifestasikan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Seperti halnya dengan Instansi Pemerintah di Pusat dan di Daerah lainnya, Pemerintah Kota Palu juga berusaha untuk melaksanakan kebijakan mengenai pelayanan publik yang prima melalui penyusunan, penetapan dan penerapan SPM secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses Masyarakat untuk mendapatkanpelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

#### b. Dasar Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Peraturan perundangan yang melandasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1).

#### c. Kebijakan Umum

Kebijakan umum memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun program dan kegiatan Renstra SKPD. Perumusan kebijakan umum dan program Pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program Pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Kebijakan Umum RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 merupakan kunci dari strategi dan arah kebijakan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Kebijakan Umum menggambarkan tentang bagaimana keterkaitan antara strategi yang telah ditentukan dengan pilihan dan pelaksanaan programnya. Sehingga gambaran umum memberikan petunjuk operasional mengenai bagaimana strategi dan arah kebijakan yang telah ditentukan akan diimplementasikan melalui berbagai program yang ada dalam RPJMD.

Pilihan program unggulan serta program prioritas di masing-masing misi yang disinergikan dengan strategi agar lebih tepat/terstruktur, maka diperlukan kebijakan yang memenuhi minimal empat perspektif sebagai berikut:

a. Kebijakan umum pada perspektif masyarakat atau layanan yang didesain tidak hanya untuk masyarakat tertentu saja, namun lebih dari itu semua lapisan difasilitasi guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang

- lebih berkeadilan. Pada sisi ini Pemerintah berfungsi sebagai fasilitator dalam pelayanan sosial serta penyediaan kebutuhan/hak dasar masyarakat.
- b. Kebijakan umum pada perspektif proses internal, antara lain diarahkan guna mengantisipasi kompleksitas beban kerja kepemerintahan dalam merespon tuntutan internal organisasi maupun eksternal pelayanan kepada masyarakat (domestik dan internasional) dengan lebih baik, agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan lebih fleksibel sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme aparat sipil negara. Fleksibilitas pelayanan pemerintahan juga diarahkan kepada terselenggaranya sinkronisasi dan harmonisasi hubungan eksternal antara Pemerintah Kota dengan seluruh Perangkat Daerah.
- c. Kebijakan umum pada perspektif kelembagaan antara lain diarahkan pada optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi baik melalui upaya perbaikan Regulasi (administrasi), pengembangan Skill dan Manajemen Sumber Daya Manusia baik pada sisi perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya, dan optimalnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai penunjang kinerja birokrasi, serta kontrol (masyarakat).
- d. Kebijakan umum pada perspektif keuangan, dilakukan melalui optimalisasi desain Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah dan Kebijakan Pembiayaan Daerah. Kebijakan Pendapatan daerah dilakukan antara lain melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), peningkatan pengelolaan asset dan keuangan daerah, serta optimalisasi penerimaan Dana Perimbangan. Kebijakan Belanja daerah dioptimalkan untuk menambah porsi Belanja Langsung, serta secara simultan dilakukan upaya-upaya efisiensi anggaran guna mendorong peningkatan kapasitas fiskal daerah.

#### d. Kebijakan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

#### 1) Urusan Pendidikan

No.	Pelayanan Dasar	Indikator	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	2024

		Jumlah Warga Negara usia 7-18		
		tahun yang belum		
2.	Pendidikan	menyelesaiakan Pendidikan dasar	100%	2024
۷.	Kesetaraan	dan atau menengah yang	100%	2024
		berpartisipasi dalam		
		pendidikan kesataraan		
		Jumlah Warga Usia 5-6 tahun		
3.	Pendidikan Usia Dini	yang berpartisipasi dalam	100%	2024
		pendidikan PAUD		

## 2) Urusan Kesehatan

No.	Pelayanan Dasar	Indikator	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	2024
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	2024
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	2024
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	2024
5.	Pelayanan kesehatan pada Pendidikan Usia Dasar	Jumlah usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	2024
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara Usia Produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	2024
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Warga Negara Usia Lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	2024
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara Penderita Hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100%	2024
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	2024

No.	Pelayanan Dasar	Indikator	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Warga Negara dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	2024
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis	Jumlah Warga Negara terduga Tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	2024
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	Jumlah Warga Negara dengan ko Risiko Terinfeksi Virus Yang ng Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) yang		2024

## 3) Urusan Pekerjaan Umum

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari- hari	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh Kebutuhan pokok pokok air minum sehari-hari	100 %	2024
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %	2024

#### 4) Urusan Perumahan Rakyat

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah Warga Kabupaten Korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 %	2024

	Fasilitasi Penyediaan	Jumlah Warga Kabupaten yang		2024
	rumah yang layak huni	terkena relokasi akibat		
2	bagi masyarakat yang	program Pemerintah Daerah	100 %	
2.	terkena relokasi	Kabupaten yang memperoleh		
	program pemerintah	fasilitasi penyediaan rumah		
	kabupaten	yang layak huni		

## 5) Urusan Trantibumlinmas

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum			2024
2.	Pelayanan Informasi rawan bencana	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	2024
3.	Pelayanan Pencegahan Kesiapsiagaan Terhadap bencana	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	2024
4.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	evakuasi korban memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi		2024
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran  Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		100 %	2024

## 6) Urusan Sosial

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Rehabilitasi social dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah Warga Kabupaten penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitas social diluar panti	100 %	2024
2.	Rehabilitasi social dasar anak terlantar diluar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	2024

3.	Rehablitasi social dasar lanjut usia terlantar	Jumlah Warga Kabupaten lanjut usia terlantar yang	100 %	2024
	diluar panti	rehabilitasi social diluar panti		
4.	Rehabilitasi social dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti  Jumlah Warga Kabupaten yang gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi social dasar tuna social diluar panti		100 %	2024
5.	Perlindungan dan jaminan social pada saat tanggap & paksa bencana bagi korban bencana	Jumla korban bencana skala kabupaten yang menerima perlindungan dan jaminan social selama masa tanggap darurat & pasca	100 %	2024

## BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH

#### 2.1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro meliputi indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan ketimpangan pendapatan. Capaian Kinerja Makro Kota Palu Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Makro Kota Palu Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1.	Indeks Pembangunan Manusia	83,71	84,12	0,49
2.	Angka Kemiskinan	6,92	5,94	-14,126
3.	Angka Pengangguran	5,65	5,63	-0,354
4.	Pertumbuhan Ekonomi	4,96	4,61	-7,056
5.	Pendapatan Perkapita	79.452,38	83.867,92	5,557
6.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,324	0,337	4.012

Sumber : BPS Kota Palu dan Bappeda, diolah, 2025

#### 2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM mengGambarkan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan utamanya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat diGambarkan oleh Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir

yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak diGambarkan oleh Pengeluaran Per Kapita per tahun. Perbandingan antara IPM Nasional, Sulawesi Tengah, dan Kota Palu Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.1 di bawah ini:

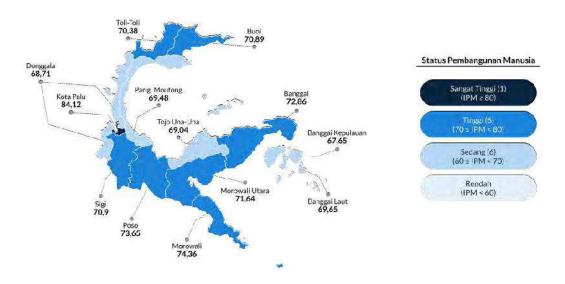
Gambar 2.1
IPM Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Indonesia
Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kota Palu dan Bappeda, diolah, 2025

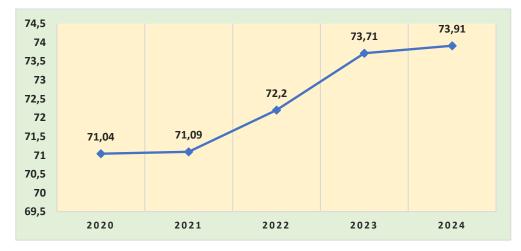
Secara umum, Indeks Pembangunan Manusia Kota Palu terus mengalami peningkatan selama periode 2020 hingga 2024. IPM Kota Palu meningkat dari 81,47 pada Tahun 2020 menjadi 84,12 di Tahun 2024. Selama periode tersebut, IPM Kota Palu selalu masuk pada kategori **sangat tinggi** karena sudah memiliki nilai IPM yang lebih dari 80. Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kota Palu masih berada di atas capaian Nasional dan Provinsi Sulawesi Tengah.

Gambar 2.2 IPM Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023



Terkait dengan komposit pembentuk IPM yang terdiri dari Usia Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan daya beli masyarakat dalam Pengeluaran Per Kapita yang secara grafik dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 2.3
Usia Harapan Hidup Kota Palu Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kota Palu dan Bappeda, diolah, 2025

Tahun 2020 UHH Kota Palu 71,04 tahun dan pada Tahun 2021 hingga 2024 terus mengalami kenaikan masing-masing menjadi 71,09, 72,20, 73,71 dan 73,91

tahun. Beberapa upaya pemerintah yang ditempuh untuk menjaga peningkatan UHH di Kota Palu yakni *Universal Healt Coverage* (UHC) dengan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sebagai penyedia jasa jaminan Kesehatan untuk mencover jaminan Kesehatan seluruh masyarakat Kota Palu, penyediaan satu ambulance satu kelurahan yang saat ini sudah tersedia di sebagian besar kelurahan, penyediaan tunjangan Kesehatan dan santunan duka untuk RT/RW, petugas rumah ibadah, dan kelompok rentan.

Selanjutnya, dimensi pendidikan menunjukkan adanya eskalasi positif baik ratarata lama sekolah maupun harapan lama sekolah. Rata-rata lama sekolah Tahun 2020 11,61 tahun terus mengalami kenaikan hingga 11,75 tahun di Tahun 2024. Dengan demikian, rata-rata penduduk Kota Palu berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan hingga kelas IX. Selanjutnya harapan lama sekolah pada Tahun 2020 sebesar 16,23 tahun terus mengalami tren positif hingga pada Tahun 2024 sebesar 16,52 tahun.

Gambar 2.4 Dimensi Pendidikan



Sumber : BPS Kota Palu dan Bappeda, diolah, 2025

Adapun upaya yang ditempuh Pemerintah Kota Palu untuk terus meningkatkan dimensi Pendidikan yakni dengan menyediakan beasiswa bagi keluarga tidak mampu dengan alokasi sebesar Rp 1 Milyar, menyediakan bus sekolah gratis bagi siswa, sedangakan dari sisi penyediaan fasilitas Pendidikan dilakukan dengan pembangunan kembali sekolah terdampak bencana dengan spesifikasi tahan gempa, menyiapkan

sarana pembelajaran dan guru yang ramah difabel, peninhkatan kapasitas tenaga pendidik dengan mengadakan pelatihan pelatihan guru secara berkala, serta magang nasional bagi guru dan kepala sekolah.

Dimensi standar hidup layak diukur dari pengeluran per kapita disesuaikan. Tahun 2020 rata-rata pengeluaran tahunan per jiwa penduduk Kota Palu sebesar Rp 14.839.000, yang di tahun berikutnya meningkat ke Rp 14.894.000. Peningkatan ini terus berlangsung hingga di Tahun 2024 ini mencapai Rp 15.941.000.

PENGELUARAN PER KAPITA 16.200 15.941 16.000 15.800 15.501 15.600 15.400 15.162 15.200 14.894 14.839 15.000 14.800 14.600 14.400 14.200 2020 2021 2022 2023 2024

Gambar 2.5 Dimensi Daya Beli Masyarakat

Sumber : BPS Kota Palu dan Bappeda, diolah, 2025

Intervensi pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat dengan rutin menggelar pasar murah yang dikerjasamakan dengan Bulog dan penyedia lain, pemberian bantuan usaha dengan berbagai skema dengan pendampingan melalui inkubator bisnis.

#### 2.1.2. Angka Kemiskinan

Persentase Penduduk Miskin digunakan menjadi Indikator Kinerja Utama Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Namun pada praktiknya, indikator tersebut diwakili oleh Angka Kemiskinan (P0) yang dirilis oleh BPS (Badan Pusat Statistik) dalam menilai keberhasilan pengentasan kemiskinan di Kota

Palu selama lima tahun terakhir. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Pada pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan atau batas kemiskinan menurut BPS adalah representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Tabel 2.2 Kemiskinan Kota Palu Tahun 2020-2024

Indikator			Tahun		
Kemiskinan	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
Garis Kemiskinan	559.246	571.605	604.280	632.261	658.112
Jumlah Penduduk Miskin	26,89	28,6	26,75	26,83	24,57
Tingkat Kemiskinan	6,8	7,17	6,63	6,56	5,94

Sumber: BPS Kota Palu dan Bappeda, diolah, 2025

Berdasarkan data BPS Kota Palu, garis kemiskinan di Kota Palu pada Tahun 2022 sebesar Rp.604.280 perkapita perbulan dengan jumlah penduduk miskin Kota Palu mencapai 26,75 ribu jiwa, sehingga persentase penduduk miskin sebesar 6,63%. Hal ini dikarenakan aktivitas perekonomian yang masih belum pulih akibat dampak pandemi Covid-19. Pada Tahun 2023, garis kemiskinan di Kota Palu mencapai Rp.632.261 perkapita perbulan, meningkat sebesar Rp.27.981 perkapita perbulan atau sebesar 4,63% bila dibandingkan Tahun 2022. Jumlah penduduk miskin Kota Palu Tahun 2023 mencapai 26,83 ribu jiwa, jumlah ini bertambah sebesar 80 ribu jiwa dari Tahun 2022, sehingga persentase penduduk miskin turun menjadi 6,56%. Pada Tahun 2024, garis kemiskinan di Kota Palu kembali meningkat menjadi Rp.658.112 perkapita perbulan dan jumlah penduduk miskin menurun menjadi 24,57 ribu jiwa. Dengan demikian, persentase penduduk miskin menurun menjadi 5,94%. Jumlah penduduk

miskin berhasil diturunkan sebanyak 2,26 ribu jiwa dari Tahun 2023. Meskipun terjadi fluktuasi, namun persentase penduduk miskin Kota Palu masih berada di bawah tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional.

Masalah kemiskinan, sebenarnya tidak hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin saja. Namun ukuran lain yang perlu diperhatikan adalah Tingkat kedalaman (P1) serta keparahan (P2) dari kemiskinan yang terjadi. Upaya yang bertujuan memperkecil jumlah penduduk miskin, diharapkan juga bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Pada periode 2023-2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kota Palu mengalami penurunan nilai sebesar 0,19 poin menjadi 0,65 pada Tahun 2024. Untuk Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami penurunan dari 0,19 pada 2023, menjadi 0,06 pada 2024.

#### 2.1.3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Palu diuraikan pada Tabel 3.3 di bawah ini:

Tabel 2.3
Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2020 - 2024

Uraian			Tahun		
Oraidii	2020	2021	2022	2023	2024
Palu	8,38	7,61	6,15	5,65	5,63
Sulawesi Tengah	3,77	3,75	3,00	2,95	2,94

Sumber : BPS Kota Palu dan Bappeda, diolah, 2025

Pada Tahun 2020, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Palu sebesar 8,38%. Hal ini dikarenakan dampak pandemi Covid-19 yang mengakibatkan penurunan penyerapan tenaga kerja dan jumlah karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja serta pengurangan jam kerja. Seiring meredanya pandemi

Covid-19, TPT Kota Palu secara bertahap semakin menurun. Kondisi tersebut, ditunjukkan dari TPT Tahun 2021 sebesar 7,61% atau mengalami penurunan sebesar 0,77%. Selanjutnya, pada Tahun 2022 dan 2023 menurun masing-masing sebesar 1,46% dan 0,50% menjadi 6,15% dan 5,65%. Nilai TPT Kota Palu terus menurun seiring kondisi perbaikan ekonomi, dengan TPT Kota Palu pada Tahun 2024 sebesar 5,63%.

Bila dilihat dari kontribusi jumlah pengangguran di Kota Palu, didominasi dari jenjang pendidikan SMA Umum dan SMA Kejuruan sampai ke jenjang Perguruan Tinggi. Angka tersebut masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Tengah, penyebabnya adalah Kota Palu sebagai pusat pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah yang mana lulusan SMA sederajat dari Kabupaten lain berbondong-bondong melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi yang berada di Kota Palu. Selanjutnya, sebagian besar lulusan perguruan tinggi tersebut enggan untuk kembali ke daerahnya.

#### 2.1.4. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi pengukur struktur perekonomian suatu wilayah. Pada Tahun 2020 pertumbuhan PDRB atau laju pertumbuhan ekonomi (LPE) mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi - 4,43%. Hal ini terjadi akibat dampak pandemi Covid-19 yang terjadi di sepanjang Tahun 2020. Pemulihan ekonomi dilakukan beriringan dengan penanggulangan Pandemi Covid-19 yang membawa kinerja perekonomian Kota Palu yang semakin membaik sehingga pada Tahun 2021 tumbuh sebesar 5,97% dan selanjutnya pertumbuhan tersebut terkoreksi menjadi 4,32% di akhir Tahun 2022. Pada Tahun 2023, Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kota Palu bertumbuh di angka 4,96% dibandingkan dengan Tahun 2023. Kondisi di Tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 4,61%. Pertumbuhan PDRB Kota Palu dapat dilihat pada Gambar berikut:

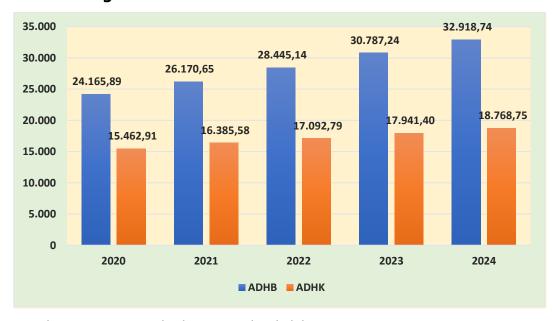
Gambar 2.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020-2024 (persen)



Sumber : BPS Kota Palu dan Bappeda, diolah, 2025

Selanjutnya perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar berikut:

Gambar 2.7
Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK Kota Palu Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kota Palu dan Bappeda, diolah, 2025

Capaian kinerja ekonomi Kota Palu merupakan Gambaran keberhasilan atas upaya Pemerintah Kota Palu dalam sinergi pemulihan ekonomi masyarakat Kota Palu.

Dalam mewujudkan keberlanjutan pemulihan ekonomi, Pemerintah Kota Palu terus melakukan upaya-upaya untuk peningkatan nilai pertumbuhan ekonomi di 2024, yang dilakukan melalui:

- Menjaga inflasi agar tetap terkendali pada sehingga terciptanya kepastian dan kondusivitas perekonomian. Di antaranya melalui optimalisasi Peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID);
- 2. Meningkatkan investasi melalui promosi, kemudahan investasi dan pelayanan perizinan non perizinan di Kota Palu;
- Meningkatkan produktivitas bisnis dan sektor pelaku usaha melalui pemberian insentif/kelonggaran pajak maupun retribusi serta pemanfaatan platform digital Inkubator Bisnis (InBis);
- 4. Keberlanjutan revitalisasi sejumlah titik potensi wisata di Kota Palu sebagai langkah untuk menggerakkan titik pertumbuhan;
- Pengembangan UMKM melalui fasilitasi pemasaran contohnya legalitas usaha melalui sertifikasi halal, fasilitasi tempat usaha, fasilitasi pemasaran, dan akses permodalan;
- 6. Keberlanjutan program padat karya untuk mengentasan kemiskinan dan meningkatkan golongan masyarakat berpendapatan rendah; dan
- 7. Meningkatkan sektor pariwisata melalui keberlanjutan program penataan Kawasan wisata, kolaborasi dengan *stakeholder* pariwisata, usaha perjalanan wisata, hotel dan restoran serta melakukan *event-event* dan promosi wisata dan sejarah.

#### 2.1.5. Pendapatan Perkapita

Perekonomian Kota Palu pada Tahun 2024 ditunjukkan oleh peningkatan nilai tambah yang dihasilkan dibandingkan tahun sebelumnya, yang terlihat pada nilai tambah PDRB Kota Palu baik PDRB ADHB maupun PDRB ADHK. Berdasarkan Tabel 3.4, nilai tambah dari seluruh lapangan usaha pembentuk PDRB Kota Palu pada Tahun 2024 menunjukkan peningkatan, namun dengan variasi peningkatan yang berbedabeda.



Tabel 2.4

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga
Konstan (ADHK) Tahun Dasar 2010 Kota Palu Menurut Lapangan
Usaha (Miliar Rupiah), 2023-2024

		AD	НВ	AD	НК
	Lapangan Usaha	2023	2024	2023	2024
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
А	Pertanian Kehutanan dan Perikanan	1.189,92	1.241,27	696,74	717,19
В	Pertambangan dan Penggalian	2.230,43	2.564,11	1.239,91	1.418,07
С	Industri Pengolahan	1.836,13	1.954,25	1.229,13	1.256,00
D	Pengadaan Listrik dan Gas	41,13	44,86	39,26	42,44
Е	Pengadaan Air Pengolahan Sampah Limbag dan Daur Ulang	86,40	93,32	53,96	56,28
F	Konstruksi	5.465,27	5.639,60	2.887,56	2.909,38
G	Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil Sepeda Motor	3.515,10	3.751,95	1.939,85	2.051,36
Н	Transportasi dan Pergudangan	2.623,74	2.819,36	1.247,96	1.315,90
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	308,58	351,96	178,76	191,93
J	Informasi dan Komunikasi	2.884,51	3.154,20	2.232,83	2.338,83
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.743,56	1.957,09	1.081,61	1.200,93
L	Real Estate	776,23	852,35	456,86	481,96
M,N	Jasa Perusahaan	347,17	377,32	210,59	221,48
0	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.165,93	4.421,02	2.342,27	2.405,26
Р	Jasa Pendidikan	2.176,52	2.248,12	1.266,26	1.306,02
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.111,85	1.148,48	650,39	670,24
R,S,T,U	Jasa Lainnya	284,77	299,49	178,46	186,08
	K DOMESTIK NAL BRUTO	30.787,24	32.918,74	17.941,40	18.768,75

Sumber : BPS Kota Palu dan Bappeda, diolah, 2025

Peningkatan nilai tambah pembentuk PDRB Kota Palu memberikan kontribusi positif terhadap pertambahan pendapatan per kapita Kota Palu yang dinilai atas dasar harga berlaku. Pada Tahun 2020 PDRB per kapita mengalami penurunan dari Tahun 2019 sebesar Rp. 20,2 juta atau -3,02% sebagai dampak dari kontraksi pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini membaik dengan peningkatan pada tahun-tahun berikutnya, di Tahun 2021 meningkat sebesar Rp. 69,32 juta dan Rp. 74,37 juta pada Tahun 2022, selanjutnya Tahun 2023 PDRB per kapita meningkat menjadi Rp. 79,45 juta. Selama Tahun 2024 Pemerintah Kota Palu telah melakukan berbagai interverensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Palu. Dari sisi konsumsi, pemerintah berupaya menjaga daya beli masyarakat Kota Palu tetap tinggi. Hal itu diwujudkan melalui pengendalian inflasi untuk meningkatkan konsumsi dengan menjaga harga barang dan jasa di Kota Palu stabil rendah. Seperti yang ditunjukkan data BPS, terjadi pertambahan PDRB per kapita sebesar Rp. 4,41 juta menjadi Rp. 83,86 juta. Dari data tersebut terlihat bahwa walaupun sempat terkontraksi pada Tahun 2020, namun ratarata pertumbuhan PDRB Per Kapita Kota Palu hingga Tahun 2024 memiliki tren positif. Perkembangan PDRB perkapita Kota Palu Tahun 2020-2024 secara terinci dapat dilihat pada Gambar 2.8 di bawah ini:

90 83,86 85 79,45 80 74,37 **75** 69,32 70 64,78 65 60 55 50 2020 2021 2022 2023 2024

Gambar 2.8
Pendapatan Perkapita Kota Palu Tahun 2020-2024

Sumber : BPS Kota Palu dan Bappeda, diolah, 2025

### 2.1.6. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Peningkatan kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan setiap daerah. Koefisien Gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Gini Rasio berada diantara 0 dan 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti terjadi pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti terdapat ketimpangan sempurna. Berdasarkan nilai gini rasio, terdapat tiga kelompok ketimpangan yaitu: ketimpangan tinggi, jika nilai koefisien gini rasio 0,5 atau lebih, ketimpangan sedang jika nilainya antara 0,30-0,49 dan ketimpangan rendah jika kurang dari 0,30. Berikut ini perkembangan gini rasio di Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah:

Tabel 2.5

Gini Ratio Kota Palu Tahun 2020-2024

Cini Batio	Tahun						
Gini Ratio	2020	2021	2022	2023	2024		
Kota Palu	0,304	0,308	0,355	0,324	0,337		
Sulawesi Tengah	0,326	0,316	0,308	0,304	0,301		

Sumber: BPS Kota Palu dan Bappeda, diolah, 2025

Tren perkembangan indeks Gini Kota Palu dapat dilihat pada Gambar 2.9 berikut:

Gambar 2.9
Indeks Gini Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kota Palu dan Bappeda, diolah, 2025

Indeks Gini Kota Palu pada Tahun 2024 melemah dibandingkan Tahun 2023 sebesar 0,324 menjadi 0,337 di Tahun 2024. Dalam 5 tahun terakhir Indeks Gini Kota Palu termasuk dalam kategori ketimpangan sedang. Pada dasarnya indeks gini merupakan ketimpangan kelompok pendapatan atas dan kelompok pendapatan kelas bawah, yang berarti dua hal tersebut bertolak belakang. Maka upaya Pemerintah Kota Palu pada Tahun 2025 terkait ketimpangan ditempuh dengan langkah strategis, diantaranya peningkatan insentif padat karya dari Rp 750.000/orang/bulan menjadi Rp. 1.000.000/orang/bulan bagi 3.500 orang peserta padat karya di 46 (empat puluh enam) Kelurahan. Selain itu, Pemerintah Kota Palu memberikan bantuan pada UMKM dengan berbagai skema dan pendampingan yang dialokasikan pada beberapa perangkat daerah.

### 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan Kota Palu dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Palu.

Untuk melihat capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil dan Indikator Kinerja Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Kota Palu dapat kita lihat dalam table sebagi berikut:

# 2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Hasil 2024

Tabel 2.6 Indikator Kinerja Kunci Hasil Kota Palu Tahun 2024

No	URUSAN	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Indikator Kinerja Hasil	Isian Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
	1.	1.a.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	10.323	70,5219292	Disdikbud Kota Palu
			yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan	14.638		Disdikbud Kota Palu
		1.a.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sedang belajar di sekolah dasar	40.802	98,638946	Disdikbud Kota Palu
1	PENDIDIKAN	Tidiz		Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kab/kota yang bersangkutan	41.365	·	Disdikbud Kota Palu
		1.a.3 1.a.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sedang belajar di sekolah menengah pertama	19.973		Disdikbud Kota Palu
				Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kab/kota yang bersangkutan	20.323	98,2778133	Disdikbud Kota Palu
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat	1.467	100	Disdikbud Kota Palu

No	URUSAN	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Indikator Kinerja Hasil	Isian Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
			dasar dan menengah	atau sedang belajar di			
			yang berpartisipasi dalam	pendidikan kesetaraan			
			pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun			
				yang belum menyelesaikan			Disdikbud Kota
				pendidikan dasar dan	1.467		Palu
				menengah pada kab/kota			. 4.4
				yang bersangkutan			
				Jumlah daya tampung rumah	1.796		Dinas Kesehatan
		1.b.1	1.b.1 Rasio Daya Tampung	sakit rujukan		4,6056124	Kota Palu
			Rumah Sakit Rujukan	Jumlah Penduduk di	389.959		Dinas Kesehatan
				kabupaten/kota	337.535		Kota Palu
			Persentase RS Rujukan	Jumlah RS rujukan yang	12		Dinas Kesehatan
		1.b.2 Tingkat kabupaten/kota	terakreditasi		100	Kota Palu	
			yang terakreditasi	Jumlah RS di kabupaten/kota	12		Dinas Kesehatan Kota Palu
2	KESEHATAN			Jumlah ibu hamil yang			Dinas Kesehatan
	RESCHAIAN		Persentase ibu hamil	mendapatkan pelayanan	7.451		Kota Palu
		1.b.3	mendapatkan pelayanan	kesehatan		97,6028294	Nota Faiu
			kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil di	7.634		Dinas Kesehatan
				kabupaten/kota	7.054		Kota Palu
				Jumlah ibu bersalin yang			Dinas Kesehatan
			Persentase ibu bersalin	mendapatkan pelayanan	7.592		Kota Palu
	1	1.b.4	mendapatkan pelayanan	persalinan		100	
			persalinan	Jumlah ibu bersalin di	7.592		Dinas Kesehatan
				kabupaten/kota	7.552		Kota Palu

No	URUSAN	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Indikator Kinerja Hasil	Isian Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	
		1.b.5	1.b.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	7.548	99,4073489	Dinas Kesehatan Kota Palu
			kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota	7.593		Dinas Kesehatan Kota Palu	
		1.b.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	34.828	98,4036391	Dinas Kesehatan Kota Palu	
		1.b.7	standar	Jumlah balita di kabupaten/kota	35.393		Dinas Kesehatan Kota Palu	
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	54.088	87,6799378	Dinas Kesehatan Kota Palu	
			kesehatan sesuai standar	Jumlah anak pendidikan dasar di kabupaten/kota	61.688		Dinas Kesehatan Kota Palu	
		1.b.8	Persentase orang usia 15- 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	226.088	87,1264846	Dinas Kesehatan Kota Palu	
			standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota	259.494		Dinas Kesehatan Kota Palu	
		1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	29.855	90,6014809	Dinas Kesehatan Kota Palu	

No	URUSAN	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Indikator Kinerja Hasil	Isian Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
				Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di kabupaten/kota	32.952		Dinas Kesehatan Kota Palu
		1.b.10	Persentase penderita hipertensi yang	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	66.859	100	Dinas Kesehatan Kota Palu
			mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota	66.859		Dinas Kesehatan Kota Palu
	1,b.1	1 h 11	Persentase penderita DM yang mendapatkan	Jumlah penderita DM yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	6.563	100	Dinas Kesehatan Kota Palu
			pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM di kabupaten/kota	6.563		Dinas Kesehatan Kota Palu
		1.b.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	621	100	Dinas Kesehatan Kota Palu
			pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota	621		Dinas Kesehatan Kota Palu
	1.b.	1 h 13 TBC mendapatkan	-	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	9.185	100,4703566	Dinas Kesehatan Kota Palu
			pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota	9.142		Dinas Kesehatan Kota Palu

No	URUSAN	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Indikator Kinerja Hasil	Isian Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		1.b.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai	Jumlah orang dengan resiko terinveksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	13.775	100	Dinas Kesehatan Kota Palu
		standar	Jumlah orang dengan resiko terinveksi HIV di kabupaten/ kota	13.775		Dinas Kesehatan Kota Palu	
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.c.1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kabupaten/kota (ha)	0	0	Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu
3		м	banjir di WS Kewenangan kabupaten/kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	1		Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu
		1.c.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman	Luas kawasan permukiman rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota (ha)	0	0	Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu
			pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan	1		Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu

No	URUSAN	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Indikator Kinerja Hasil	Isian Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
				abrasi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)			
		1.c.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan	Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan yang dibangun (ha) ditingkatkan (ha) dioperasi dan pelihara (ha)	551,3	64,4267851	Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu
		irigasi	irigasi	luas daerah irigrasi kewenangan kabupaten kota	855,7		Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu
	1.	1.c.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan	jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota	124,471	96,1745298	Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu
		terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut	129,422		Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu	
		1.c.5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya di olah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	59.147	74,4605585	Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu

No	URUSAN	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Indikator Kinerja Hasil	Isian Data	Capaian Kinerja	Sumber Data		
				Jumlah rumah di kabupaten/ kota	79.434		Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu		
	1.0	1.c.6 1.c.7	IIChi	Rasio kepatuhan IMB  Rasio kepatuhan IMB	Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang sesuai peruntukannya	417	100	Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu	
			kabupaten/ kota	Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku	417		Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu		
			Tingkat Kemantapan	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap	710,97	74,05089	Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu		
			Jalan kabupaten/kota	Jumlah total panjang jalan kabupaten/kota	960,11	74,03003	Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu		
	1.c.8. 1	1.c.8. 1	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat	Jumlah tenaga konstruksi yang terlatih di wilayah kab kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/ analis	344	61,75942	Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu		
			kompetensi	Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analis di wilayah kabupaten/kota	557		Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu		
		1.c.8.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Rasio proyek yang menjadi kewenangan		185		Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu	
		2				jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	185	100	Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu

No	URUSAN	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Indikator Kinerja Hasil	Isian Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
			Hunian untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah	jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2024	0		Dinas Perkim Kota Palu
	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	1.d.1	1.d.1 layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun 2024	1	0	Dinas Perkim Kota Palu
4		1.d.2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program	Rumah tangga penerima fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan+rumah tangga penerima subsidi uang sewa+rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni	0	0	Dinas Perkim Kota Palu
		'	pemerintah kabupaten/kota	Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima layanan	1		Dinas Perkim Kota Palu
		1.d.3 Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	permukiman kumuh	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)	175,99	66,0449582	Dinas Perkim Kota Palu
			•	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	266,47		Dinas Perkim Kota Palu
		1.d.4		Jumlah unit rumah tidak layak huni	1.298	1,634061	Dinas Perkim Kota Palu

No	URUSAN	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Indikator Kinerja Hasil	Isian Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	
			Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah total unit rumah kabupaten/kota	79.434		Dinas Perkim Kota Palu	
		1.d.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	1.465	10,1320977	Dinas Perkim Kota Palu	
			Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah kabupaten/kota	14.459		Dinas Perkim Kota Palu	
		1.e.1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat	Jumlah pengaduan yang ditangani	102	100	Satpol-PP Kota Palu	
		1.0.1	diselesaikan	Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	102	100	Satpol-PP Kota Palu	
		11 6 7 1	Persentase Perda dan	Persentase Perda dan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan	29	100	Satpol-PP Kota Palu
5	TRANTIBUMLINMAS		Perkada yang ditegakkan	Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	29	100	Satpol-PP Kota Palu	
		1.e.3	Jumlah warga negara yang memperoleh	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	231.398	100	Satpol-PP Kota Palu	
			layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan	231.398		Satpol-PP Kota Palu	

No	URUSAN	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Indikator Kinerja Hasil	Isian Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	
				informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan				
	1.	1.e.4	,	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	3.090	100	Satpol-PP Kota Palu	
				kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	3.090		Satpol-PP Kota Palu
		1.e.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan eyakuasi korban	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	445	100	BPBD Kota Palu	
			bencana	Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana	445		BPBD Kota Palu	
		1.e.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat daerah + Jumlah layanan pemadaman di kab/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan	248	98,0237154	Dinas Damkar Kota Palu	

No	URUSAN	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Indikator Kinerja Hasil	Isian Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
				atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah			Dinas Damlau Kata
				Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota	253		Dinas Damkar Kota Palu
		1.e.7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	8,04	8,04	Dinas Damkar Kota Palu
	1.f.:	1.f.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandang pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasanya di luar panti	173	11,9972261	Dinas Sosial Kota Palu
6	SOSIAL		yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	1.442		Dinas Sosial Kota Palu
		1.f.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran	1.614	100	Dinas Sosial Kota Palu
			setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	populasi korban bencana alam dan sosial yang membutuhkan perlindungan	1.614	Dinas Sosial Kota Palu	

No	URUSAN	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Indikator Kinerja Hasil	Isian Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	
				dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota				
		2.a.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di	3	100	Dinas Koprasi, UMKM dan Tenaga Kerja Dinas Koprasi, UMKM dan Tenaga	
		2.a.2 Persentase Tenaga	Persentase Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	0	0	Kerja Dinas Koprasi, UMKM dan Tenaga Kerja	
7	TENAGA KERJA	_	Bersertifikat Kompetensi	bersertinkat kompetensi	Jumlah tenaga kerja keseluruhan	26.826		Dinas Koprasi, UMKM dan Tenaga Kerja
		2.a.3	Tingkat Produktivitas	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)	17.941,4	9,325876	Dinas Koprasi, UMKM dan Tenaga Kerja	
			Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja	192.383	3,626676	Dinas Koprasi, UMKM dan Tenaga Kerja	
	2.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata 2.a.4 kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	1.890	47 096935	Dinas Koprasi, UMKM dan Tenaga Kerja		
			(PP/PKB, LKS Bipartit,	Jumlah perusahaan	4.013	47,096935	Dinas Koprasi, UMKM dan Tenaga Kerja	

No	URUSAN	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Indikator Kinerja Hasil	Isian Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
			terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)				
		2.a.5	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	420	14,973262	Dinas Koprasi, UMKM dan Tenaga Kerja
		2.a.5	Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja yang terdaftar	2.850	14,373202	Dinas Koprasi, UMKM dan Tenaga Kerja
		2.g.1	Persentase ARG pada	Jumlah ARG pada belanja operasi dan modal APBD	529.018.747.483	28,829564	Dinas P3A
	PEMBERDAYAAN	belanja langsung APBD	Jumlah seluruh belanja operasi dan modal APBD	1.834.986.983.599	20,029304	Dinas P3A	
8		2.g.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	Jumlah anak (penduduk usia kurang 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi	96	100	Dinas P3A
			Kabupaten/Kota	Jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)	96		Dinas P3A
		2 0 2	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan	72	36 5361602	Dinas P3A
		2.g.3	TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah penduduk perempuan	197,065	36,5361683	Dinas P3A

No	URUSAN	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Indikator Kinerja Hasil	Isian Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
	PANGAN 2.h	2.h.1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	27,499		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
9				Jumlah target cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota yang ditetapkan	28	98,2107143	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		2.i.1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi	Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	1.090.341.141	94,7897214	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
		2.1.1	dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	1.150.273.600	94,7097214	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
10	PERTANAHAN	Tanah Unt	Persentase Penetapan Tanah Untuk	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	•	100	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
	Umum  Tersedian Pembanga	Pembangunan Fasilitas Umum	Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	2	100	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	
		2.i.3	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	4.830.266	100	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan

No	URUSAN	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Indikator Kinerja Hasil	Isian Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
				Luas tanah di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan	4.830.266		Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
		2.i.4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha	0	0	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
			Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah pemerima tanah obyek landreform	1		Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
		2.i.5	Tersedianya tanah untuk	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah	0	0	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
		2.11.3	masyarakat	luas izin membuka tanah yang diterbitkan	1	Ü	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
			Penanganan sengketa tanah garapan yang	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani	7	100	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
		20	dilakukan melalui mediasi	Jumlah pengaduan sengketa tana garapan	7	100	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
11	LINGKUNGAN HIDUP	2.j.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota (IKLH)			Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu

No	URUSAN	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Indikator Kinerja Hasil	Isian Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		Terlaksananya	Terlaksananya	Jumlah Total Vol sampah yang dapat ditangani	53.538,2		Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu
		2.j.2	Pengelolaan Sampah di Wilayah kabupaten/kota	Jumlah seluruh Total vol timbunan sampah tahun berjalan kabupaten/kota	71.633,08	74,7394919	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu
		2.j.3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah kabupaten/kota	77	98,7179487	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu
			kabupaten/kota	usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	78		Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu
		2.k.1.	Perekaman KTP Elektronik	Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP	280.048	99,994287	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12	CATATAN SIPIL	1	referantial KTF Lieruotiik	Jumlah penduduk 17 tahun ke atas	280.064	99,994207	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12		ATAN SIPIL  2 k 1  Persentase anak usia 01-7	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA	68.761	50 67/3910	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2	tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun	115.227	59,6743819	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	URUSAN	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Indikator Kinerja Hasil	Isian Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		2.k.1.	<b>'</b>	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir	114.634	96,6910431	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		3	kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun	118.557	30,0310131	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2.k.1.	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	17	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		4	berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah Perangkat Daerah	17		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2.l.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	0	0	Surat Keterangan
4.5	PEMBERDAYAAN			Jumlah desa tertinggal (per awal tahun-n)	1		Surat Keterangan
13	B MASYARAKAT DAN DESA	2.1.2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	0	0	Surat Keterangan
				Jumlah desa berkembang (per awal tahun-n)	1		Surat Keterangan

No	URUSAN	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Indikator Kinerja Hasil	Isian Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		2.m.1	TFR (Angka Kelahiran Total)	ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur	2,04	2,04	Dinas PP dan KB Kota Palu
		2.m.2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern	Jumlah peserta KB aktif modern	41.910	74,1691148	Dinas PP dan KB Kota Palu
14	PENGENDALIAN	2.111.2	(Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah pasangan usia subur	56.506	74,1091140	Dinas PP dan KB Kota Palu
	PENDUDUK DAN KB		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak	Jumlah PUS yang ingin ber- KB tetapi tidak terlayani	3.190		Dinas PP dan KB Kota Palu
		2.m.3	terpenuhi (unmet need)	Jumlah Pasangan Usia Subur	56.506	5,6454182	Dinas PP dan KB Kota Palu
15	PERHUBUNGAN	2.n.1	Rasio konektivitas	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	39	39	Dinas Perhubungan Kota Palu
15		2.n.2	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0,3	0,3	Dinas Perhubungan Kota Palu
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.0.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo	41	100	Diskominfo Kota Palu
10			oleh Dinas Kominfo	Jumlah Perangkat Daerah	41		Diskominfo Kota Palu
		2.0.2	Persentase Layanan Publik yang	Jumlah layanan publik diselenggarakan secara online dan terintegrasi	12	100	Diskominfo Kota Palu

No	URUSAN	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Indikator Kinerja Hasil	Isian Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
			diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah layanan publik	12		Diskominfo Kota Palu
		2.0.3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	272.731	100	Diskominfo Kota Palu
			Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk	272.731		Diskominfo Kota Palu
		2.p.1	Meningkatnya Koperasi	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset	46	56,097561	Dinas Koprasi, UMKM dan Tenaga Kerja
17	KOPERASI DAN UKM		yang berkualitas	Jumlah seluruh koperasi aktif	82		Dinas Koprasi, UMKM dan Tenaga Kerja
			Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	891	2,6256078	Dinas Koprasi, UMKM dan Tenaga Kerja
		2.p.2	wirausaha	Jumlah usaha mikro keseluruhan	33.935	2,0230076	Dinas Koprasi, UMKM dan Tenaga Kerja
18	PENANAMAN MODAL	2.q	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	(Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota	-948.614.473.793	-74,5682793	Dinas PTSP Kota Palu

No	URUSAN	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Indikator Kinerja Hasil	Isian Data	Capaian Kinerja	Sumber Data		
				Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota	1.272.142.100.000		Dinas PTSP Kota Palu		
		2.r.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten/kota	2.389	2,446192	Dinas Pemuda dan Olahraga		
			ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota	97.662		Dinas Pemuda dan Olahraga		
19		nemuda dalam organisasi	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota	1.891	1,93627	Dinas Pemuda dan Olahraga			
			Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota	97.662		Dinas Pemuda dan Olahraga			
		2.r.3	2.r.	2.	2.r.3 Peningkatan Prestasi pad	/ r 3	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	47	47
20	STATISTIK	2.s.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) yang menggunakan data statistik dalam menyusun	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	41	100	Diskominfo Kota Palu		
			perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Perangkat Daerah	41		Diskominfo Kota Palu		
		2.s.2	Persentase Perangkat Daerah yang	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan data	41	100	Diskominfo Kota Palu		

No	URUSAN	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Indikator Kinerja Hasil	Isian Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
			menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan	statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah			
			daerah	Jumlah Perangkat Daerah	41		Diskominfo Kota Palu
21	PERSANDIAN 2.t	2 +	Tingkat keamanan	Jumlah nilai per area keamanan informasi	137	21,2403101	Diskominfo Kota Palu
21		informasi pemerintah	Jumlah area penilaian	645	21,2403101	Diskominfo Kota Palu	
22	KEBUDAYAAN	2.u	Terlestarikannya Cagar	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	9	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu
22	REBUDATAAN	2.u	Budaya	Jumlah cagar budaya yang terdata	9	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu
	3 PERPUSTAKAAN	2.v.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	71,92	71,92	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu
23		2.v.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi	91,1	91,1	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu

No	URUSAN	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Indikator Kinerja Hasil	Isian Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
				masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)			
		2.w.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	84,13	84,13	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu
24	KEARSIPAN 2.v	2.w.2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	84,53	84,53	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu
25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data:	Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota	2.210,71	170,7678998	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan	1.294,57	1, 0,, 0, 0,550	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
26	PARIWISATA	3.b.1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1)	3.406	135,4813047	Dinas Pariwisata Kota Palu

No	URUSAN	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Indikator Kinerja Hasil	Isian Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
				Jumlah wisatawan tahun n-1	2.514		Dinas Pariwisata Kota Palu
		3.b.2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1)	126.727	34,960812	Dinas Pariwisata Kota Palu
		3.0.2	l nusantara yang datang ke l	362.483	31,300012	Dinas Pariwisata Kota Palu	
	3.b.3	2 h 2 Ti	Tingkat Hunian	Jumlah kamar yang terjual	253.729	10.189,9196787	Dinas Pariwisata Kota Palu
		3.0.3	Akomodasi	Jumlah kamar yang tersedia	2.490	10.103,3130707	Dinas Pariwisata Kota Palu
		3.b.4 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku  3.b.5 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD		Jumlah Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	351,96	1.069,1782249	Dinas Pariwisata Kota Palu
			Total PBRB harga berlaku	32,91874	1.009,1702249	Dinas Pariwisata Kota Palu	
			Kontribusi sektor	Total realiasi PAD dari sektor 6.552.608.607.120	6.552.608.607.120	- 17,8721835 -	Dinas Pariwisata Kota Palu
			pariwisata terhadap PAD	Total realisasi PAD	36.663.727.220.407		Dinas Pariwisata Kota Palu
27	PERTANIAN 3.c	TANIAN  3.c.1 Produktivitas pertania per hektar per tahun	Produktivitas pertanian	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun	2.379,88	474,7890274	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			per hektar per tahun	Luas Panen	501,25		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

No	URUSAN	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Indikator Kinerja Hasil	Isian Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		3.c.2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)	-24	-50	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			ricilulai	jumlah kejadian/kasus  penyakit hewan menular  tahun sebelumnya (t-1)	48		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
28	KEHUTANAN	3.d	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura     Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga     Pemulihan ekosistem pada Tahura     Menurunnya gangguan kawasan TAHURA			100	Surat Keterangan
29	ESDM	3.e	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi	0	0	Surat Keterangan
30	PERDAGANGAN	3.f.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan			Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No	URUSAN	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Indikator Kinerja Hasil	Isian Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
			(IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab/Kota			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		3.f.2	Persentase kinerja	Realisasi pupuk	157,1	31,2786206	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	3.f.2 3.f.3	5.1.2	realisasi pupuk	Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)	502,26	31,2780200	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		2 6 2	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan	Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan	0	0	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		3.1.3	3.f.3 perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota	0	U	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		3.g.1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di	(Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n– Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1)	80	4,950495	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
31	DEDINDUSTRIAN		Kabupaten/Kota	Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1	1 616		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
31	31 PERINDUSTRIAN	3.g.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	737,38	737,38	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No	URUSAN	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Indikator Kinerja Hasil	Isian Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
			Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	130		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		3.g.3	jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dikeluarkan	3.918	3,3180194	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	0		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		3.g.4	jumlah <b>Izin Perluasan Industri (IPUI)</b> Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dikeluarkan	1	0	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	0		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		3.g.5	jumlah <b>Izin Usaha Kawasan Industri</b> ( <b>IUKI</b> ) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin yang dikeluarkan	1	0	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		3.g.6		Keterkinian informasi industri	100	100	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No	URUSAN	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Indikator Kinerja Hasil	Isian Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
			Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Kelengkapan informasi industri meliputi			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
32	TRANSMIGRASI	3.h	1. Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya 2. Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya 3. Jumlah satuan pemukiman yang dibina			100	Surat Keterangan

## 2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel 2.7
Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Kota Palu Tahun 2024

No	URUSAN	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Indikator Kinerja Hasil	Isian Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	PERENCANAAN DAN KEUANGAN	A NI	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga	Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	162.813.992.076	10,1299427	BPKAD Kota Palu
	REUANGAN		Kesehatan	Total belanja APBD	1.607.254.821.999		BPKAD Kota Palu

No	URUSAN	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Indikator Kinerja Hasil	Isian Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		4.a.2	Rasio Pendapatan Asli	Jumlah PAD	366.637.272.204	23,0557779	BPKAD Kota Palu
		4.a.2	Daerah (PAD)  Jumlah APBD	Jumlah Pendapatan pada APBD	1.590.218.616.623	23,055/7/9	BPKAD Kota Palu
		4.a.3	Mauritas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Mauritas SPIP	3	3	BPKAD Kota Palu
		4.a.4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP	3	3	BPKAD Kota Palu
		4.a.5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures	1.377.744.900.974	85,7203775	BPKAD Kota Palu
			expenditures)	jumlah belanja APBD	1.607.254.821.999		BPKAD Kota Palu
		4.a.6	Opini Laporan Keuangan	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kabupaten/Kota 10 Tahun terakhir	10	10	BPKAD Kota Palu
2	PENGADAAN	4.b.1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada	Jumlah kontrak infrasrtuktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun 2023	0	0	UKPBJ Kota Palu
			kuartal pertama	Jumlah kontrak keseluruhan tahun 2023	304		UKPBJ Kota Palu

No	URUSAN	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Indikator Kinerja Hasil	Isian Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
	4.b.2	4.b.2	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	6.623	76,2315838	UKPBJ Kota Palu
			Kompetitif	Jumlah seluruh pengadaan	8.688		UKPBJ Kota Palu
		4.b.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui	Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan	740.380.852.137	46,0662505	UKPBJ Kota Palu
			pengadaan	total belanja operasi dan modal	1.607.208.842.999,5		UKPBJ Kota Palu
		4.b.4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) - Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1)	-62.789.346.879	-15,0758519	UKPBJ Kota Palu
				Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1)	416.489.544.805		UKPBJ Kota Palu
3	KEPEGAWAIAN	4.c.1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS	Jumlah pegawai menurut pendidikan Perguruan Tinggi ke atas	1.718	71,4048213	BKPSDM Kota Palu

No	URUSAN	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Indikator Kinerja Hasil	Isian Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
			tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Total seluruh PNS (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	2.406		BKPSDM Kota Palu
			Rasio pegawai Fungsional	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)	505		BKPSDM Kota Palu
		4.c.2	(PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	2.406	20,9891937	BKPSDM Kota Palu
			Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi	142		BKPSDM Kota Palu
		4.c.3 (PNS tidak te	(PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	505	28,1188119	BKPSDM Kota Palu
		4 -1 1	Deviasi realisasi belanja	nelania dalam realisasi	0.0040	BPKAD Kota Palu	
		4.d.1	terhadap belanja total dalam APBD	Total belanja APBD dikurangi satu	1.783.558.438.271	9,8849	BPKAD Kota Palu
4	MANAJEMEN KEUANGAN 4.	Dovinci realizaci DAD		Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi	366.637.272.204	25 7220	BPKAD Kota Palu
			. 55	Total PAD dalam APBD dikurangi satu	493.680.808.034	25,7339	BPKAD Kota Palu
		4.d.3	Assets Management	Total Assets Management		4	

No	URUSAN	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Indikator Kinerja Hasil	Isian Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
				1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)	Iya		BPKAD Kota Palu
				Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak)	Iya		BPKAD Kota Palu
				3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)	Iya		BPKAD Kota Palu
				4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	Iya		BPKAD Kota Palu
			Rasio Anggaran Sisa	Nilai realisasi SiLPA	21.425.488.170		BPKAD Kota Palu
		4.d.4	Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	Total belanja anggaran tahun sebelumnya	1.514.442.224.320	1,4147445	BPKAD Kota Palu
		4.e.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk	Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda	. 234.344.179.399	97,45826	BPKAD Kota Palu
5	TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK	4.6.1	pelayanan	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda	240.455.944.212	97,43626	BPKAD Kota Palu
		4.e.2	Akses publik terhadap informasi keuangan	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di wensite pemda	8	66,6666667	BPKAD Kota Palu
			daerah	Total jumlah dokumen yang telah dirinci	12		BPKAD Kota Palu

#### 2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kota Palu dilakukan secara berkala yakni triwulanan, semesteran, dan tahunan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan untuk mengetahui capaian sebagai umpan balik untuk perbaikan agar target kinerja dapat tercapai. Pengukuran kinerja dilaksanakan oleh unsur perencanaan, keuangan, pengawasan serta pengendalian pembangunan. Pengukuran kinerja dilaksanakan melalui pembandingan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Palu Tahun 2024 serta menggali informasi terkait upaya apa yang sudah dilakukan perangkat daerah dalam mendukung pencapaian target, termasuk permasalahan yang dihadapi dan strategi pemecahan masalah (problem solving).

Untuk mempermudah pemaknaan atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kota Palu tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah meliputi:

- a. target kinerja dalam perjanjian kinerja;
- b. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja;
- c. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya;
- d. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah;
- e. analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai; dan
- f. analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.

Rincian Capaian Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2024 sebagaimana termuat dalam **Lampiran 1 (satu)** pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini.

#### **BAB III**

#### CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Dalam penyelenggaraan pemerintahannya Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi.

Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi. Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi berfungsi pula selaku wakil pemerintah di daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten dan Kota.

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan pemerintah kepada daerah dan atau desa serta dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Tugas Pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi.

Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan bagi daerah atau desa. Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah atau desa meliputi sebagian tugas-tugas pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah akan lebih efisien dan efektif serta berkewajiban melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

## 3.1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Untuk melaksanaan tugas pembantuan, yang menjadi dasar hukum pelaksanaannya adalah :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penangangan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

#### 3.2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Pemerintah Kota Palu melaksanakan sebagian urusan pemerintahan melalui tugas pembantuan yang diberikan oleh level pemerintahan di atasnya yakni Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Penyelenggaraan tugas pembantuan merupakan cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya, mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan.

Pelaksanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Kota Palu tersebut, dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang ditugaskan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah. Tugas pembantuan yang diberikan oleh level pemerintah di atasnya apabila dilaksanakan oleh daerah akan lebih efisien dan efektif.

Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana diuraikan di atas, memberikan konsekuensi terhadap pengaturan pendanaan. Seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat harus didanai dari APBN. Pengaturan pendanaan kewenangan Pemerintah Pusat melalui APBN mencakup salah satunya pendanaan sebagian urusan pemerintahan yang akan ditugaskan kepada daerah otonom berdasarkan asas tugas pembantuan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menguraikan Pemerintah provinsi, kabupaten dan kota berhak mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan Pemerintahan yang menjadi

tanggung jawab Daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi, sedangkan Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pengalokasian dana tugas pembantuan tersebut, dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan di daerah. Selain itu, alokasi dana tugas pembantuan dimaksudkan untuk menciptakan keselarasan dan sinergitas secara nasional antara program dan kegiatan tugas pembantuan yang didanai dari APBN dengan program dan kegiatan desentralisasi yang didanai dari APBD.

## 3.3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diatur bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

## 3.3.1. Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan oleh Kota Palu

Pemerintah Kota Palu pada Tahun 2024 menerima tugas pembantuan di bidang sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk melaksanakan 2 (dua) kegiatan yakni penyaluran dana bantuan bagi penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dengan anggaran sebesar Rp. 6.573.557.240,- dan Kegiatan penyaluran bantuan sosial pangan non tunai sebesar Rp. 11.000.400.000,-. Selanjutnya, capaian pelaksanaan tugas pembantuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ke Pemerintah Kota Palu yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Palu, dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 3.1

Capaian Kinerja Tugas Pembantuan Pemerintah Pusat Yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Palu

No	Bdang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Kota	SKPD Pelaksana TP	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
1	Sosial	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin	Penyaluran dana bantuan bagi penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH)	Palu	Dinas Sosial Kota Palu	6.573.557.240	6.573.557.240	100	13.627 jiwa	100	
		Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai	Kegiatan penyaluran bantuan sosial pangan non tunai			11.000.400.000	11.000.400.000	100	18.593 Jiwa	100	

Sumber data : Dinas Sosial Kota Palu, 2025 (data diolah)

## 3.3.2. Tugas Pembantuan Provinsi Yang Dilaksanakan Oleh Kota Palu

Pemerintah Kota Palu pada Tahun 2024, tidak menerima tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

#### 3.4. Permasalahan dan Kendala

Berdasarkan realisasi penyaluran dana bantuan bagi penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan kegiatan penyaluran bantuan sosial pangan non tunai telah mencapai 100 %, meski demikian masih ditemukan permasalahan dan kendala sebagai berikut:

- Masih banyak di antara Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yg belum mengetahui kepesertaannya sebagai penerima Bansos Sembako, khususnya jika penyaluran Bansos melalui Himpunan Bank Negara (Himbara), hal ini dikarenakan Himbara belum aktif dalam mekanisme pendistribusian Bansos Sembako, berbeda dengan PT. Pos yg lebih proaktif dengan 3 (tiga) mekanisme penyaluran yang diterapkan yakni melalui outlet PT. Pos, melalui Komunitas, dan *Door To Door*.
- Sejak Tahun 2021 semua data terkait KPM hanya diberikan kepada Himbara / PT
  Pos dan tidak terdistribusi ke Dinas Sosial /Pendamping, sehingga Dinas Sosial
  memiliki kerbatasan dalam melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait
  Bansos Sembako, namun sejak Februari 2025 telah tersajikan melalui aplikasi yang
  dikembangkan Kementerian Sosial yakni Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial
  Next Generation (SIKSNG).
- 3. Masih terdapat kasus KPM yang kehilangan atau mengalami kerusakan kartu, tapi ketika akan dilakukan pergantian terjadi kesulitan karena persediaan kartu di bank penyalur terkadang kehabisan.
- 4. Beberapa Kasus Bansos KPM terblokir sejak lama dikarenakan beberapa permasalahan tidak terkait langsung dengan Bansos, misalnya karena kredit macet, atau pengembalian bantuan yg tumpang tindih dari OPD yg lain. Hal ini tidak diinfokan secara detil oleh Himbara sehingga menimbulkan kebingungan di pihak KPM.

## 3.5. Saran dan Tindak Lanjut.

Untuk mengatasi permasalahan data penerima manfaat program keluarga harapan dan penerima bantuan sosial pangan non tunai, maka diperlukan hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan rekonsiliasi data Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan data Dinas Sosial Kota Palu secara berkala dengan pelibatan unsur masyarakat, organisasi non pemerintah, dan stakeholder lainnya melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKSNG).
- 2. Membangun koordinasi dengan semua pihak yang terlibat dalam proses penyaluran bantuan seperti Himbara, PT. Pos sehingga bisa mengetahui progress penyaluran bantuan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang valid tentang penerima bantuan.

#### **BAB IV**

#### PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

#### 4.1. Urusan Pendidikan

#### 4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Penerapan standar pelayanan minimal urusan pendidikan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (SPM) Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal. Untuk daerah kabupaten/kota jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan. Adapun jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota adalah :

Tabel 4.1
Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Standar Pelayanan Minimal
Urusan Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan

## 4.1.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target pencapaian standar pelayanan minimal urusan pendidikan Tahun 2024 yang telah ditetapkan adalah 100% dengan rincian target sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Capaian Penerima Layanan Dasar	Target Capaian Mutu Layanan Minimal
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	14.559	100
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	61.091	100
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	562	100

Sumber : Laporan SPM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Tahun 2024 (data diolah)

## 4.1.3. Alokasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2024, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu dialokasikan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2024 sebesar 437,994,882,246,- yang diperuntukkan untuk belanja operasi sebesar Rp. 427.137.419.168,3,- dan belanja modal sebesar Rp. 10.857.463.077,-. Untuk alokasi anggaran perangkat daerah dan anggaran untuk penerapan SPM dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3 Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu

No	Pendanaan	Pagu Anggaran	Alokasi Anggaran Dengan APBD (%)
1	APBD Kota Palu	1,835,736,983,599	
2	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	445.710.340.245	24,28
3	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Pada Satker PD	220,375,704,048	12,00
	APBD	220,375,704,048	
	A. APBD Murni	0	
	B. APBD DAU	39,378,598,162	2,15
	C. APBD DAK Fisik	7,646,280,000	0,42
	D. APBD DAK NON Fisik	173,350,825,886	9,44

Sumber : Laporan SPM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu, 2024 (data diolah)

Berdasarkan tabel tersebut memperlihatkan bahwa persentase anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu dibandingkan dengan APBD Kota Palu mencapai 23,86%, sementara anggaran yang diperuntukkan bagi penerapan SPM sebesar 12%.

## 4.1.4. Dukungan Personil

Jumlah personil guna mendukung pencapaian SPM urusan Pendidikan adalah sebanyak 4.206 orang bai pada Dinas Pendidkan dan Kebudayaan maupun pada Satuan Pendidikan, yang terdiri dari :

Tabel 4.4 Kondisi Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu

No -	– Uraian		Jenjang Pendidikan			
140	- Ulaidii	SMA	Diploma	S1	S2	
1	PNS					
	- Golongan I	0	1	0	0	1
	- Golongan II	0	37	23	0	60
'	- Golongan III	0	25	723	43	791
'	- Golongan IV	0	12	567	101	680
2	PPPK	0	0	851	20	871
3	Non ASN	361	58	1337	47	1803
'	Jumlah	361	133	3501	211	4206

Sumber : Laporan SPM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu, 2024 (data diolah)

## 4.1.5. Hasil Capaian

Pencapaian SPM pelayanan dasar urusan Pendidikan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.5 Realisasi Capaian Penerima Layanan Dasar dan Capaian Mutu Layanan Minimal Layanan Dasar

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Capaian Penerima Layanan Dasar			Capaian Mutu Layanan
	Dasar		Target	Realisasi	%	Minimal (%)
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	14.559	10.166	69,83	65,81
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	61.091	61.851	100	91,54

3 Pendidika Kesetaraa		562	520	92,53	94,82
--------------------------	--	-----	-----	-------	-------

Sumber : Laporan SPM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Tahun 2024 (data diolah)

Berkaitan dengan pencapaian penerapan SPM urusan pendidikan, perhitungan pencapaian didasarkan pada 80% dari pencapaian penerima layanan dasar dan 20% dari pencapaian mutu minimal layanan dasar. Berdasarkan hal tersebut, maka capaian penerapan SPM urusan pendidikan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.6 Realisasi Pencapaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Capaian I Layana		Capaia Layanan		Total Capaian Jenis
	Dasar		Realisasi	80%	Realisasi	20%	Pelayanan Dasar
1	2	<i>3</i>	4	<i>5=4*80%</i>	6	7=6*20%	8=5+7
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	69,83	55,86	65,81	13,16	69,02
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100	80,00	77,85	15,57	98,31
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	80	79,80	15,96	92,98

# Capaian SPM Urusan Pendidikan **86,77%**

Sumber : Laporan SPM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Tahun 2024 (data diolah)

#### 4.1.6. Permasalahan dan Solusi

Penerapan SPM Tahun 2024 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu belum tercapai sesuai target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

#### Permasalahan:

- Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam pengumpulan dan analisis data.
- Rendahnya komitmen dari pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pengumpulan data.
- Proses pengumpulan data yang kompleks dan memakan waktu.
- Keterbatasan kompetensi petugas dalam bidang statistik, analisis data, dan perencanaan.
- Data yang dibutuhkan untuk mengukur pencapaian SPM seringkali tidak lengkap.
- Anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan seringkali tidak mencukupi untuk memenuhi semua indikator SPM.
- Anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan seringkali tidak mencukupi untuk memenuhi semua indikator SPM

#### Solusi:

- Peningkatan Kapasitas SDM: Melakukan pelatihan dan pendampingan bagi petugas yang terlibat dalam pengumpulan data, analisis, dan perencanaan.
- Koordinasi Intensif: Meningkatkan koordinasi dengan semua pihak terkait untuk memastikan komitmen dan dukungan dalam pelaksanaan program.
- Optimalisasi Penggunaan Anggaran: Mengalokasikan anggaran secara lebih efisien dan memprioritaskan program-program yang memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian SPM.
- Pemanfaatan Teknologi : menggunakan sistem informasi dan teknologi untuk memudahkan proses pengumpulan data, penghitungan kebutuhan, dan pelaporan.

#### 4.2. Urusan Kesehatan

## 4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.7 Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Urusan Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> )	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human</i> <i>Immunodeficiency Virus</i> ) yang mendapatkan pelayanan kesehatan

## 4.2.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target pencapaian standar pelayanan minimal urusan Kesehatan pada Tahun 2024 adalah 100% dari seluruh jenis pelayanan dasar dengan rincian target angka absolut sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.8 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Capaian Penerima Layanan Dasar	Target Capaian Mutu Layanan Minimal
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	7.634	100%
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	7.634	100%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	7.267	100%
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	37.032	100%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	61.091	100%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	255.030	100%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	30.370	100%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	69.351	100%
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	6.222	100%
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	815	100%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	9.142	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Capaian Penerima Layanan Dasar	Target Capaian Mutu Layanan Minimal
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> )	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency</i> <i>Virus</i> ) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	10.919	100%

Sumber data: Laporan SPM Dinas Kesehatan Kota PaluTahun 2024 (Data diolah)

## 4.2.3. Alokasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2024, Dinas Kesehatan Kota Palu dialokasikan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 165.151.625.528,- yang diperuntukkan untuk belanja operasi sebesar Rp. 148.353.318.655,- dan belanja modal sebesar Rp. 16.798.306.873,-.

Tabel 4.9 Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM

No	Uraian	Anggaran	Alokasi Anggaran Dengan APBD (%)
1	APBD Kota Palu	1.835.736.983.599	
2	Alokasi Anggaran Perangkat daerah	165.151.625.528	9,00
3	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dinas Kesehatan :	9.029.545.573	0,49
	a. APBD DAU	6.393.318.183	
	b. APBD DAK Non Fisik	2.636.227.390	

Sumber data: Laporan SPM Dinas Kesehatan Kota PaluTahun 2024

## 4.2.4. Dukungan Personil

Jumlah personil guna mendukung pencapaian SPM urusan kesehatan Tahun 2023 adalah sebanyak 721 orang ASN dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.10 Kondisi Pegawai Menurut Golongan

No	Uraian	Jumlah
1	Golongan I	-
2	Golongan II	152
3	Golongan III	501
4	Golongan IV	68
	Jumlah	721

Sumber data: Laporan SPM Dinas Kesehatan Kota PaluTahun 2024

Tabel 4.11 Konsisi Pegawai Menurut Jabatan

No	Uraian	Jumlah
1	Struktural	-
	- Eselon II	1
	- Eselon III	5
	- Eselon IV	1
2	Fungsional	573
3	Pelaksana	141
	Jumlah	772

Sumber data: Laporan SPM Dinas Kesehatan Kota PaluTahun 2024

## 4.2.5. Hasil Capaian

Hasil capaian penerapan SPM urusan kesehatan pada Tahun 2024 baik capaian penerima layanan dasar dan capaian mutu layanan minimal layanan dasar pada setiap jenis pelayanan dasar dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.12 Realisasi Capaian Penerima Layanan Dasar dan Capaian Mutu Layanan Minimal Layanan Dasar Urusan Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target Capaian Penerima Layanan Dasar			Capaian Mutu Layanan
		Target	Realisasi	%	Minimal (%)
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	7.634	7.451	97,60	88,52
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	7.634	7.592	99,45	100
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	7.267	7.593	100	78,22
4	Pelayanan kesehatan balita	37.032	34.828	94,05	89,71

No	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian	Capaian Mutu Layanan		
		Target	Realisasi	%	Minimal (%)
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	61.091	60.131	98,43	81,60
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	255.030	226.088	88,65	80,71
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	30.370	29.855	98,30	96,12
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	69.351	66.859	96,41	100
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	6.222	6.563	100	93,21
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	815	621	76,20	88,89
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	9.142	9.185	100	97,99
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> )	10.919	13.775	100	92,62

Sumber data: Laporan SPM Dinas Kesehatan Kota PaluTahun 2024 (Data diolah)

Perhitungan pencapaian SPM urusan kesehatan dihitung rata-rata total capaian yang melingkupi 80% pencapaian penerima layanan dasar dan 20% dari pencapaian mutu minimal layanan dasar. Berdasarkan hal tersebut, maka capaian penerapan SPM urusan kesehatan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.13 Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian Penerima Layanan Dasar		Capaian Mutu Layanan Minimal		Total Capaian
		Realisasi	80%	Realisasi	20%	Capaian
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	97,60	78,08	88,52	17,70	95,79
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	99,45	79,56	100	20	99,56
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	80	78,22	15,64	95,64
4	Pelayanan kesehatan balita	94,05	75,24	89,71	17,94	93,18
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	98,43	78,74	81,60	16,32	95,06
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	88,65	70,92	80,71	16,14	87,06

No	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian Pa Layanan		a Capaian Layanan I		Total Capaian
		Realisasi	80%	Realisasi	20%	
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	98,30	78,64	96,12	19,22	97,87
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	96,41	77,13	100	20	97,13
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100	80	93,21	18,64	98,64
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	76,20	60,96	88,89	17,78	78,73
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	100	80	97,99	19,60	99,60
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> )	100	80	92,62	18,52	98,52

# Capaian SPM Urusan Kesehatan 94,64%

Sumber data: Laporan SPM Dinas Kesehatan Kota PaluTahun 2024 (Data diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa capaian SPM urusan kesehatan belum tercapai target yang telah ditentapkan yaitu dengan capaian **96,64%** dengan kriteria **TUNTAS UTAMA**. Hasil ini menunjukkan kinerja penerapan SPM bidang urusan kesehatan mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 sebesar 86,48%.

## 4.2.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dan solusi yang diambil dalam pencapaian masing-masing jenis layanan dalam penerapan SPM Tahun 2024 pada Dinas Kesehatan Kota Palu adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
  - Permasalahan/kendala:
  - Masih terkendala dengan jumlah sasaran yang tidak sesuai dengan data riil jumlah ibu hamil yang ada, karena penetapan sasaran masih menggunakan proyeksi.

- Masih terdapat ibu hamil yang terlambat memeriksakan kehamilan trimester I sesuai standar di fasilitas Kesehatan (Poskesdes, Puskesmas) yang secara tidak langsung mempengaruhi total cakupan K4 dan K6.
- Terbatasnya sarana prasarana, ada beberapa bahan habis pakai (BHP) yang digunakan untuk pemeriksaan ibu hamil masih kurang tersedia.

#### Solusi:

- Puskesmas diharapkan mampu melakukan pengumpulan data sasaran pada awal tahun
- Peningkatan sarana prasarana di fasilitas kesehatan sesuai standar
- Peningkatan jumlah anggaran untuk kegiatan SPM
- memaksimalkan program P4K, dan kelas ibu hamil di 14 Puskesmas Kota Palu.
- b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

#### Permasalahan/kendala:

- Penetapan sasaran yang tidak sesuai dengan data riil jumlah ibu bersalin yang ada, karena penetapan sasaran masih menggunakan estimasi/proyeksi.
- Pencatatan pelaporan pelayanan persalinan dari faskes di wilayah kerja
   Puskesmas masih ada yang terlewatkan sehingga mempengaruhi total cakupan persalinan.

#### Solusi:

- Puskesmas diharapkan mampu melakukan pengumpulan data sasaran pada awal tahun.
- Lebih mengoptimalkan kinerja tenaga kesehatan khususnya bidan dalam hal pelaporan pelayanan persalinan serta meningkatkan peran aktif dan dukungan dari Praktik Bidan Mandiri dalam pelayanan KIA.
- c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

## Permasalahan/kendala:

- Penetapan sasaran yang tidak sesuai dengan data riil jumlah bayi baru lahir yang ada, karena penetapan sasaran masih menggunakan estimasi/proyeksi.
- Terbatasnya sarana prasarana, ada beberapa bahan habis pakai (BHP) yang digunakan untuk pemeriksaan bayi baru lahir masih kurang tersedia.

#### Solusi:

- Puskesmas diharapkan mampu melakukan pengumpulan data sasaran pada awal tahun.
- Peningkatan sarana prasarana di fasilitas kesehatan sesuai standar.

## d. Pelayanan Kesehatan Balita

## Permasalahan/kendala:

- Penetapan sasaran yang tidak sesuai dengan data riil jumlah balita yang ada, karena penetapan sasaran masih menggunakan estimasi/proyeksi.
- Keterbatasan anggaran menyebabkan tidak semua mutu dapat terpenuhi karena ada beberapa bahan habis pakai (BHP) yang digunakan untuk pemeriksaan pendukung masih kurang tersedia.
- Adanya perbedaan persepsi mengenai definisi operasional diantara kader Posyandu balita terkait standarisasi balita harus memenuhi kriteria pelayanan Kesehatan 8x baik secara frekuensi maupun kualitas pelayanan Kesehatan yang dilakukan.
- Masih kurangnya pasrtisipasi masyarakat dalam memanfaatkan Posyandu maupun fasilitas kesehatan lainnya untuk memeriksakan tumbuh kembang anaknya.

#### Solusi:

- Puskesmas diharapkan mampu melakukan pengumpulan data sasaran pada awal tahun.
- Peningkatan jumlah anggaran untuk kegiatan SPM.
- Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan khususnya terkait penanganan dan pemenuhan SPM.
- Melakukan sosialisasi SPM kepada masyarakat luas untuk meningkatkan partisipasi
- e. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

### Permasalahan/kendala:

- Masih kurangnya bahan habis pakai (BHP) yang digunakan untuk pemeriksaan pendukung.
- Besaran anggaran yang belum optimal untuk pelaksanaan kegiatan program pelayanan anak sekolah.

- Masih kurangnya dukungan dan koordinasi lintas program dan lintas sektor.
- Kegiatan pembinaan dan penjaringan Kesehatan anak sekolah yang belum terlaksana dengan baik, dimana harus menyesuaikan jadwal turun skrining petugas dengan aktivitas di sekolah karena sering terjadi pada saat pelaksanaan pelayanan kesehatan ada murid yang tidak sempat hadir di kelas yang akan mempengaruhi capaian sasaran target.
- Jumlah sasaran anak sekolah yang akan diskrining tidak sesuai dengan jumlah tenaga Kesehatan di Puskesmas yang terbatas untuk kegiatan UKS.

#### Solusi:

- Peningkatan sarana prasarana pendukung pemeriksaan sesuai standar
- Peningkatan jumlah anggaran untuk kegiatan SPM
- Penguatan koordinasi lintas program dan lintas sektor
- f. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

#### Permasalahan/kendala:

- Masih belum awarenya masyarakat usia 15-59 memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan baik itu Puskemas maupun Posbindu PTM untuk pemeriksaan kesehatan karena takut mengetahui hasil pemeriksaan, dan mereka hanya melakukan skrining kesehatan hanya pada saat sakit saja.
- Masih belum maksimalnya pelaksanaan skrining ke semua wilayah kerja
   Puskesmas karena tenaga PTM di Puskesmas dan Posbindu masih kurang.
- Saat skrining masih ada warga masyarakat yang tidak membawa KTP sehingga terlepas dari pencatatan, karena sekarang pencatatan kunjungan terinput dalam aplikasi ASIK.
- Masih kurangnya dukungan dan koordinasi lintas program dan lintas sektor.

- Meningkatkan media KIE bagi tenaga kesehatan dan masyarakat, membuat penyuluhan, melaksanakan posbindu mobile, membuat inovasi Skrining PTM ditempat keramaian (pasar tradisional), serta memaksimalkan skrining PTM ke instansi pemerintah diwilayah kerja.
- Memaksimalkan kegiatan posbindu PTM dengan mendatangi suatu perkumpulan masyarakat (pengajian, arisan-arisan dasawisma),

- Melakukan advokasi ulang ke lintas sektor terkait, lintas program, dan jejaring di wilayah kerja puskesmas.
- g. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Permasalahan/kendala:

- Jumlah lansia yang berkunjung ke fasilitas kesehatan di Kota Palu masih rendah jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan orang lansia.
- Dukungan dan koordinasi lintas program dan lintas sektor masih belum optimal.
- Pengetahuan lansia terkait pemanfaatan Posyandu Lansia di masyarakat yang masih rendah, dikarenakan kurangnya sosialiasi/penyuluhan tentang pola hidup sehat sehingga berdampak pada rendahnya partisipasi lansia dalam memeriksakan kesehatan baik di Puskesmas maupun di Posbindu lansia.

#### Solusi:

- Puskesmas diharapkan mampu melakukan pengumpulan data sasaran lansia pada awal tahun.
- Peningkatan jumlah anggaran untuk kegiatan SPM.
- Tenaga kesehatan lebih intens dalam melakukan KIE serta pembinaan pada masyarakat lansia.
- h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Permasalahan/kendala:

- Masih banyak juga penderita hipertensi yang tidak rutin melakukan pengobatan dan setelah dirujuk dari posbindu PTM, penderita masih enggan untuk berobat lanjut ke FKTP (Puskesmas).
- Besaran anggaran yang belum optimal untuk pelaksanaan kegiatan program pelayanan kesehatan hipertensi.
- Masih kurangnya dukungan dan koordinasi lintas program dan lintas sektor.
- Pemahaman tentang definisi operasional antara penderita HT yang dilayani dengan HT terkendali yang masih kurang sehingga penegakan diagnose HT belum mencapai target

- Peningkatan sarana prasarana pendukung pemeriksaan sesuai standar
- Peningkatan jumlah anggaran untuk kegiatan SPM
- Penguatan koordinasi lintas program dan lintas sektor

- Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan khususnya terkait penanganan dan pemenuhan SPM Hipertensi
- i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)

## Permasalahan/kendala:

- Masih ada penderita DM yang tidak rutin melakukan pengobatan dan setelah dirujuk dari posbindu PTM, penderita masih enggan untuk berobat lanjut ke FKTP (Puskesmas)
- Masih kurangnya dukungan dan koordinasi lintas program dan lintas sektor
   Solusi:
- Meningkatkan sarana prasarana pendukung pemeriksaan sesuai standar
- Peningkatan jumlah anggaran untuk kegiatan SPM
- Penguatan koordinasi lintas program dan lintas sektor
- j. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat Permasalahan/kendala:
  - Penentuan perhitungan target penderita (0,21% dari jumlah penduduk) yang terlalu tinggi sehingga petugas mengalami kesulitan menjaring kasus di lapangan
  - Masih kurangnya SDM terlatih kesehatan jiwa di Puskesmas, dimana petugas kesehatan / dokter ahli yang menangani kejiwaan hanya tersedia di rumah sakit sehingga untuk pelayanan rujukan atau kontrol ke faskes tingkat lanjut sering terkendala karena pasien tidak mau dirujuk ke rumah sakit
  - Adanya stigma dan diskriminasi di masyarakat terhadap penderita ODGJ
  - Masih kurangnya penganggaran terhadap penanganan masalah kejiwaan
  - Pencatatan dan pelaporan dari fasilitas kesehatan tingkat lanjut belum terlaksana dengan baik sehingga untuk beberapa kasus yang dirujuk sering loss pencatatan

- Puskesmas diharapkan mampu melakukan pengumpulan data sasaran penderita ODGJ pada awal tahun
- Melaksanakan pelatihan tenaga kesehatan terpadu yang berkaitan dengan kesehatan jiwa

- Melakukan edukasi dan promosi kesehatan jiwa terhadap keluarga penderita
   ODGJ dan masyarakat
- Penguatan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait penanganan masalah ODGJ
- k. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

## Permasalahan/kendala:

- Masih kurangnya ketersediaan Katridge TCM (tes cepat molekuler) di Puskesmas
- Penanganan kasus TB belum maksimal dikarenakan validitas pencatatan dan pelaporan masih membutuhkan kajian formulasi yang sesuai standar
- Masih perlunya menambah tenaga konselor TB di Puskesmas untuk lebih mengintensifkan pemeriksaan, penanganan dan pendampingan pasien TB
- Masih perlunya menambah BMHP dan reagen Zn TB untuk mendukung keberhasilan pemeriksaan pasien terduga TB
- Pemahaman dan persepsi masyarakat terkait penanganan pasien TB termasuk pemantauan keteraturan minum obat bagi penderita TB masih kurang

- Meningkatkan sarana prasarana pendukung pemeriksaan TB sesuai standar
- Menambah jumlah tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensinya masingmasing
- Peningkatan jumlah anggaran untuk kegiatan SPM
- Penguatan koordinasi lintas program dan lintas sektor
- Melakukan edukasi dan promosi penanganan pasien B sesuai prosedur terhadap keluarga penderita dan Masyarakat.
- I. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Permasalahan:
  - Perhitungan target/sasaran yang terlalu tinggi sesuai dengan amanat peraturan menteri kesehatan nomor 6 tahun 2024 agak sulit untuk dipenuhi mengingat harus memenuhi standar mutu pelayanan 100%.
  - Sistem pengumpulan data untuk mengevaluasi kegiatan masih belum optimal dikarenakan ketepatan waktu pelaporan dari Puskesmas dan jejaringnya sering

terlewati, dan juga pemahaman atas definisi operasional dari masing-masing indikator masih kurang.

- Advokasi dan koordinasi lintas sektor baik level kelurahan dan kecamatan belum berjalan dengan baik.
- Sumber daya manusia kesehatan baik dari segi jumlah maupun kualitas masih belum cukup untuk memenuhi standar mutu pelayanan kesehatan.
- Masih kurangnya peran serta masyarakat khususnya kader kesehatan dalam mendukung pencapaian sasaran pelayanan kesehatan yang ingin dicapai
- Masih kurangnya pemenuhan BMHP untuk pelayanan Kesehatan sesuai standar Solusi:
- Melakukan pengkajian ulang mengenai penetapan perhitungan target/sasaran indikator SPM yang sesuai peraturan menteri kesehatan nomor 6 tahun 2024
- Lebih mengoptimalkan pengumpulan data laporan yang tepat waktu dari fasilitasi kesehatan primer dan meningkatkan pemahaman indikator bagi petugas kesehatan melalui kegiatan penguatan dan sosialisasi tentang juknis masing-masing indikator.
- Peningkatan pelaksanaan advokasi untuk peran serta dari lintas sektor baik level kelurahan dan kecamatan
- Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar serta pemerataan distribusi tenaga kesehatan sesuai standar
- Lebih meningkatkan peran aktif kader kesehatan yang melibatkan PKK serta lintas sektor melalui kegiatan refreshing kader
- Pengusulan pengadaan BHP melalui anggaran DAK maupun APBD.

## 4.3. Urusan Pekerjaan Umum

## 4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat. Adapun jenis pelayanan dasar pada urusan Pekerjaan Umum dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.14 Jenis Pelayanan dan Indikator SPM Urusan Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari- hari
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik

## 4.3.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target pencapaian SPM bidang urusan pekerjaan umum Tahun 2024 yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.15
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian Penerima Layanan Dasar	Target Capaian Mutu Layanan Minimal
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari- hari	400	100%
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	2.480	100%

Sumber data: Laporan SPM Dinas Pekerjaan Umum Kota PaluTahun 2024 (Data diolah)

## 4.3.3. Alokasi Anggaran

Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu pada Tahun Anggaran 2024 dialokasikan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu sebesar Rp. 250.984.949.586 atau sebesar 13,67 dari APBD Kota Palu Tahun Anggaran 2024, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.16 Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM

No	Uraian	Anggaran	Alokasi Anggaran Dengan APBD (%)
1	APBD Kota Palu	1.835.736.983.599	
2	Alokasi Anggaran Perangkat daerah	250.984.949.586	13,67
3	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dinas Pekerjaan Umum :	6.136.509.640	0,33
	a. APBD Murni	801.542.800	0,04
	b. APBD DAU	5.334.966.840	0,29

Sumber data: Laporan SPM Dinas Pekerjaan Umum Kota PaluTahun 2024

## 4.3.4. Dukungan Personil

Jumlah personil guna mendukung pencapaian SPM urusan Pekerjaan Umum adalah sebanyak 80 orang yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.17 Kondisi Pegawai ASN Menurut Golongan

No	Uraian	Jumlah
1	Golongan II	11 Orang
2	Golongan III	64 Orang
3	Golongan IV	5 Orang
	Jumla	h 80 Orang

Sumber data : Laporan SPM Dinas Pekerjaan Umum Kota PaluTahun 2024 (Data diolah)

Tabel 4.18 Kondisi Pegawai ASN Berdasarkan Jabatan

No	Uraian		Jumlah
1	Struktural :		
	- Eselon II		1 Orang
	- Eselon III		4 Orang
	- Eselon IV		3 Orang
2	Fungsional		7 Orang
4	Pelaksana		65 Orang
		Jumlah	80 Orang

Sumber data: Laporan SPM Dinas Pekerjaan Umum Kota PaluTahun 2024 (Data diolah)

## 4.3.5. Hasil Capaian

Realisasi pencapaian SPM pelayanan dasar urusan pekerjaan umum tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.19 Realisasi Capaian Penerima Layanan Dasar dan Capaian Mutu Layanan Minimal Layanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Realisasi Capaian Penerima Layanan Dasar		Realisasi Capaian Mutu Layanan	
		Target	Realisasi	%	Minimal (%)
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	440	400	100	100
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	2.480	2.480	100	100

Sumber data: Laporan SPM Dinas Pekerjaan Umum Kota PaluTahun 2024 (Data diolah)

Perhitungan pencapaian didasarkan pada 80% dari pencapaian penerima layanan dasar dan 20% dari pencapaian mutu minimal layanan dasar. Berdasarkan hal tersebut, maka capaian penerapan SPM urusan pekerjaan umum Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.20 Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian Penerima Capaian Mutu Layanan Dasar Layanan Minimal			Total Capaian	
	•	Realisasi	80%	Realisasi	20%	(%)
1	2	4	<i>5=4*80</i> %	6	7=6*20 %	<i>8=5+7</i>
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari- hari	100	80	100	20	100
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	100	80	100	20	100

# Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum 100%

Sumber data: Laporan SPM Dinas Pekerjaan Umum Kota PaluTahun 2024 (Data diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan pada capaian penerima layanan dasar dan capaian mutu layanan minimal maka, capaian SPM urusan Pekerjaan Umum telah mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100% atau dengan kriteria **TUNTAS UTAMA**.

#### 4.3.6. Permasalahan dan Solusi

Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan masih adanya kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Berikut ini permasalahan dan solusi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang pekerjaan Umum:

## a. Bidang Air minum

#### Permasalahan:

- Terdapat data dukung yang berbeda dari OPD pengampuh SPM
- PDAM Kota Belum terintegrasi dalam penanganan sistem perpipaan dan belum adanya Lembaga pengelola Air Minum /UPTD SPAM
- Masih adanya konflik kepentingan dalam pemanfaatan air baku terkait batas administratif wilayah Kota Palu

#### Solusi:

- Diperlukan satu OPD pengampuh untuk proses pendataan dalam Pemenuhan SPM
- Penggabungan PDAM Kota dan PDAM Donggala menjadi satu badan pengelola dalam penanganan Air Minum di Kota Palu
- Sosialisasi terhadap masyarakat dalam penggunaan Air yang tidak berlebihan, khususnya SPAM yang dikelola oleh masyarakat

## b. Pengelolaan Limbah Domestik

#### Permasalahan:

- Kesadaran masih rendah terhadapap pemahaman pentingnya sarana sanitasi yang aman dan layak sehingga sistem pengelolaan penyedotan lumpur tinja belum maksimal
- Antara Kegiatan Pembangunan Sanitasi layak dan Pelayanan Pengolahan Air
   Limbah Domestik terpisah dikarenakan ada dua Organisasi Perangkat Daerah

sebagai pengampuh untuk Pemenuhan Pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik

#### Solusi:

- Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya hidup sehat dan bersih terkait sarana sanitasi yang aman dan layak juga terkait penyedotan Lumpur Tinja yang dilakukan minimal 3 (tiga) tahun sekali baik secara langsung, iklan selebaran dan sosial media
- Program prioritas terhadap wilayah kawasan kumuh dalam pemenuhan sanitasi,
   khususnya sarana septic tank komunal atau individu
- Melakukan kolaborasi antar OPD dengan Meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam penerapan pemenuhan SPM

## 4.4. Urusan Perumahan Rakyat

## 4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif di bidang perumahan rakyat yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat. Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten/Kota mencakup 2 (dua) jenis pelayanan dasar, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.21 Jenis Pelayanan dan Indikator Urusan Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni

## 4.4.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target pencapaian SPM urusan perumahan rakyat Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.22 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian Penerima Layanan Dasar	Target Capaian Mutu Layanan Minimal (%)
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0	100

Sumber data : Laporan SPM Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2024 (data diolah)

## 4.4.3. Alokasi Anggaran

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu pada Tahun Anggaran 2024 dialokasikan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu sebesar Rp. 75.801.629.868,- yang diperuntukkan untuk belanja operasi sebesar Rp. 34.981.474.666,- dan belanja modal sebesar Rp. 40.820.155.202,-.

Tabel 4.23 Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM

No	Uraian	Anggaran	Alokasi Anggaran Dengan APBD (%)
1	APBD Kota Palu	1.835.736.983.599	
2	Alokasi Anggaran Perangkat daerah	75.801.629.868	4,13
3	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	-

Sumber data : Laporan SPM Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota PaluTahun 2024 (data diolah)

## 4.4.4. Dukungan Personil

Jumlah seluruh pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu, sebanyak 37 orang.dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.24 Kondisi Pegawai Menurut Golongan

No	Uraian	Jumlah
1	Golongan I	1 Orang
2	Golongan II	5 Orang
3	Golongan III	23 Orang
4	Golongan IV	6 Orang
5	PPPK	2 Orang
	j	umlah 37 Orang

Sumber data : Laporan SPM Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota PaluTahun 2024 (Data diolah)

Tabel 4.25 Kondisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Uraian		Jumlah
1	Struktural :		
	- Eselon II		1 Orang
	- Eselon III		3 Orang
	- Eselon IV		4 Orang
2	Fungsional		5 Orang
3	Pelaksana		24 Orang
		Jumlah	37 Orang

Sumber data : Laporan SPM Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota PaluTahun 2024 (Data diolah)

## 4.4.5. Hasil Capaian

Berdasarkan hasil pelaksanaan SPM bidang urusan perumahan rakyat maka diperoleh hasil pencapaian sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.26 Realisasi Capaian Penerima Layanan Dasar dan Capaian Mutu Layanan Minimal Layanan Dasar

		Rea Penerir	Realisasi Capaian Mutu		
No	Jenis Pelayanan Dasar	Target	Realisasi	%	Layanan Minimal (%)
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	0	0	100	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	0	0	100	100

Sumber data: Laporan SPM Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kota Palu Tahun 2024 (data diolah)

Berdasarkan tabel, memperlihatkan bahwa tidak adanya realisasi dalam pencapaian penerima layanan dasar. Hal ini disebabkan karena tidak adanya bencana yang terjadi di Kota Palu sehingga tidak ditargetkan untuk rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana. Demikian pula halnya dengan program penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi. Dengan tidak adanya kedua jenis pelayanan tersebut baik target maupun realisasi maka dianggap pencapaiannya 100%.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat, terdapat ketentuan untuk melaksanakan jenis pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana memiliki ketentuan sebagai berikut:

- 1. Pada saat masa pasca bencana;
- 2. Surat Penetapan bencana dari Bupati/Walikota; dan/atau
- 3. Dampak bencana didaerah administrasi kabupaten Kota

Sedangkan jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah dapat dilakukan apabila ada surat penetapan Bupati/Walikota bahwa daerah tersebut tidak layak untuk perumahan.

Dengan adanya ketentuan tersebut, dalam melaksanakan jenis pelayanan dasar bidang perumahan rakyat maka pada realisasi pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kota Palu tahun 2024 belum dilaksanakan

Selanjutnya untuk perhitungan capaian SPM urusan perumahan rakyat dihitung melalui perhitungan pencapaian didasarkan pada 80% dari pencapaian penerima layanan dasar dan 20% dari pencapaian mutu minimal layanan dasar. Berdasarkan hal tersebut, maka capaian penerapan SPM urusan perumahan rakyat Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.27 Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan	Realisasi Capaian Penerima Layanan Dasar		Realisasi Capaian Mutu Layanan Minimal		Total Capaian
	Dasar	Realisasi	80%	Realisasi	20%	(%)
1	2	<i>3</i>	4=3*80%	<i>5</i>	<i>6=5*20%</i>	7=4+5
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100	80	100	20	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	100	80	100	20	100

# Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat 100%

Sumber data: Laporan SPM Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (data diolah)

### 4.4.6. Permasalahan dan Solusi

#### Pernasalahan:

- Belum tersedianya anggaran dalam pemenuhan data dalam hal pemenuhan layanan SPM Bidang Perumahan Rakyat.
- Penyelenggaraan rehabilitasi rumah bagi korban bencana yang menjadi layanan dasar SPM bidang perumahan Rakyat harus memenuhi ketentuan bahwa bencana yang terjadi merupakan bencana yang ditetapkan oleh kepala daerah, dan dalam hal penetapan bencana untuk ditetapkan oleh kepala daerah merupakan bencana yang skala menengah tinggi. Oleh karena itu anggaran layanan dasar untuk rehabilitasi rumah bagi korban bencana belum dapat dilaksanakan.
- Layanan dasar Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Daerah memerlukan perencanaan daerah jangka panjang yang dituangkan dalam RPJMD Kota Palu, sehingga dalam hal pemenuhan nya memerlukan singkronisasi program terlebih dahulu agar dapat dilaksanakan.

#### Solusi:

- Pemenuhan Data Dasar pemenuhan Layanan SPM perlu adanya kerja sama antara Organisasi Perangkat Daerah Terkait dengan Pihak kelurahan sekota Palu ataupunn Pihak lainnya agar dapat data dasar yang lebih efektif dan efisien dalam penganggaran.
- Apabila terdapat rencana Penyelenggaran relokasi di Kota Palu sebaiknya ditetapkan terlebih dahulu oleh kepala daerah agar pemenuhan layanan SPM nya dapat dilaksanakan

# 4.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar SPM urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yaitu pelayanan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan oleg 3 (tiga) Perangkat daerah yaitu: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kota Palu dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu. Adapun jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.28 Jenis Pelayanan dan Indikator Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	' Indikator	
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

## 4.5.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Pada tahun 2024, target pencapaian standar pelayanan minimal urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang telah ditetapkan adalah 100% dengan rincian target sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.29
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban
Umum Dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian Penerima Layanan Dasar	Target Capaian Mutu Layanan Minimal (%)	Perangkat Daerah
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota	4.000	100	Satuan Polisi Pamong Praja

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian Penerima Layanan Dasar	Target Capaian Mutu Layanan Minimal (%)	Perangkat Daerah
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	2.400	100	
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	2.300	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	50	100	-
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	1.752	100	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Sumber data: 1. Laporan SPM Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu Tahun 2024 (data diolah)

- 2. Laporan SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu Tahun 2024 (data diolah)
- 3. Laporan SPM Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelematan Kota Palu Tahun 2024 (data diolah)

# 4.5.3. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu pada Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.30 Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM

No	Uraian	Anggaran	Alokasi Anggaran Dengan APBD (%)
1	APBD Kota Palu	1.835.736.983.599	
2	Alokasi Anggaran Perangkat daerah a. Satuan Polisi Pamong Praja		
	b. Badan Penanggulangan Bencana	28.855.957.924	1,57
	Daerah	6.123.815.916	0,33
	c. Dinas Pemadam Kebakaran dan		
	Penyelamatan	11.238.431.247	0,61

No	Uraian	Anggaran	Alokasi Anggaran Dengan APBD (%)
3	Alokasi Anggaran Penerapan SPM:		
	a. Satuan Polisi Pamong Praja	1.996.500.000	0,11
	<ul><li>b. Badan Penanggulangan Bencana</li><li>Daerah</li></ul>	475.475.700	0,03
	c. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	662.792.700	0,04

Sumber data: 1. Laporan SPM Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu Tahun 2024 (data diolah)

- 2. Laporan SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu Tahun 2024 (data diolah)
- 3. Laporan SPM Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelematan Kota Palu Tahun 2024 (data diolah)

# 4.5.4. Dukungan Personil

Jumlah personil guna mendukung pencapaian SPM urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah sebanyak 765 orang yang terdiri dari :

Tabel 4.31 Kondisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Uraian	Satuan Polisi Pamong Praja	Badan Penanggulangan Bencana	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	PNS	53	29	42
2	PPPK	-	-	30
3	PHL	358	30	123
4	LINMAS	100	-	
	JUMLAH	511	59	195

Sumber data: 1. Laporan SPM Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu Tahun 2024 (data diolah)

- 2. Laporan SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu Tahun 2024 (data diolah)
- 3. Laporan SPM Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelematan Kota Palu Tahun 2024 (data diolah)

Tabel 4.32 Kondisi Pegawai (ASN) Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Satuan Polisi Pamong Praja	Badan Penanggulangan Bencana	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	Golongan I	-	-	-
2	Golongan II	24	8	9
3	Golongan III	26	17	27

4	Golongan IV	6	4	6
5	PPPK	-		30
	JUMLAH	56	32	72

- Sumber data: 1. Laporan SPM Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu Tahun 2024 (data diolah)
  - 2. Laporan SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu Tahun 2024 (data
  - 3. Laporan SPM Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelematan Kota Palu Tahun 2024 (data diolah)

# 4.5.5. Hasil Capaian

Realisasi pencapaian SPM pelayanan dasar urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Tahun 2024 pada komponen penerima layanan dasar dan mutu layanan minimal dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.33** Realisasi Capaian Penerima Layanan Dasar dan Capaian Mutu Layanan Minimal Layanan Dasar

No	Jenis Pelavanan Capaian P		Target ian Penerim anan Dasar	enerima Cap Dasar Mu		Perangkat Daerah
	Dusui	Target	Realisasi	%	Layanan Minimal (%)	Ducium
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	4.000	4.000	100	94,76	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Pelayanan informasi rawan bencana	2.400	2.400	100	100	
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	2.300	2.300	100	100	Badan Penanggulang an Bencana
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	50	50	100	100	Daerah
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	1.752	1.752	100	100	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

- Sumber data: 1. Laporan SPM Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu Tahun 2024 (data diolah)
  - 2. Laporan SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu Tahun 2024 (data diolah)
  - Laporan SPM Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelematan Kota Palu Tahun 2024 (data diolah)

Selanjutnya untuk perhitungan pencapaian SPM urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat didasarkan pada perhitungan 80% dari pencapaian penerima layanan dasar dan 20% dari pencapaian mutu minimal layanan dasar. Berdasarkan hal tersebut, maka capaian penerapan SPM urusan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.34 Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Capai Peneri Layanan (%)	ma Dasar	Capaian Layanan M (%)	linimal	Total Capaian – (%)	Perangkat Daerah
		Realisasi	80%	Realisasi	20%	,	
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	100	80	100	20	100	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Pelayanan informasi rawan bencana	100	80	100	20	100	Badan Penanggulang
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	80	100	20	100	an Bencana Daerah
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	80	100	20	100	
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	80	100	20	100	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

# Capaian SPM Urusan Trantibumlinmas 99,65%

Sumber data: 1. Laporan SPM Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu Tahun 2024 (data diolah)

- 2. Laporan SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu Tahun 2024 (data diolah)
- 3. Laporan SPM Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelematan Kota Palu Tahun 2024 (data diolah)

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa penerapan SPM urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu adalah sebesar 99,65% atau dalam kriteria **TUNTAS UTAMA**. Hal ini menandakan bahwa penerapan SPM belum bidangg urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat mencapai target yang ditetapkan yaitu dengan capaian **100%**.

#### 4.5.6. Permasalahan dan Solusi

a. Satuan Polisi Pamong Praja

#### Permasalahan

- Masih belum mencukupinya sarana dan prasarana Polisi Pamong Praja.
- Masih banyaknya anggota Satpol PP yang belum mengikuti
- Diklatsar dan kegiatan pelatihan lainnya
- Masih kurangnya pemahaman dan kepatuhan masyarakat
- terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
- Masih banyaknya gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

#### Solusi:

- Diperlukan penambahan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan
- Diperlukan Diklatsar dan pelatihan peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan Satlinmas yang belum mengikuti pelatihan
- Diperlukan Sosialisasi dan Penyuluhan Perda dan Perkada terhadap masyarakat agar masyarakat paham serta mematuhi Perda dan Perkada yang berlaku; dan
- Melakukan pemantauan gangguan Trantibum dengan dinas terkait di jalan, tempat hiburan, pemukiman penduduk dan ruang umum.
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

#### Permasalahan:

- Belum Terintegrasinya Pengurangan Risiko Bencana dalam
- Belum optimalnya pemetaan potensi kawasan rawan bencana berdasarkan cakupan wilayah dan jenis bencana
- Sarana dan Prasarana yang dimiliki kurang memadai dalam pelayanan evakuasi
- Kemampuan Personil dalam kualitas dan kualitatif masih kurang masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) baik secara kuantitas maupun yang berkualitas khususnya dalam hal kebencanaan dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan oleh BPBD

#### Solusi:

- Adanya ketersediaan kajian risiko bencana dan peta risiko bencana sampai tingkat Kecamatan
- Perlu peningkatan dalam optimalnya pemetaan potensi kawasan rawan bencana berdasarkan cakupan wilayah dan jenis bencana

- Perlu peningkatan dalam Sarana dan Prasarana
- Perlu peningkatan dalam Kemampuan Personil baik kualitas maupun kualitatif
- Penambahan jumlah personil PNS sesuai dengan kebutuhan organisasi dan peningkatan kualitas SDM yang sudah ada dilakukan melalui Diklat Struktural maupun diklat fungsional/bintek
- c. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

#### Permasalahan:

- Belum memadainya sarana dan prasarana yang didasarkan luas wilayah, kepadatan dan tingkat kesulitan Lokasi.
- Keterbatasan anggaran yang tersedia sehingga sulit untuk diwujudkan pemenuhan Sarana dan Prasarananya.
- Pelaksanaan penerapan SPM belum sesuai ketentuan sebagaimana yang diharapkan Permendagri No. 114 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

#### Solusi:

- Kegiatan Pencegahan melalui edukasi (Edu-Damkar) berupa: Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) dan pelatihan di luar kantor bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Palu, Damkar Goes To School dan Edukasi Damkar secara Digital (Dadu Digital) yang secara khusus akan memenuhi kebutuhan Manajemen Proteksi Kebakaran Kota dalam lingkup Sumber Daya Manusia aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan serta Masyarakat Kota Palu.
- Kegiatan Kolaborasi Kerja penanganan bencana Kebakaran, non kebakaran dan bencana lainnya, dimana bentuk inovasi ini merupakan tindak lanjut dari 53 program daerah yaitu pembentukan Satgas Cepat Tanggap (Quick respons) dimana didalamnya terdapat kolaborasi kerja dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta unit kerja lainnya baik itu instansi pemerintah daerah provinsi maupun instansi pusat.
- Menyusun Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kota dan menyusun Tata Laksana Operasional Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu.

- Memproritaskan Anggaran untuk Program dan kegiatan yang Terkait dengan bidang SPM dalam penyusunan Rencana Kerja pada Tahun selanjutnya.
- Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK)
- Melaksanakan Pelatihan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Rescue);
- Peningkatan sarana prasarana pendukung pos pelayanan kebakaran termasuk sumber air, bak penampungan air, mobil pemadam kapasitas 3000-5000 Liter serta peralatan dan perlengkapan penunjang lainnya.
- Sosialisasi dan bimbingan teknis dimasyarakat tentang proteksi dan penanggulangan kebakaran serta penanaman jiwa proteksi kebakaran pada anak usia dini. Diharapkan dengan adanya edukasi pada anak usia dini dapat menambah pengetahuan anak-anak tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- Optimalisasi proteksi Kebakaran.

#### 4.6. Urusan Sosial

# 4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Penerapan SPM urusan sosial didasarkan pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa jenis pelayanan dasar bidang sosial adalah sebagai berikut:

Tabel 4.35
Jenis Pelayanan dan Indikator Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota

# 4.6.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Pada tahun 2024, target pencapaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan yang telah ditetapkan dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.36
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian Penerima Layanan Dasar	Target Capaian Mutu Layanan Minimal (%)
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	90	100
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	6	100
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	20	100
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	32	100
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	75	100

Sumber: Laporan SPM Dinas Sosial Kota Palu Tahun 2024 (data diolah)

## 4.6.3. Alokasi Anggaran

Dinas Sosial Kota Palu pada Tahun Anggaran 2024 dialokasikan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu sebesar Rp. 22.093.143.850,- yang diperuntukkan untuk belanja operasi sebesar Rp. 21.916.103.850,- dan belanja modal sebesar Rp. 177.040.000,-.

Tabel 4.37 Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Urusan Sosial

No	Uraian	Anggaran	Alokasi Anggaran Dengan APBD (%)
1	APBD Kota Palu	1.835.736.983.599	
2	Alokasi Anggaran Perangkat daerah	22.093.143.850	1,20
3	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dinas Sosial :	1.543.644.060	0,88
	- APBD Murni	1.543.644.060	0,88

Sumber: Laporan SPM Dinas Sosial Kota Palu Tahun 2024 (data diolah)

# 4.6.4. Dukungan Personil

Jumlah seluruh pegawai Dinas Sosial Kota Palu, sebanyak 43 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.38 Kondisi Pegawai Menurut Golongan

No	Uraian	Jumlah
1	Golongan I	-
2	Golongan II	4
3	Golongan III	25
4	Golongan IV	6
5	PPPK	8
	Jumlah	43

Sumber data: Laporan SPM Dinas Sosial Kota Palu Tahun 2024 (Data diolah)

## 4.6.5. Hasil Capaian

Realisasi pencapaian SPM pelayanan dasar urusan sosial Tahun 2024 pada komponen penerima layanan dan mutu layanan minimal dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.39 Realisasi Capaian Penerima Layanan Dasar dan Capaian Mutu Layanan Minimal Layanan Dasar

		Capaian Penerima Layanan Dasar			Realisasi Capaian	
No	Jenis Pelayanan Dasar	Target	Realisasi	%	Mutu Layanan Minimal (%)	
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	90	90	100	100	
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	6	6	100	100	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	20	20	100	100	
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	32	32	100	100	
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	75	1.614	100	100	

Sumber: Laporan SPM Dinas Sosial Kota Palu, 2024 (data diolah)

Pada tabel tersebut terlihat bahwa dari 5 (lima) jenis pelayanan dasar menunjukkan capaian sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Selanjutnya untuk perhitungan capaian SPM urusan sosial didasarkan pada rata-rata jumlah total dari 80% dari pencapaian penerima layanan dasar dan 20% dari pencapaian mutu minimal layanan dasar. Berdasarkan hal tersebut, maka capaian penerapan SPM urusan sosial Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.40 Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian Penerima Layanan Dasar (%)		Capaian Mutu Layanan Minimal (%)		Total Capaian (%)	
		Realisasi	%	Realisasi	%		
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100	80	100	20	100	
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	100	80	100	20	100	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	100	80	100	20	100	
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	100	80	100	20	100	
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100	80	100	20	100	

# Capaian SPM Urusan Sosial 100%

Sumber: Laporan SPM Dinas Sosial Kota Palu, 2024 (data diolah)

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa penerapan SPM urusan sosial belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu dengan capaian **100%** atau dengan kriteria **TUNTAS PARIPURNA**.

#### 4.6.6. Permasalahan dan Solusi

#### Permasalahan

- Dalam pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi Sosial masih kurangnya berjalan, keluarga tidak mau menerima PPKS selesai penanganan, pemulangan PPKS terlantar yang tidak memiliki keluarga, dan kurangnya tempat penampungan PPKS terlantar/darurat.
- Bahwa berdasarkan beberapa kasus yang sering terjadi dan kami respon dilapangan terutama masalah rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas terlantar diluar panti dan lansia terlantar diluar panti, banyak klien yang kami

temukan dilapangan tidak memiliki identitas sehingga kami memutuskan untuk merujuk ke Dinas Sosial Provinsi dan Balai Kementrian Sosial (Centra)wilayah Sulawesi Tengah tetapi ditengah perjalanan kami menemui kendala Klien Kami Tidak Diterima dengan alasan mereka (Klien yang kami rujuk)adalah PPKS yang tidak mandiri (mampu mengurus diri sendiri), kami sendiri dari Dinas Sosial Kota Palu juga memilik SOP tersendiri dalamn hal menampung PPKS terlantar yaitu selama 7 hari, yang kami bingung dan risaukan setelah 7 PPKS tersebut harus kemana, sementara di sisi lain lembaga yang menjadi rujukan kami menolak dengan alasannya sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sudah jelas menyebutkan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Maka dari itu, kami mohon bantuan dari bapak dan ibu untuk membantu masalah kami dalam hal intervensi anggaran kami dinaikkan dan intervensi ke Provinsi dan Kementerian Sosial yang menjadi pembina kami agar klien terlantar yang kami antarkan dapat diterima.

#### Solusi:

- Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan program pelayanan rehabilitasi social.
- Respon kasus/Penjangkauan Awal Asesmen, Manajemen, kasus, Intervensi,
   Rujukan, Monitoring/Evaluasi, Terminasi.
- Perlunya percepatan sistim pemuktahiran Data terpadu Ksejahteraan Sosial.
- Perlunya partisipasi Potensi Sumber dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- Perlunya keinginan kuat dari berbagai pihak/stake holder dalam penanganan PSKS.

# BAB V PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Palu Tahun 2024 merupakan laporan tahunan yang disusun sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal tersebut menyatakan bahwa Kepala Daerah harus menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan ini diatur secara teknis oleh Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 yang mencakup penyelenggaraan urusan konkuren, urusan tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan. Dari pelaksanaan urusan tersebut, dapat dilihat hasil capaian program dan kegiatan serta permasalahan dan pemecahan masalahnya. Permasalahan yang dihadapi dan hal-hal yang tidak tercapai dalam pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran 2024 menjadi masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan tahun selanjutnya. Selain LPPD ini, masukan dari masyarakat dalam memberikan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan, juga menjadi bahan pertimbangan sekaligus memberikan arti tersendiri dalam penyelenggaraan kepemerintahan yang baik. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Palu Tahun 2024 disampaikan oleh Pemerintah Kota Palu kepada Gubernur Sulawesi Tengah dan secara akuntabilitas disajikan dalam dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Palu Tahun 2024.

Pada Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah Kota Palu berhasil mencapai sejumlah prestasi yang patut diapresiasi. Semua pihak, baik itu dari kalangan eksekutif, legislatif, maupun masyarakat turut andil dalam memperoleh pencapaian tersebut. Melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terlihat jelas adanya komitmen yang kuat dari seluruh elemen Pemerintahan Daerah dalam mewujudkan kinerja yang optimal di masa depan. Meski demikian, masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki guna memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah Kota Palu. Dalam hal ini, LPPD dapat menjadi panduan bagi Pemerintah Kota Palu dalam mengevaluasi kinerja yang telah dicapai dan melakukan perbaikan untuk mencapai tujuan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Demikian penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Palu Tahun 2024 ini, diiringi harapan semoga di tahun-tahun mendatang, keberhasilan senantiasa mengiringi segala upaya dan perjuangan kita demi kemajuan Pemerintah Kota Palu. Semoga Allah SWT memberkati kita semua.

# LAMPIRAN





#### KATA PENGANTAR

Bismillahirahmanirohim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palu Tahun 2024 dapat diselesaikan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Palu pada hakikatnya merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Palu dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintah Kota Palu terus berupaya meningkatkan kinerja yang lebih baik sehingga di masa mendatang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih optimal dan mencapai seluruh target kinerja yang telah ditetapkan.

Semoga Laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan untuk melakukan evaluasi kinerja Pemerintah Kota Palu, sehingga mampu mencapai tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan serta untuk mendukung terwujudnya good government di lingkungan Pemerintah Kota Palu.

Demikian laporan ini kami susun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palu, Maret 2025 WALI KOTA PALU

H. HADIANTO RASYID, S.E.

# DAFTAR ISI

KATA	PENGANTARi
DAFT	AR ISIii
DAFT	`AR TABELiv
DAFT	`AR GAMBARvi
IKHT:	ISAR EKSEKUTIFviii
BAB	I PENDAHULUAN
1.1	Gambaran Umum Kota Palu1
1.2	Pembangunan Manusia Kota Palu3
1.3	Perekonomian Kota Palu4
1.4	Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kota Palu5
1.5	Isu Strategis Pemerintah Kota Palu6
BAB	II PERENCANAAN KINERJA
2.1	Visi Dan Misi7
2.2	Indikator Kinerja Utama13
2.3	Perjanjian Kinerja16
BAB	III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 202419
3.2.	Capaian Kinerja Pemerintah Kota Palu19
1.	Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 202419
3.3	Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta
	Capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023
	dan beberapa tahun terakhir21
3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan
	tahun ini dengan target RPJMD (2021-2026)23
3.5.	Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2024
	dengan Standar Nasional24
3.6	Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan
	atau peningkatan penurunan kinerja serta
	alternative solusi yang telah dilakukan26
3.7	Analisis Efesiensi Penggunaan Sumber Daya49

3.8 R	Realisasi Anggaran	72
	1.Pendapatan	72
:	2. Belanja Daerah	73
;	3. Pembiayaan	74
3.3 In	novasi Pemerintah Kota Palu	75
BAB I	V PENUTUP	
LAMP	PIRAN	
	1. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Palu 2024	79
:	2. Lampiran Perjanjian Kinerja 2024	80
;	3. Program dan Anggaran Sasaran IKU 2024	81
	4. SK Indikator Kinerja Utama	82
	5. Lampiran Indikator Kinerja Utama	86
	6. Piagam Penghargaan	90

# DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Visi, Misi, Tujuan dan Visi, dan Sasaran Daerah
	2021- 202612
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama13
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Pemerintah
	Kota Palu Tahun 202417
Tabel 2.4	Realisasi Program dan Anggaran
Tabel 3.1	Perbandingan Target dan Realisasi
	Indikator Kinerja Utama
	Berdasarkan RPJMD 2021-202619
Tabel 3.2	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja
	Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan
	Tahun 2023 Dan Beberpa Tahun Terakhir21
Tabel 3.3	Perbandingan Target dan Realisasi
	Kinerja Dalam RPJMD (2021 – 2026)23
Tabel 3.4	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024
	dengan standar nasional24
Tabel 3.5	Capaian Sasaran Meningkatnya
	Pertumbuhan dan Daya Saing Sektor Ekonomi27
Tabel 3.6	Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Pengelolaan
	Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Bencana32
Tabel 3.7	Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya
	Keamanan dan Ketertiban Lingkungan32
Tabel 3.8	Capaian Sasaran Meningkatnya
	Infrastruktur yang berketahanan34
Tabel 3.9	Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas SDM35
Tabel 3.1	<b>0</b> Capajan Sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan37

<b>Tabel 3.11</b>	Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya
	Pengembangan karakter berdasarkan nilai38
	keagamaan, kearifan lokal, dan kebangsaan
Tabel 3.12	Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya
	Tata Kelola Pemerintahan39
Tabel 3.13	Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi39
Tabel 3.14	Perbandingan Target dan realisasi Penggunaan Sumber Daya Tahun 202449
Tabel 3.15	Efisiensi Anggaran Pencapaian Target Sasaran Strategis Tahun 202451
Tabel 3.16	Program dan Realisasi Anggaran Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 202453
<b>Tabel 3.17</b>	Realisasi Pendapatan Daerah Kota Palu Tahun 202473
Tabel 3.18	Komposisi Belanja Pemerintah Kota Palu
	Tahun Anggaran 202473
<b>Tabel 3.19</b>	Pembiayaan Pemerintah Kota Palu Tahun
	Anggaran 202474
Tabel 3.20	Rekapitulasi Penerapan
	Kebijakan Inovasi Daerah yang
	Dilaporkan Tahun 2024 75

# **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 F	Peta Administrasi Wilayah Kota Palu1	
Gambar 1.2 J	Jumlah Penduduk Kota Palu2	
Gambar 1.3 I	ndeks Pembangunan Manusia	
K	Kota Palu Tahun 20244	
Gambar 1.4 L	Laju Pertumbuhan Ekonomi	
K	Kota Palu Tahun 20244	
Gambar 2.1 V	Visi dan Misi Pemerintah	
K	Kota Palu Tahun 2021-20267	
Gambar 2.2 H	Hubungan Visi, Misi, dan Agenda	
P	Pembangunan Kota Palu Tahun 2021-20268	
Gambar 2.3 A	Agenda Pembangunan Kota Palu	
Т	Sahun 2021-20269	
Gambar 2.4 F	Pembangunan Jangka Menegah Daerah	
Т	Tahun 2021-202410	Э
Gambar 2.5 F	Peta Proses Bisnis Kota Palu Tahun 2021-20261	1
Gambar 3.1 L	Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 20242'	7
Gambar 3.2 F	Penguatan kapasitas oleh OPD28	3
Gambar 3.3 F	Penertiban oleh Polisi Pamong praja28	3
Gambar 3.4 L	Lembaga Adat di Kota Palu30	Э
Gambar 3.5 I	ndeks Pembangunan Manusia30	5
Gambar 3.6 F	Realisasi Indikator Angka Kemiskinan3°	7
Gambar 3.7 F	Pelaksanaan <i>coaching</i> OPD dalam merumuskan	
tı	ujuan & sasaran strategis4	1
Gambar 3.8	Cascading Badan Perencanaan	
P	Pembangunan Daerah4	1
Gambar 3.9 F	Pemetaan program menjadi target kinerja OPD42	2
Gambar 3.10	IKU Dinas Pariwisata Sebelum	
	& Setelah Perubahan43	3
Gambar 3.11	IKU Dinas Kominfo Sebelum & Setelah Perubahan43	3
Gambar 3.12	Aplikasi e-SAKIP, Grafik Kinerja dan Realisasi	
	Anggaran Pemerintah Kota Palu44	4



Gambar 3.13	pendampingan penyusunan	
	laporan kinerja Perangkat Daerah sesuai	
	Permenpan 53 Tahun 2014	44
Gambar 3.14	Perbaikan Perencanaan Kinerja Dan	
	Penetapan Target Kinerja Tahun Berikutnya	45
Gambar 3.15	Melaksanakan Perbaikan Sesuai Rekomendasi	
	Hasil Evaluasi Akip Internal	46
Gambar 3.16	Penguatan tim evaluator internal	46
Gambar 3.17	Perwali TTP	47
Gambar 3.18	DPA Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas	
	Evaluator dan DPA koordinasi dan	
	penyusunan LAKIP	48



#### RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Palu merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026. Penyusunan LAKIP Tahun 2024 sebagai upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama Tahun 2024. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 merupakan kinerja Tahun 2024 atau tahun keempat dalam pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 (RPJMD). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disamping menyajikan faktorfaktor keberhasilan, juga memaparkan faktor-faktor yang menjadi kendala dan hambatan pencapaian indikator kinerja pemerintah Kota Palu.

Pencapaian target kinerja pemerintah menggambarkan keberhasilan seluruh perangkat daerah Kota Palu, dukungan dunia usaha serta partisipasi masyarakat. Secara umum pencapaian sasaran strategis melalui indikator sasaran menunjukkan keberhasilan dalam pencapaian visi dan misi pemerintah. sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026. Nilai capaian dari delapan sasaran dan dua belas indikator secara ringkas diuraikan sebagai berikut :

- ❖ Sasaran 1 : Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing sektor ekonomi potensial daerah dengan indikatornya laju pertumbuhan ekonomi 2024 terealisasi 4,61 dengan capaian kinerja 109,76%.
- ❖ Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan hidup dan kesiap siagaan bencana indikatornya : Indeks risiko bencana dan indeks kualitas lingkungan hidup dengan realisasi rata rata 102,78 dan capaian kinerja 107,65%.
- Sasaran 3: Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan, Indikatornya Indek Kewaspadaan nasional dengan realisasi 75,09 capaian 124,43%.
- ❖ Sasaran 4 : Meningkatkan infrastruktur yang berketahanan dengan Indikator persentase jalan berkeselamatan, persentase luas kawasan kumuh, dan persentase rumah tidak layak huni dengan realisasi 2,17 dan capaian 139,53%.

- ❖ Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas SDM indikatornya Indeks pembangunan manusia realisasi 84,12 capaian kinerja 102,46%.
- ❖ Sasaran 6 : Menurunnya angka kemiskinan, Indikatornya Angka kemiskinan dengan realisasi 5,94 dan capaian 74,95%.
- ❖ Sasaran 7 : Meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan kearifan lokal dan kebangsaan indiktor indeks aktualisasi pancasila dengan realisasi 83,2 capaian 118,86%.
- ❖ Sasaran 8: Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, indikatornya Indeks reformasi birokrasi dan opini BPK. Pemerintah Kota Palu berhasil merealisasikan indeks reformasi birokrasi sebesar 74,03 dengan capaian 86,08% serta berupaya untuk memperbaiki pelaksanaan kinerja melalui penerapan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan secara tertib perencanaan, tertib anggaran, tertib pelaksanaan dan tertib administrasi yang dijadikan strategi Pemerintah Kota Palu untuk meraih kembali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI secara berturut-turut sejak Tahun 2014.

Pencapaian opini laporan keuangan Pemerintah Kota Palu yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), maka diharapkan kinerja yang dihasilkan dapat memberi manfaat yang lebih besar kepada masyarakat maupun berbagai pihak yang berkepentingan. Hal ini dilakukan dengan orientasi pada peningkatan pelayanan, pengembangan dan Pembangunan sarana dan prasarana serta peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang dimiliki dalam segala bidang guna menyiapkan kepuasan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut akan dicapai dengan menciptakan aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang efektif dan efisien, meningkatkan pendapatan daerah dengan berinovasi dan memanfaatkan teknologi informasi berkelanjutan, melanjutkan pembangunan sarana dan prasarana yang telah ada, meningkatkan kerjasama antara pemerintah, mitra kerja dan masyarakat, meningkatkan kinerja aparatur, menyusun perencanaan yang mampu menjawab permasalahan serta mengantisipasi peluang dan tantangan di masa mendatang.



#### BAB I

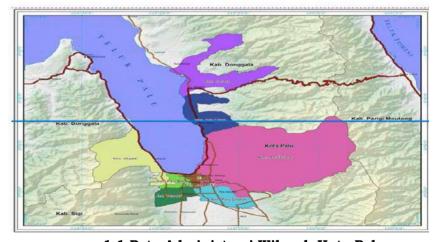
#### **PENDAHULUAN**

#### 1.1 GAMBARAN UMUM KOTA PALU

Kota Palu merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas wilayah 395,06 km2 berada pada kawasan dataran lembah Palu dan teluk Palu. Secara administratif, Kota Palu berbatasan sebelah utara dengan dengan Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, sebelah selatan dengan Kecamatan Marawola dan Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi. Sementara sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kinovaro dan Kecamatan Marawola Barat Kabupaten Sigi, dan Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, dan Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala.

Wilayah Kota Palu terbagi atas 8 (delapan) kecamatan dan 46 (empat puluh enam) kelurahan, 289 Rukun Warga, dan 1.030 Rukun Tetangga. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Mantikulore yaitu seluas 206,80 km2 (52,35%) dan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Palu Timur yaitu seluas 7,71 km2 atau hanya 1,95% dari luas wilayah Kota Palu. Sebagian besar kelurahan berada pada dataran Lembah Palu yaitu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kelurahan, sementara 17 (tujuhbelas) kelurahan lainnya berada di sepanjang pantai Teluk Palu.

Letak wilayah Kota Palu menurut kecamatan tergambar pada peta Kota Palu sebagaimana Gambar 1.1 sebagai berikut :



1.1 Peta Administrasi Wilayah Kota Palu

Jumlah penduduk Kota Palu Tahun 2024 sebesar 389.959 (Disdukcapil Kota Palu, 2024), dengan kepadatan penduduk sebesar 981 per km². Adapun penduduk laki-laki berjumlah 195.416 jiwa dan jumlah penduduk perempuan berjumlah 194.543 jiwa. Kota Palu memiliki struktur usia penduduk yang berbentuk piramida ekspansif, dengan sebaran didominasi usia produktif. Sebaran struktur umur penduduk Kota Palu Tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 1.2 dibawah ini :

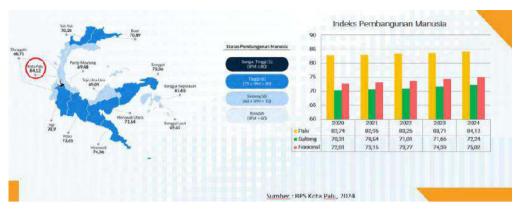


Jumlah Penduduk Kota Palu
Sumber: Disdukcapil Kota Palu

Rasio Ketergantungan (*dependency ratio*) atau angka ketergantungan adalah suatu angka yang menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif. Apabila dilihat dari komposisi usia produktif yaitu 15-65 tahun dan usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas), maka dapat diketahui bahwa angka ketergantungan (*dependency ratio*) Kota Palu pada tahun 2024 adalah 33,46 %. Angka ini menunjukkan bahwa setiap 100 orang yang berusia kerja atau dianggap produktif mempunyai tanggungan sebanyak 33 orang yang belum produktif dan/atau dianggap tidak produktif lagi. Hal ini menggambarkan bahwa Kota Palu telah menikmati bonus demografi.

## 1.2 Pembangunan Manusia Kota Palu

Kualitas pembangunan sebuah wilayah dapat diukur menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM terdiri dari variabel pendidikan, variabel kesehatan, dan variabel kondisi ekonomimasyarakat. Variabel kesehatan meliputi indikator usia harapan hidup, variabel pendidikan meliputi indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, sementara kondisi masyarakat berdasarkan indikator daya beli masyarakat dengan melihat pengeluaran per kapita penduduk. IPM Kota Palu termasuk kategori tinggi dengan realisasi 84.12 capaian kinerja sebesar 102,46% di Tahun 2024. Capaian ini mendudukkan Kota Palu sebagai daerah dengan IPM tertinggi di Sulawesi Tengah. Tingginya IPM Kota Palu ditopang oleh peningkatan usia harapan hidup dari Tahun 2020 sebesar 73,46 tahun menjadi 73,49 tahun di Tahun 2021. Tahun 2022 sebesar 73,56, dan tahun 2023 menjadi 73,71 tahun sedangkan tahun 2024 adalah 73,91. Untuk komposit pendidikan, dari rata-rata lama sekolah selama 11,61 tahun di Tahun 2020 menjadi 11,72 tahun di Tahun 2021. Tahun 2022 sebesar 11,73 tahun, dan 2023 selama 11,74 tahun sedangkan pada tahun 2024 sebesar 11,75. Untuk harapan lama sekolah dari 16,23 tahun di Tahun 2020 menjadi 16,28 Tahun di 2021, tahun 2022 selama 16,36 tahun dan tahun 2023 selama 16,51 tahun dan 16,52 pada tahun 2024 Selanjutnya, indikator ekonomi terjadi perbaikan standar hidup yang layak dari sebelumnya. Hal ini dilihat dari pengeluaran perkapita sebesar 14,83 juta Tahun 2020 menjadi 14,89 juta di Tahun 2021 dan 15,16 juta di tahun 2022, selanjutnya tahun 2023 sebesar 15,50 juta dan 15.941.000 pada tahun 2024. Trend perkembangan IPM Kota Palu melalui infografis Badan Pusat Statistik Kota Palu dapat dilihat pada Gambar 1.3 di bawah ini :



**Gambar 1.3**Infografis Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2024

#### 1.3 PEREKONOMIAN KOTA PALU

Kebijakan pembangunan Kota Palu sesuai dengan tema pembangunan Kota Palu Tahun 2024 yakni membangun perekonomian yang mandiri dan siap bersaing dalam perkembagan ekonomi regional dan global. Pemilihan tema ini mampu mendorong bangkitnya kembali perekonomian Kota Palu pasca bencana alam dan dampak bencana non alam (Covid-19).

Perekonomian Kota Palu Tahun 2024 tumbuh sebesar 4.61 %. Hasil ini menunjukkan geliat perekonomian di Kota Palu mengalami sedikit penurunan sebesar 0,35% Untuk nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan sebesar 17,9 triliun pada tahun 2023 dan pada Tahun 2024 sebesar 18,77 triliun.. Untuk PDRB atas dasar harga berlaku Kota Palu Tahun 2023 sebesar 79,45 juta dan 83,88 pada Tahun 2024.



**Gambar 1.4** Pertumbuhan Ekonomi Kota Palu Tahun 2024

Melihat kontribusi lapangan usaha dalam pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2024, maka lapangan usaha pertambangan dan galian paling besar yakni sebesar 17,98 %, pada Tahun 2023 dan usaha pertambangan dan pengalian 14,37 pada Tahun 2024 disusul lapangan usaha transportasi dan pergudangan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 9,08 %, sedangkan

Tahun 2024 sebesar 5,44%. Selanjutnya lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda sebesar 6,1% di Tahun 2023 sedangkan Tahun 2024 sebesar 5,75%.

#### 1.4 SUMBER DAYA APARATUR NEGARA

Pemerintah Kota Palu dipimpin oleh Walikota, H. Hadianto Rasyid, S.E dan Wakil Walikota, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK.,M.Kes sesuai hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2020. Adapun periode menjabat yakni dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026. Pelaksanaan tugas Walikota Palu dan Wakil Walikota Palu dibantu oleh Sekretaris Daerah beserta organisasi perangkat daerah.

Merujuk Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palu terdiri dari:



Pelaksanaan urusan pemerintah sesuai kewenenangan Pemerintah Kota Palu didukung oleh sumber daya aparatur. Sumber daya aparatur Pemerintah Kota Palu Tahun 2024 sebanyak 5.071 Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdiri dari 1.601 laki-laki dan 3.470 perempuan. Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan, rata-rata pendidikan PNS di Kota Palu adalah setingkat sarjana yakni sebesar 69,08 persen. Sementara, tingkat Diploma, SMA dan di bawah SMA masingmasing sebesar 17,37 persen, 13,47 persen, dan 0,35 persen. Selain, Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Kota Palu juga didukung oleh sumber daya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebanyak 1.396 orang terdiri dari 1.038 perempuan dan 358 berjenis kelamin laki-laki.

#### 1.5 ISU STRATEGIS PEMERINTAH KOTA PALU

Isu Strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dimasa yang akan datang (Permendagri 86 Tahun 2017). Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor Tahun 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, maka dapat diuraikan isu strategis Pemerintah Kota Palu, sebagai Berikut:

- 1) Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan merata;
- 2) SDM unggul, tangguh, dan berdaya saing;
- 3) Infrastruktur kota yang aman, nyaman, tangguh dan inklusi Kemiskinan kota;
- 4) Pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim serta percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- 5) Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
- 6) Pencapaian target dan sasaran Tujuan Pembangunan berkelanjutan.



#### BAB II

#### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 VISI DAN MISI

Visi Kota Palu Tahun 2021 - 2026

"Membangun Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan"

Gambar. 2.1 Visi, Misi, Pemerintah Kota Palu Tahun 2021-2026

Tahun 2020 Kota Palu melakukan pemilihan kepala daerah. Kontestasi tersebut, menetapkan H. Hadianto Rasyid, S.E Wali Kota Palu Kota Palu dan dr. Reny A. Lamadjido, M.Kes.,Sp.PK sebagai Wakil Wali Kota Palu terpilih untuk periode 2021-2026. Pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2021. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, mengamanatkan untuk menyusun dan menetapkan RPJMD paling lambat enam bulan setelah pelantikan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, ditetapkan visi dan misi Kota Palu.



Gambar. 2.2 Hubungan Visi, Misi, dan Agenda Pembangunan Kota Palu Tahun 2021-2026

dan selalu hadir melayani

Prioritas pembangunan daerah disajikan selama 5 (lima) tahun mulai Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026, disajikan berdasarkan sasaran pembangunan jangka menengah. Dengan sifat prioritas pembangunan daerah yang bersifat strategis, maka pelaksanaan dan penganggarannya diutamakan. Penentuan prioritas pembangunan daerah Kota Palu juga merupakan bentuk pelaksanaan program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2021-2026 yang diuraikan ke dalam enam Agenda Pembangunan Kota Palu Tahun 2021-2026, yaitu:

- 1. Ekonomi Mantap Berdaya Saing;
- 2. Lingkungan Mantap Berkelanjutan;
- 3. Infrastruktur Mantap Berketahanan;
- 4. SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter;
- 5. Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas; dan
- 6. Pemerintahan Mantap Melayani.



- 1. Bangun Palu Tahan Gempa (Palu Tangguh Bencana)
- 2. Pembangunan Gudang Logistik Bencana
- 3. Waterfront Park Talise (Monumen Tsunami)
- 4. Pembangunan Kawasan Olahraga Kota Palu
- 5. Ruang Terbuka Hijau/Publik per Kecamatan
- 6. Pembangunan Gedung Kesenian Kota Palu



- 1. Peningkatan Kesejahteraan dan Kualitas Keria Masyarakat Padat Karya
- 2. Badan Pelayanan Rumah Ibadah
- 3. Palu Berbagi
- 4. Palu Religi
- 5. Pelestarian Seni Budaya
- 6. Palu Ramah Difable

1. Palu Adipura

2. Palu Terang

3. Palu Hijau

5. CSR Forum

7. Event Tahunan Olahraga Kota Palu

4. Palu Ramah, Aman, dan Tertib

6. Satgas Cepat Tanggap 7. Kelurahan Mantap 2 Miliar

8. Event Tahunan Komunitas Anak Muda Kota Palu



- 1. Rp 4 Miliar untuk Bedah Rumah + Modal Usaha
- 2. Inkubator Bisnis Berbasis Digital per Kelurahan
- 3. Penguatan UMKM dan Palu Market Place
- 4. Revitalisasi Perparkiran Kota Palu
- 5. Reformasi dan Revitalisasi Moda Transportasi
- 6. Kawasan Ekonomi Kreatif dan Wisata Religi
- 7. Kawasan Agrowisata Layana dan Petobo
- 8. Revitalisasi Pasar Berbasis Segmentasi
- 9. Wisata Pasar Ikan Kota Palu
- 10.1.000 Perahu untuk Nelayan Kota Palu
- 11.Keriasama Antar Pemerintah Daerah
- 12.Forum Komunitas Kreatif Kota Palu (Palu Creative Hub)

Pelayanan Dasar

Mantap Berkualitas



#### Pemerintahan Mantap Melayani

Lingkungan Mantap

Berkelanjutan

- 1. Audit APBD oleh Auditor Independen
- E-Government (Palu Smart City)
   Penerapan QSL (Quick Service License)
- 4. One Touch Info Kota Palu
- 5. Penerapan ISO atas Pelayanan Publik di Semua İnstansi
- 6. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Honorer
- 7. ASN Magang Nasional
- 8. Pelayanan Pembuatan KTP, KK, Akte Kelahiran, dan Dokumen Kependudukan Lainnya di Kelurahan

- 1. 1.000 Beasiswa Keluarga Tidak Mampu
   Reward 2 Miliar Prestasi SD dan SMP
- Persamaan Kualitas SD dan SMP se-Kota Palu
- Pelatihan Tenaga Kerja Bersertifikat per Kelurahan Update Berkala Kompetensi & Kapasitas Guru/Pengajar

Palu Kota Sehat
 Transformasi Puskesmas meniadi Klinik Modern

Transformasi Puskesmas menjadi kililik Modern
 Satu Ambulans Satu Kelurahan
 BPJS Gratis Warga Tidak Mampu
 Tunjangan Kesehatan dan Santunan Duka RT/RW dan

Petugas Rumah Ibadah

Bus Gratis untuk Siswa Sekolah.
 Kepala Sekolah Magang Nasional

#### Gambar 2.3 Agenda Pembangunan Kota Palu Tahun 2021-2026

Palu Mantap Bergerak merupakan perwujudan dari visi Membangun Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Pembangunan Berkelanjutan berbasis Kearifan Lokal Konteks Keagamaan dicapai dengan menerapkan konsep pembangunan kota berkelanjutan (sustainable development) didukung dengan penerapan konsep pengembangan kota, yaitu Kota Cerdas (smart city), Kota tangguh (Resilience city), Kota hijau (green city), dan Kota inklusif (inclusive city).

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka disusunlah proses bisnis yang menguraikan aktivitas yang harus dilakukan, mulai dari aspek utama, pendukung, dan manajemen. Namun sebelum menyusun proses bisnis, terlebih dahulu diidentifikasi terlebih dahulu keterkaitan antara konsep yang diusung dengan visi dan misi Pemerintah Kota Palu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yang digambarkan dalam bagan berikut ini.

# MEMBANGUN KOTA PALU YANG MANDIRI, AMAN DAN NYAMAN, TANGGUH, SERTA PROFESIONAL DALAM











SDM Yang Tangguh



Pemerintahan Yang Profesional



#### MISI 1

Membangun perekonomian yang mandiri dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional.

#### MISI 2

Membangun Kembali tatanan lingkungan yang aman dan nyaman dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana.

#### MISI 3

Mengembangkan sumber daya manusia yang Tangguh menghadapi perkembangan global dan mampu beradaptasi terhadap bencana serta persaingan global.

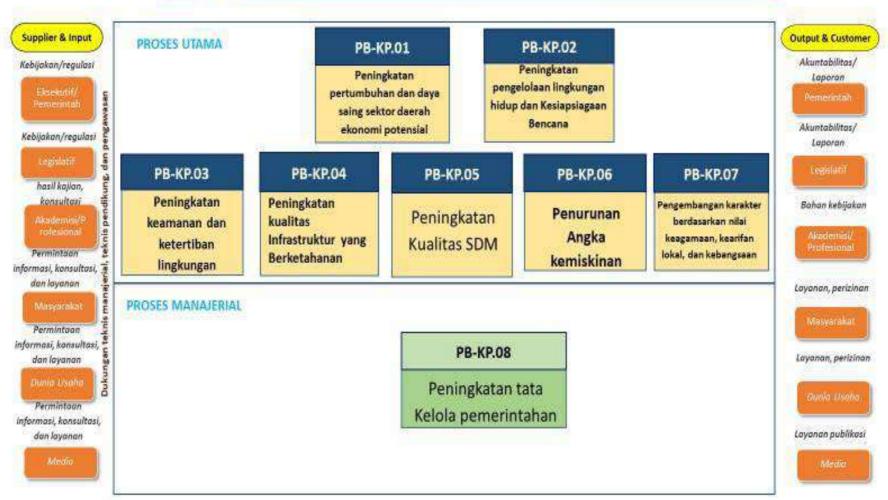
#### MISI

Menciptakan pemerintahan yang professional dan hadir melayani.

Gambar 2.4 Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026



#### Peta Proses Bisnis Kota Palu



Gambar 2.5 Peta Proses Bisnis Kota Palu Tahun 2021-2026

Adapun penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator pembangunan Kota Palu Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 isi, Misi, Tujuan dan Visi, dan Sasaran Daerah 2021- 2026

		dan visi, dan Sasa	Sasaran	Indikator Kinerja
Visi	Misi	Tujuan	Daerah	Utama (IKU)
	Membangunan perekonomi an yang mandiri dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global	Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah	Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing sektor daerah daerah ekonomi potensial	Laju Pertumbuhan Ekonomi
Membangun Kota Palu yang Mandiri Aman dan Nyaman, Tangguh, serta	Membangun kembali Tatanan Lingkungan yang Aman dan nyaman dengan	Meningkatkan Kualitas lingkungan hidup yang aman,	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup dan Kesiapsiagaan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Profesional dalam Konteks	Dukungan Infrastruktur yang Berketahanan terhadap Bencana	nyaman, dan berketahanan Bencana	Bencana	Indeks Risiko Bencana
Pembangu nan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal			Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	Indeks Kewaspadaan Nasional
dan keagamaan			Meningkatnya Infrastruktur yang	Persentase jalan yang berkeselamatan
			Berketahanan	Persentase luas kawasan kumuh
				Persentase rumah tidak layak huni
	Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Tangguh Menghadapi Perkembangan Global dan Mampu	Meningkatkan kualitas dan ketangguhan sumber daya manusia, serta pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya Kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia

Beradaptasi terhadap Bencana.		Menurunnya Angka kemiskinan	Angka Kemiskinan
		Meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan, kearifan lokal, dan kebangsaan	Indeks Aktualisasi Pancasila
Menciptakan Pemerintahan yang Profesional dan Hadir Melayani	Meningkatkan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi Opini BPK

#### 2.2 Indikator Kinerja Utama

lndikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Palu ditetapkan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2021 - 2026. IKU tersebut merupakan ukuran keberhasilan terhadap sasaran strategis yang ingin dicapai. Adapun IKU Pemerintah Kota Palu dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula	Penanggung Jawab
Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing sektor ekonomi potensial daerah	Laju pertumbuhan ekonomi	R = GNP t - 1 GNP t - GNP t - 1 x 100%	Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas PMPTSP, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus.

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kesiapsiagaan bencana	Indeks risiko bencana	DR = H x V (Risiko Bencana = Bahaya x Kerentanan)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Pekerjaan Umum.
	Indeks kualitas lingkungan hidup	IKLH = (30%xIndeks Kualitas Air + 30%x Indeks Kualitas Udara + 40% x Indeks Kualitas Tutupan Lahan)	Dinas Lingkungan Hidup.
Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	Indeks kewaspadaan nasional	Perhitungan dari Dirjen Politik dan PUM Kemendagri	Badan Kesbangpol, dan Satuan Polisi Pamong Praja.
Meningkatnya infrastruktur yang berketahanan	Persentase jalan yang kerkeselamatan	Panjang jalan Kota yang memenuhi standar keselamatan / panjang jalan kota x 100%	Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Perhubungan.
	Persentase luas kawasan kumuhv	Luas kawasan Permukiman kumuh (Ha) / Total Luas Wilayah (Ha) x 100%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Dinas Pekerjaan Umum.
	Persentase Rumah tidak layak huni	Jumlah rumah tidak layak huni / Jumlah Rumah di Kota Palu x 100%	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Meningkatnya kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia	Pertumbuhan IPM = (IPMt-IPMt-1)x100 IPMt-1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pemuda & Olaraga.
Menurunnya angka kemiskinan	Angka kemiskinan	Persentase penduduk miskin = (jumlah penduduk miskin / jumlah penduduk total) x 100%	Dinas Sosial.
Meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan, kearifan lokal, dan kebangsaan	Indeks Aktualisasi Pancasila	Indeks $\mathbf{Dj} = \frac{1}{n_j} (\sum X_i)$ $Dj$ adalah Sila ke-j $n_j$ adalah banyaknya indikator di Sila ke-j $X_i$ adalah nilai indikator ke-i $\mathbf{IAP} = \frac{1}{n} (\sum D_j)$ $Dj$ adalah nilai indeks Sila ke-j  n adalah banyaknya sila (yang mana dalam IAP n=5)	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.
Meningkatnya kualitas tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	RB = Nilai RB General + Nilai RB Tematik  Nilai RB General diperoleh dari: Nilai capaian strategi pelaksanaan RB General, Nilai tingkat implementasi kebijakan, Nilai capaian strategis.  Nilai RB Tematik diperoleh dari: Nilai strategi membangunn	Semua Organisasi Perangkat Daerah

	RB Tematik, Nilai capaian dampak RB Tematik.	
Opini	BPK Hasil Audit BPK	BPKAD, Inspektorat

lndikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Palu ditetapkan Dengan Mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2021 - 2026. IKU tersebut, merupakan ukuran keberhasilan berdasarkan hasil evaluasi dengan melakukan pemetaan isu strategis pemerintah Kota Palu sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah kota palu Tahun 2021- 2026, Sehubungan dengan upaya simplikasi dan penajaman sasaran pembangunan agar lebih fokus, maka dilakukan perubahan indikator kinerja utama yang selanjutnya menjadi rujukan dalam penyusunan perjanjian kinerja pemerintah Kota Palu Tahun 2024. Perubahan tersebut meliputi perubahan sasaran srategis dan indikator kinerja.

Berdasarkan Tabel 2.2 dan Tabel 2.4 di atas, maka sasaran strategis dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Palu Tahun 2024 sebagai berikut: Misi 1 terdapat 1 (satu) sasaran, dan 1 (satu) indikator kinerja.

Misi 2 terdapat 3 (tiga) sasaran, dan 6 (enam) indikator kinerja.

Misi 3 terdapat 3 (tiga) sasaran, dan 3 (tiga) indikator kinerja.

Misi 4 terdapat 1 (satu) sasaran, dan 2 (dua) indikator kinerja.

#### 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kota Palu Tahun 2024, merupakan tolok ukur pengukuran capaian kinerja Tahun 2024, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. PK terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu pernyataan Perjanjian Kinerja dan lampiran Perjanjian Kinerja. Gambaran Lampiran Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Palu Tahun 2024 dapat di uraikan dalam Tabel berikut:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Palu Tahun 2024

	I eijanjian i	Consum Stantonia Indiana Vania			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kerja	Target		
1	Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing sektor ekonomi potensial daerah	Laju Bertumbuhan Ekonomi	4,20		
2	Meningkatnya Kulaitas lingkungan hidup dan	Indeks Risiko Bencana	112,54		
	Kesiapsiagaan Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,94		
3	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	Indeks Kewaspadaan Nasional	62		
4	Meningkatnya Persentase Jalan yang Berkeselamatan		6,27		
	Infrastruktur yang berketahanan	Persentase Luas Kawasan Kumuh	0,07		
	berketariariari	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	9,75		
5	Meningkatnya Kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia	82,10		
6	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	4,75		
7	Meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan, kearifan lokal, dan kebangsaan	Indeks Aktualisasi Pancasila	70		
8	Meningkatnya kualitas tata Kelola	Indeks Reformasi Birokrasi	86		
Ü	kualitas tata Kelola Pemerintahan	Opini BPK	WTP		

Sementara untuk Program dan Anggaran Untuk merealisaikan Pencapaian Sasaran IKU Pemerintah Kota palu pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Program dan Anggaran

No	IKU	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	67.411.448.811	58.253.986.903
2.	Indeks Risiko Bencana	131.650.106.988	110.783.039.850
3.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66.164.612.521	57.187.820.677
4.	Indeks Kewaspadaan Nasional	88.568.070.391	85.724.697.064
5.	Persentase Jalan yang Berkeselamatan	139.611.892.602	118.206.252.628
6.	Persentase Luas Kawasan Kumuh	80.720.737.394	67.047.361.727
7.	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	7.524.793.869	5.474.514.058
8.	Indeks Pembangunan Manusia	649.571.684.714	626.839.819.518
9.	Angka Kemiskinan	22.093.143.850	17.022.737.992
10	Indeks Aktualisasi Pancasila	7.905.677.869	7.189.529.214
11.	Indeks Reformasi Birokrasi	526.286.442.812	429.461.989.860
12.	Opini BPK	29.387.848.105	28.026.796.449



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kota Palu dilakukan secara berkala yakni triwulanan, semesteran, dan tahunan. Pengukuran dilakukan untuk mengetahui capaian sebagai umpan balik untuk perbaikan agar target kinerja dapat tercapai. Pengukuran kinerja dilaksanakan oleh unsur perencanaan, keuangan, pengawasan serta pengendalian pembangunan. Pengukuran kinerja dilaksanakan melalui pembandingan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Palu Tahun 2024 serta menggali informasi terkait upaya apa yang sudah dilakukan perangkat daerah dalam mendukung pencapaian target, termasuk permasalahan yang dihadapi dan strategi pemecahan masalah (problem solving).

#### 3.2 Capaian Kinerja Pemerintah Kota Palu

#### 1. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan target kinerja berdasarkan RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 dengan realisasi kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 sebagaimana perjanjian kinerja, diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Berdasarkan RPJMD 2021 – 2026

3.7	Sasaran	3.7	. T 111 4 TZ1 1	Tahun 2024			
No.	Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
1.	Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing sektor ekonomi	1.	Laju pertumbuhan ekonomi	4,20	4,61		
2.	Meningkatnya kualitas lingkungan		Indeks risiko bencana	112,54	132,3		
	hidup dn kesiapsiagaan bencana	3.	Indeks kualitas Lingkungan hidup	74,94	73,25		
3.	Meningkatnya keamanan dan	4.	Indeks kewaspadaan nasional	62	75,09*		

	ketertiban lingkungan				
4.	Meningkatnya infrastruktur yang	5.	Persentase jalan yang berkeselamatan	6,27	4,50
	berketahanan.	6.	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	9,75	1,78
		7.	Persentase luas Kawasan kumuh	0,07	0,23
5.	Meningkatnya kualitas SDM	8.	Indeks pembangunan manusia	82,10	84,12
6.	Menurunnya 9. Angka kemiskinan angka kemiskinan		4,75	5,94	
7.	Meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan, kearifan lokal, dan kebangsaan	10.	Indeks aktualisasi pancasila	70	83,2*
8.	Meningkatnya kualitas tata	11	Indeks Reformasi Birokrasi	86	74,03
	kelola Pemerintahan	12.	Opini BPK	WTP	WTP

Sumber data: BPS Kota Palu dan Laporan Kinerja OPD Kota Palu, 2024

### 3.3 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan beberapa tahun terakhir diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023 Dan Beberpa Tahun Terakhir

No.	Sasaran	No.	Indikator	Tahu	n 2022	Tahu	n 2023	<b>Tahun 2024</b>	
	Strategis		Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian Target	Realisasi	Persentase Capaian	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing sektor ekonomi	1.	Laju pertumbuhan ekonomi	4,32	135%	4,96	132,98%	4,61	109,76
		2.	Indeks risiko bencana	151,43	110%	132,3	105,77%	132,3	117,56
		3	Indeks kualitas Lingkungan hidup	69	93%	76,5	102,55%	73,25	97,74
3.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	4.	Indeks kewaspadaan nasional	100	100%	75,09	123,10%	75,09*	121,11
4.	Meningkatnya infrastruktur yang	5.	Persentase jalan yang berkeselamatan	2,45	89%	2,94	66,97%	4,50	71,77
	berketahanan.	6.	Persentase luas Kawasan kumuh	0,50	109%	0,28	109,68%	0,23	-128,57

		7.	Persentase rumah tidak layak huni.	1,59	185%	1,12	189,13%	1,78	181,74
5	Meningkatnya kualitas SDM	8.	Indeks pembagunan manusia	83,26	102%	83,71	102,21%	84,12	102,46
6	Menurunnya angka kemiskinan	9.	Angka kemiskinan	6,63	121%	6,56	68,80%	5,94	74,95
7	Meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan, kearifan lokal, dan kebangsaan	10.	Indeks aktualisasi pancasila	77,95	115%	76,29	110,57%	83,2*	118,86
8.	Meningkatnya kualitas tata kelola	11.	Indeks Reformasi Birokrasi	58,88	89%	64,19	82,29	74,03	86,08
	pemerintahan	12.	Opini BPK	WTP	100%	WTP	100%	WTP	100%

#### 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target RPJMD (2021 -2026)

Target dan realisasi Kinerja Pemerintah Kota Palu Tahun 2022, 2023 dan 2024 sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026 dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Dalam RPJMD (2021 - 2026)

1	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Tahu	Tahun 2022 Tahun 2023		Tahun 2024		% Capaian Target	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1. 2.	Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing sektor ekonomi	1.	Laju pertumbuhan ekonomi	3,21	4,32	3,37	4,96	4,20	4,61	109,76
4.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kesiapsiagaan	2.	Indeks risiko bencana	137,62	151,43	125,08	132,3	112,54	132,3	117,56
	bencana	3.	Indeks kualitas Lingkungan hidup	74,26	69	74,60	76,5	74,94	73,25	97,74
3.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	4.	Indeks kewaspadaan nasional	60	100	61	75,09	62	75,09*	121,11
4.	Meningkatnya infrastruktur yang berketahanan.	5.	Persentase jalan yang berkeselamatan	2,74	2,45	4,39	2,94	6,27	4,50	71,77
		6.	Persentase luas Kawasan kumuh	0,55	0,50	0,31	0,28	0,07	0,23	-128,57
		7.	Persentase rumah tidak layak huni	10,85	1,59	10,30	1,12	9,75	1,78	181,74
5.	Meningkatnya kualitas SDM	8.	Indeks pembangunan manusia	81,70	83,26	81,70	83,71	82,10	84,12	102,46
6.	Menurunnya angka kemiskinan	9.	Angka kemiskinan	5,50	6,63	5,00	6,56	4,75	5,94	74,95

7.	Meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan, kearifan lokal, dan kebangsaan	10.	Indeks Aktualisasi Pancasila	68	77,95	69	76,29	70	83,2*	118,86
8.	Meningkatnya kualitas tata kelola	11.	Indeks reformasi birokrasi	66	58,88	78	64,19	86	74,03	86,08
	Pemerintahan	12.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%

#### 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Nasional

Realisasi kinerja tahun 2024 jika dibandingkan dengan standar nasional akan terurai seperti tabel berikut ini :
3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional Tahun 2024

1	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional	Keterangan
1. 2.	Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing sektor ekonomi Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kesiapsiagaan bencana	Laju pertumbuhan ekonomi	4,61	5,03	Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2024
	kesiapsiagaan bencana	Indeks risiko bencana	132,3	131,85	Rata-rata Nilai IRB Nasional Tahun 2023
		Indeks kualitas Lingkungan hidup	73,25	72,54	Capaian nasional Tahun 2023
3.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	Indeks kewaspadaan nasional	75,09*	64	Capaian Indeks kewaspadaan nasional Tahun 2024

4.	Meningkatnya infrastruktur yang berketahanan.	Persentase jalan yang berkeselamatan	4,50	-	
		Persentase luas Kawasan kumuh	0,23	-	
		Persentase rumah tidak layak huni	1,78	-	
5.	Meningkatnya kualitas SDM	Indeks pembangunan manusia	84,12	75,02	Capaian IPM Nasional Tahun 2024
6.	Menurunnya angka kemiskinan	Angka kemiskinan	5,94	8,57	Angka Kemiskinan Nasional Tahun 2024
7.	Meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan, kearifan lokal, dan kebangsaan	Indeks Aktualisasi Pancasila	83,2*	75,53	Capaian IAP Nasional Tahun 2022
8.	Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan	Indeks reformasi birokrasi	74,03	69,71	Rata-rata IRB Nasional untuk pemerintah Provinsi 2023
		Opini BPK	WTP	WTP	

#### 3.6 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Realisasi dan capaian kinerja Tahun 2024 sebagaimana ditargetkan dalam RPMJD Tahun 2021-2026. Pada tahun keempat pelaksanaan RPJMD yakni kebijakan melalui percepatan program dan kegiatan melalui *tagline* Palu Mantap Bergerak sehingga dapat meningkatkan realisasi dan capaian sasaran strategis Pemerintah Kota Palu.

Adapun delapan sasaran strategis pemerintah Kota Palu diuraikan sebagai berikut:

## Sasaran 1 yakni meningkatnya pertumbuhan dan daya saing sektor ekonomi potensial daerah.

Sasaran meningkatnya pertumbuhan dan daya saing sektor ekonomi potensial daerah diukur dengan menggunakan indikator angka pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kota Palu mengalami kenaikan pada Tahun 2019 sebesar 0,65% dari Tahun 2018. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga pertumbuhan -4,43%. Hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Pada Tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan positif ke angka 5,97% yang disebabkan adanya pelonggaran dalam interaksi sosial sehingga mendorong meningkatnya kegiatan ekonomi. Tahun 2022 laju pertumbuhan ekonomi Kota Palu mengalami kontraksi dan hanya tumbuh pada angka 4,32%. Pada Tahun 2023 pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan ke angka 4,96% melampaui target 3,73 % atau capaian kinerja sebesar 132,98%. Target kinerja laju pertumbuahan ekonomi tahun 2024 sebesar 4,2 % dengan realisasi sebesar 4,61% dengan capaian sebesar 109,76 %. Tahun 2024 terjadi kontraksi ekonomi sebesar 0,35%. Adanya penurunan pertumbuhan ekonomi di sebabkan karena menurunnya daya beli masyarakat. Selain itu kondisi ekonomi nasional dan perekonomian dunia karena adanya konstelasi politik dan keamanan dunia, juga berdampak pada perekonomian di Kota Palu.



**Gambar 3.1** Laju pertumbuhan PDRB Tahun 2024

Sumber: BPS Kota Palu, 2025

Capaian sasaran meningkatnya pertumbuhan dan daya saing sektor ekonomi Tahun 2024 disajikan dalam Tabel 3.5 berikut ini:

Tabel 3.5 Capaian Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Sektor Ekonomi

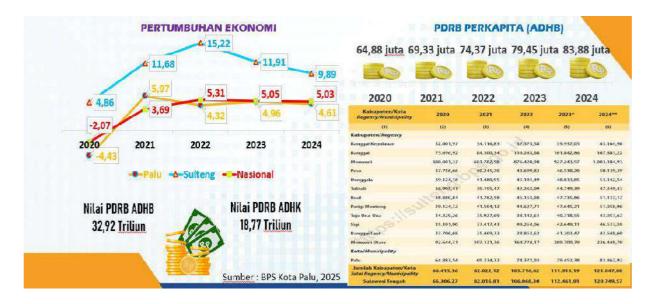
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Ket
1.	Laju pertumbuhan ekonomi	4,2	4,61	109,76	Tercapai

Hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2024 dengan indikator kinerja laju pertumbuhan ekonomi realisasinya 4,61 dengan capaian 109,76 %. Pencapaian sasaran indikator ini didukung dengan bantuan bioflok untuk pengembangan perikanan budidaya, bantuan sasaran produksi Hortikultura, pelaksanaan berbagai event seni yang berdampak pada bergeraknya roda perekonomian utamanya sektor jasa dan perdagangan, seperti melakukan Palu Sport Event, festival Mandura, Festival Tanggabango, Festival Raodah serta beragam kegiatan tematik lainnya. Hal ini menyebabkan tingginya minat wisatawan untuk berkunjung. Selain itu dilakukan perbaikan sarana prasaran di kawasan destinasi yang sudah ada termasuk penambahan beberapa Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Palu dan mengembangkan kawasan wisata yang berada di wilayah area likuifaksi. Selain itu, juga didukung dengan penguatan ekonomi masyarakat melalui program penguatan UMKM serta bantuan perahu untuk nelayan Kota Palu.





Gambar 3.2 Penyerahan Bantuan Perahu Fiber kepada Nelayan



Gambar 3.3 Pertumbuhan Ekonomi

### Sasaran 2 yakni meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kesiapsiagaan bencana.

Sasaran strategis meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kesiapsiagaan bencana diukur dengan menggunakan indikator-indikator terkait seperti: indeks risiko bencana, dan indeks kualitas lingkungan hidup. Realisasi dan capaian kedua indikator tersebut disajikan pada Tabel 3.6 dibawah ini.

Tabel 3.6 Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Bencana

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Ket
1.	Indeks Risiko Bencana	112,54	132,3	117,56	Tercapai
2.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,94	73,25	97,74	Belum tercapai
Rata Kine	-Rata Capaian erja	93,74	102,78	107,65	Tercapai

Capaian sasaran strategis meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup memiliki rata-rata capaian 107,65%. dua indikator penyusunnya, yakni indeks risiko bencana capaian 117,56%, dan indikator indeks kualitas lingkungan hidup capaian 97,74% pada Tahun 2024. Target Capaian indeks risiko bencana tahun 2024 sebesar 112,54% dengan realisasi 132,3% dan untuk capaian realisasi Indeks risiko bencana sebesar 117,56%. Namun, dengan adanya upaya penanggulangan bencana yang tepat dan terarah sesuai kajian maupun penelitian tentang kebencanaan, risiko bencana di suatu daerah rawan bencana atau daerah rentan bencana dapat diturunkan dengan baik. Risiko bencana adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kerentanan suatu wilayah terhadap bencana. Tinggi rendahnya risiko bencana dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kerentanan sosial, ekonomi dan juga lingkungan, serta kurangnya kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana yang terindikasi ada di wilayah mereka.

Pencapaian target indikator indeks risiko bencana melalui upaya mitigasi dan adaptasi bencana dengan program bangun Palu tahan gempa yaitu penataan kota berbasis zona rawan bencana dan pembangunan sesuai dengan standar tahan gempa. Selain itu, dilakukan pula peningkatan kapasitas masyarakat dengan rutin melakukan simulasi bencana, pemberian informasi bencana, serta pembentukan kampung tangguh bencana. Upaya lain yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palu dengan pembangunan gudang logistik bencana, pemasangan rambu evakuasi, serta pembangunan lapangan olahraga dan Ruang Terbuka Hijau yang dapat dijadikan titik kumpul, jika sewaktu-waktu terjadi bencana alam. Selain itu ada juga Pencegahan dan Kesiapsiagaan melakukan kegiatan "BPBD go to school" yaitu sosialisasi terkait pengurangan risiko bencana di 48 sekolah taman kanak-kanak yang ada di Kota Palu, Peningkatan Tim Reaksi Cepat yang ada di kelurahan, melakukan geladi ataupun simulasi kebencanaan di kelurahan Mamboro Barat, kawasan pantai serta peningkatan kapasitas kebencanaan untuk para pelaku usaha UMKM yang ada di Kota Palu.



Gambar Keg. Penguatan kapasitas bagi pelaku UMKM dalam PRB



Gambar Keg. Pelatihan/simulasi PRB di lingkungan Sekolah



Gambar Keg. Pelatihan/simulasi PRB di lingkungan Sekolah



Gambar Keg. Pengembangan kapasitas TRC di kel. Palupi



Gambar Keg. Pengembangan kapasitas TRC di kel. Palupi

Gambar 3.4 Penguatan Kapasitas oleh OPD

Dalam bidang kedaruratan dan Logistik telah menangani kejadian kebencanaan yang terjadi selama bulan Juli sampai bulan Desember. Selama kurun waktu enam bulan terakhir ini sedikitnya telah terjadi kejadian bencana banjir sebanyak 10 (sepuluh) kali yang terjadi di beberapa kelurahan yang ada di Kota Palu. Banjir tersebut terjadi karena beberapa faktor mulai dari cuaca ekstrim yang terjadi di Kota Palu (hujan deras), meluapnya sungai Pondo di Kelurahan Besusu Timur dan Sungai Kawatuna di Kelurahan Tatura Utara, meluapnya air sungai beserta lumpur di Kelurahan Tondo, curah hujan yang tinggi hingga menyebabkan air yang ada di drainase ikut meluap. Banjir ini terjadi di Kecamatan Palu Timur, Palu Barat, Palu Selatan, Tatanga, Mantikulore, dan juga Ulujadi.

Sebagian besar wilayah yang tergenang banjir merupakan badan jalan hingga ke pekarangan rumah warga, sungai meluap juga menyebabkan beberapa titik yang ada disisi jembatan tergerus air hujan mengguyur wilayah Kota Palu. Hujan dengan durasi yang lama menyebabkan terjadinya banjir sehingga air sungai meluap melalui gorong-gorong menggenangi beberapa rumah di wilayah bantaran sungai tersebut.



Gambar Banjir di Kel.Baru Kec. Palu Barat



Gambar Banjir di Kel.Lere Kec. Palu Barat



Gambar Banjir di Kel.Besusu Timur Kec. Palu



Gambar Banjir di Kel.Bayouge Kec. Palu Barat



Gambar Banjir di Kel.Balaroa Kec. Palu Barat



Gambar Banjir di Kel.Lambara Kec. Tawaili

Pendampingan pemulihan pasca bencana bidang fisik kegiatan ini bertujuan memfasilitasi pendampingan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana bidang fisik terhadap daerah yang terdampak bencana masif. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub-output yaitu melakukan pendampingan, pemulihan dan peningkatan fisik sektor permukiman dan infrastruktur yang terdampak bencana. Kegiatanini merupakan komponen utama pada output layanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dibidang fisik.

Sementara untuk Indeks kualitas lingkungan hidup disusun oleh indikator indeks kualitas air sebesar 59,66, indeks kualitas udara sebesar 91,85, dan indeks tutupan lahan sebesar 59,64 pada tahun 2023 . Sedangkan untuk Tahun 2024 nilai indeks kualitas udara terealisasi sebesar 91,85 dari target sebesar 85,98 dengan capaian 106,83%. Pemantauan kualitas udara ambien dengan metode passive sampler dilakukan dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu Tahap I (Periode Sampling di tanggal 03 - 17 Juli 2024) dan Tahap II (Periode Sampling di tanggal 02 - 16 September 2024) Berdasarkan dari data hasil pengukuran kualitas udara ambien, Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Palu tahun 2023-2024 menunjukkan adanya perubahan yang cukup signifikan, pada Tahun 2023 nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 87,25 dengan kategori baik, dan telah mencapai target yang telah direncanakan yaitu 85,88 dan pada pada Tahun 2024, nilai IKU naik menjadi 91,85 dengan kategori sangat baik. Pencapaia ini didukung dengan melakukan pengukuran indeks kualitas air dan tanah secara berkala, sehingga jika terjadi pencemaran dapat langsung diambil tindakan. Peningkatan indeks tutupan lahan dilakukan melalui program Palu hijau, pembangunan/rehabilitasi RTH di Kota Palu, bantuan bibit tanaman bagi lahan pekarangan masyarakat. Selain itu, peningkatan layanan pengelolaan sampah dengan rehabilitasi TPA dan panambahan armada pengangkutan sampah, serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui TPS3R, bank sampah, sekolah adiwiyata dan pembentukan kampung iklim, kolaborasi pemerintah, swasta, dana masyarakat untuk menurunkan emisi dan meningkatkan kesadaran lingkungan, juga berperan dalam peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup.

#### Sasaran 3 yakni meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan.

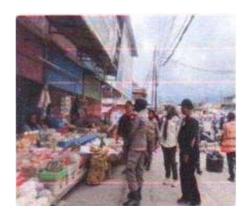
Sasaran strategis ketiga yaitu meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan digambarkan dengan indeks kewaspadaan nasional, dimana realisasi dan capaiannya ditunjukkan pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7 Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Ket
1.	Indeks Kewaspadaan Nasional	62	75,09*	121,11	*Nilai 2023

Berdasarkan Tabel 3.7, terlihat bahwa indeks kewaspadaan nasional dengan target 62,00 dengan realisasi 75,09 dan mendapatkan capaian 121,11%. Nilai yang

digunakan untuk capaian sasaran 3 ini masih menggunakan nilai pada Tahun 2023 karena nilai untuk Indeks Kewaspadaan Nasional untuk Tahun 2024 menunggu rilis dari kementerian terkait. Capaian ini tidak lepas dari setiap laporan gangguan keamanan dan ketertiban yang ada tertangani secara tuntas. Gerak cepat untuk penanganan laporan gangguan keamanan dan ketertiban melalui pembentukan Satgas Reaksi Cepat, pembentukan satgas Pancasila, keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta peningkatan peran Forum Komunikasi Umat Beragama, Forkopimda, dan lembaga adat. Masyarakat Kota Palu sangat heterogen, namun sangat terbuka dengan perbedaan. Selain itu peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu sangat optimal dalam menegakkan peraturan daerah dan upaya pelaksaan tugas pengamanan sesuai tugas dan fungsinya. Selain itu, masyarakat masih menjalankan adat kebiasaan para leluhur yang masih tetap dilestarikan di wilayah Kelurahan yang merupakan kearifan lokal.







Gambar 3.6 Penertiban Polisi Pamong praja



Gambar. 3.7 Lembaga Adat di Kota Palu

#### Sasaran 4 yakni meningkatnya infrastruktur yang berketahanan.

Sasaran strategis meningkatnya infrastruktur yang berketahanan memiliki tiga indikator kinerja yaitu persentase jalan yang berkeselamatan, persentase luas kawasan kumuh, dan persentase rumah tidak layak huni. Realisasi dan capaian ketiga indikator tersebut terlihat pada Tabel 3.8

Tabel 3.8 Capaian Sasaran Meningkatnya Infrastruktur yang berketahanan

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Ket
1.	Persentase jalan yang berkeselamatan	6,27	4,50	71,77	Belum Tercapai
2.	Persentase luas kawasan kumuh	0,07	0,23	-128,57	Belum Tercapai
3.	Persentase rumah tidak layak huni	9,75	1,78	181,74	Belum Tercapai
Rat Kin	a-Rata Capaian erja			41,65	

Meningkatnya infrastruktur yang berketahanan dapat dilihat pada Tabel 3.8, indikator kinerja persentase jalan yang berkeselamatan dengan target 6,27% realisasi sebesar 4,50% serta capaian 71,77%. Capaian tersebut belum memenuhi target sesuai RPJMD, sedangkan untuk persentase luas kawasan kumuh dengan target 0,07% dengan realisasi sebesar 0,23%. Kategori capaian itu diperoleh karena menggunakan perbandingan berbalik nilai yang dimaknai jika nilai bertambah atau polarisasi negatif. Polarisasi negatif yakni jika capaiannya lebih besar daripada target, maka persentase capaiannya akan berkurang. Selanjutnya, untuk persentase rumah tidak layak huni dengan target 9,75% realisasi 1,78% dengan nilai capaian 181,74%. Secara keseluruhan rata-rata capaian indikator sasaran meningkatnya infrastruktur yang berketahanan di Kota Palu tahun 2024 sebesar 41,65%.

Pencapaian indikator persentase luas kawasan kumuh didukung dengan Meningkatkan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui kolaborasi penanganan dan kesamaan program kegiatan penanganan kawasan kumuh dari kegiatan teknokrat dan aspirasi masyarakat, Penanganan infrastruktur berskala Kawasan dan terintegrasi, dan pelaksanaan program penataan kawasan kumuh, rehabilitasi jalan dan drainase lingkungan, perbaikan sanitasi diantaranya dengan bantuan jamban yang dilengkapi septictank. Selain itu juga Pemerintah Kota Palu dibantu oleh Kementerian PUPR melalui program Kotaku untuk pembangunan beberapa infrastuktur yang ada di Kota Palu.

Persentase rumah tidak layak huni berkurang melebihi target didukung oleh faktor adanya bantuan dana stimulan dan hunian tetap bagi warga terdampak bencana gempa bumi, liquifaksi dan tsunami yang terjadi di Kota Palu pada Tahun 2018, bantuan perbaikan rumah tidak layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), perbaikan sanitasi dengan bantuan untuk rumah.

#### Sasaran 5 yakni meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Sasaran strategis meningkatnya kualitas SDM ditunjukkan dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Target IPD Kota Palu Tahun 2024 sebesar 82,1 dengan realisasi 84,12 dan capaiannya 102,46. Capaian tersebut, dapat dilihat pada Tabel 3.9 di bawah ini:

Tabel 3.9 Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas SDM

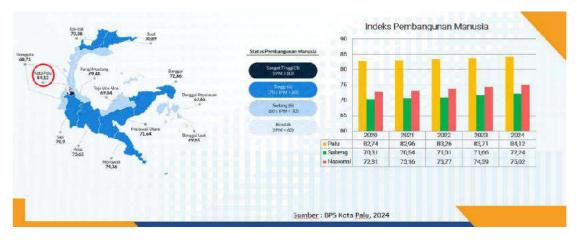
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Ket
1.	Indeks pembangunan manusia	82,1	84,12	102,46%	tercapai

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tersusun dari 3 dimensi yaitu kesehatan dengan indikator Usia Harapan Hidup (UHH), pendidikan dengan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), serta ekonomi dengan indikator pengeluaran perkapita. Peningkatan dimensi kesehatan diantaranya melalui program Palu Kota Sehat, BPJS gratis bagi warga tidak mampu, peningkatan kesadaran masyarakat terkait Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), serta peningkatan pelayanan kesehatan baik promotive, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Untuk jaminan kesehatan masyarakat, Tahun 2024 Kota

Palu sudah kategori *Universal Health Coverage* (UHC). Pencapaian Kota Palu dari dimensi kesehatan dapat terlihat dengan diraihnya predikat Kota Sehat pada Tahun 2023 dengan kategori Swasti Saba Padapa.

Selanjutnya, peningkatan dimensi pendidikan dilakukan melalui program percepatan peningkatan persamaan kualitas sekolah SD dan SMP se – Kota Palu, Biaya sekolah SD dan SMP negeri gratis, bantuan peralatan sekolah bagi siswa tidak mampu, beasiswa S-1 bagi keluarga tidak mampu, peningkatan sarana dan prasarana sekolah, layanan bus sekolah gratis, serta peningkatan SDM tenaga pendidik dan kependidikan diantaranya melalui magang kepala sekolah.

Peningkatan dimensi ekonomi dilaksanakan dengan mendorong peningkatan pendapatan masyarakat sehingga dapat mendorong daya beli melalui pemberian bantuan modal usaha, penguatan UMKM, bantuan peralatan usaha, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, serta fasilitasi dalam pengurusan izin usaha baik terkait izin halal maupun P-IRT.



Gambar 3.5 Indeks Pembangunan Manusia

#### Sasaran 6 yakni menurunnya angka kemiskinan.

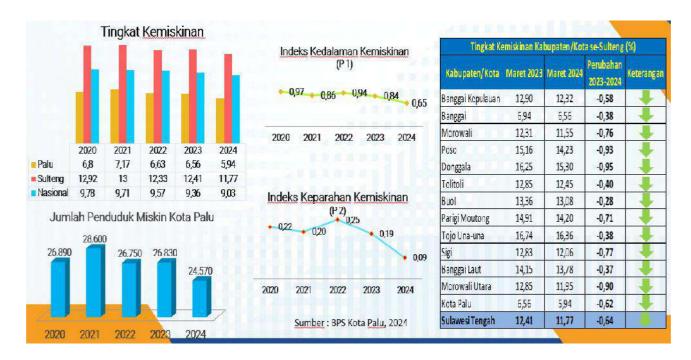
Sasaran strategis menurunnya angka kemiskinan ditunjukkan dengan indikator angka kemiskinan. Angka kemiskinan Kota Palu turun di Tahun 2024 dari target 4,75% dengan realisasi sebesar 5,94%. Hal ini dicapai melalui program bantuan modal usaha perkelurahan, BPJS kesehatan gratis warga tidak mampu, BPJS Ketenagakerjaan bagi kelompok rentan, Peningkatan kesejahteraan dan kualitas kerja masyarakat padat karya, Penguatan UMKM, bantuan perahu dan alat tangkap ikan untuk nelayan Kota Palu, Bantuan benih dan pupuk untuk

tanaman pangan, bantuan bibit ternak sapi, kambing dan domba, bantuan benih dan bibit untuk pemanfaatan pekarangan, beasiswa bagi keluarga tidak mampu, dan Pelatihan tenaga kerja bersertifikasi. Realisasi dan capaian indikator ini disajikan pada tabel 3.10 berikut.

Tabel 3.10 Capaian Sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Ket
1.	Angka Kemiskinan	4,75	5,94	74,95	Belum Tercapai

Tabel 3.10 menunjukkan realisasi indikator angka kemiskinan di Tahun 2024 dengan target 4,75 dan realisasi tahun 2024 adalah 5,94 dengan capaian 74,95%. Capaian ini menunjukkan program-program yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palu dalam menurunkan angka kemiskinan telah berdampak. Upaya penunjang yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palu untuk menurunkan angka kemiskinan seperti melakukan verifikasi dan validasi DTKS/P3KE mulai dari tingkat kelurahan, dan melakukan pendampingan bagi masyarakat yang menerima bantuan.



Gambar 3.6 Realisasi Indikator Angka Kemiskinan

### Sasaran 7 yakni meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan, kearifan lokal dan kebangsaan.

Sasaran strategis meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan, kearifan lokal, dan kebangsaan digambarkan melalui indikator Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP). Adapun pencapaian indikator kinerja tersebut dapat lihat pada Tabel diberikut ini:

Tabel 3.11

Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan, kearifan lokal, dan kebangsaan

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Ket
1.	Indeks				
	Aktualisasi	70	83,2	118,86	tercapai
	Pancasila				

Sumber: BPS Kota Palu, 2024

Berdasarkan evaluasi terhadap indikator kinerja indeks Aktualisasi Pancasila Tahun 2024, Realisasi capaian indeks aktualisasi Pancasila sebesar 83,2 dari target yang ditetapkan sebesar 70 sehingga nilai capaian kinerja yang diperoleh yakni 118,86% atau kategori tercapai.

Capaian ini didukung oleh adanya nota kesepahaman tentang Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) antara Pemerintah Kota Palu dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Selain itu, sebagai upaya dalam pencapaian target indikator ini dilakukan berbagai program di antaranya pembentukan satgas Pancasila, peningkatan peran lembaga adat, pembekalan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) pada Paskibraka, pendidikan PIP bagi guru, tokoh agama, masyarakat, pemuda dan semua komponen masyarakat di Kota Palu.

#### Sasaran 8 yakni meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan.

Sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan diukur melalui indikator indeks reformasi birokrasi dan opini BPK. Realisasi dan capaian indikator tersebut ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3.12

Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Ket
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	86	74,03	86,08	Belum tercapai
2.	Opini BPK	WTP	WTP	100	Tercapai
Rata Kine	-rata Capaian rja			93,04	

Pencapaian indikator kinerja indeks reformasi birokrasi, berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PAN-RB Tahun 2024 indeks RB 74,03 dengan target 86 sehingga diperoleh capaian 86,08%, predikat BB atau kategori sangat baik. Realisasi Tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dimana pada Tahun 2023 nilai indeks reformasi birokrasi adalah 64,19. Peningkatan nilai ini didukung oleh kinerja seluruh perangkat daerah yang ada di Kota Palu dalam upaya memperbaiki indikator pencapaian reformasi birokrasi, baik dalam reformasi birokrasi general maupun reformasi birokrasi tematik. Realisasi ini belum mencapai target dalam RPJMD sehingga masih perlu upaya perbaikan-perbaikan guna meningkatkan nilai reformasi birokrasi sesuai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2021-2026. Walaupun penilaian Reformasi birokrasi telah menerapkan reformasi birokrasi berdampak yaitu reformasi birokrasi General dan Tematik. Dengan perolehan RB General skor 102,38 dari bobot 10 dan skor indeks 7,93 pada tahun 2024 sedangkan perolehan strategi pelaksanaan RB tematik perolehan skor 10,96 dari bobot 22,5 skor indeks 10,96

Hasil penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Palu dapat dilihat pada gambar yang dilampirkan di bawah ini:

Hasil Peniliaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Palu

RB General Awal	63.07
RB General	63.07
Total Bobot RB General	100
Bobot RB General Penyesuaian	100
RB General Penyesuaian	63.07
RB Tematik	10.96
Indeks RB	74.03

**Tabel 3.13** Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi

Hasil evaluasi indikator kinerja opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kota Palu di Tahun 2024 mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaiannnya 100% predikat sangat tinggi. Pemerintah Kota Palu telah memperoleh predikat WTP selama 11 kali berturut-turut sejak Tahun 2014. Hal ini menunjukkan akuntabilitas keuangan maupun kinerja Pemerintah Kota Palu sudah berada di level tinggi, namun demikian perlu ditingkatkan lagi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kinerja Pemerintah Kota Palu. Predikat WTP ini dipertahankan melalui peran serta BPKAD dan seluruh OPD dalam peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawabannya.

#### REKOMENDASI PERBAIKAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

Berbagai rekomendasi perbaikan AKIP dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang telah dsampaikan pada tahun 2024 telah ditindaklanjuti sebagai berikut :

1. Melakukan review dan perbaikan dokumen perencanaan baik pada pemda maupun PD dengan memastikan bahwa rumusan tujuan dan sasaran strategis yang dikawal telah berorientasi hasil berdampak langsung kepada masyarakat (result oriented) serta memiliki indikator yang memenuhi SMART (*Specific*, *Measurable*, *Achievable*, *Relevant*, *and Time-bond* cukup untuk mengawal pencapaian kinerja tersebut sesuai dengan level jabatannya.

#### Tindak Lanjut:

Melakukan pendampingan intensif kepada Perangkat Daerah (PD) oleh Tim SAKIP untuk merumuskan tujuan dan sasaran strategis yang berorientasi pada dampak serta menyusun Indikator Kinerja Utama PD sesuai kaidah SMART



Gambar 3.8 Pelaksanaan *coaching* OPD dalam merumuskan tujuan & sasaran strategis

Pendampingan dilakukan berdasarkan catatan koreksi dari Tim Evaluator Kemenpan jika banyak catatan koreksi atau hal prinsip, maka Tim SAKIP akan berkunjung ke PD untuk melakukan pendampingan dan diskus. Selain itu, juga dibuka ruang diskusi dengan PD.

2. Menyempurnakan penjenjangan kinerja dan pohon kinerja berdasarkan Permenpan RB No. 89 Tahun 2021 dengan memperhatikan prinsip penyusunan pohon kinerja yang sudah

disusun dimanfaatkan untuk dituangkan dalam dokumen perencanaan berjenjang;

#### Tindak Lanjut:

Pendampingan juga dilakukan untuk distribusi kinerja berdasarkan penjenjangan kinerja

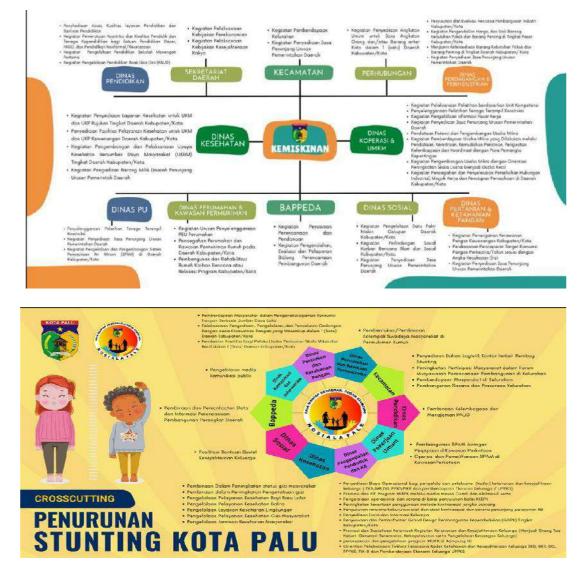
Kegistan/Aktivitas ( Pejubat Fungsional dan Pelaksana)	Haall Kerja (Output)	Ekapektasi Output	Pesanggung Jawab Regiatan	Waktu Pelaksanaan				Ange	Sasaran Sub Bagien/Sub			Annual Processing				
				**-	+ *=	- 3 = -	-3->	(Sum ber dane)	Bidang/Seksi* Jika Tidak Ada langsung te Kolom 11	Indikator	Sausran Bulanan	Indikato	Sasaran Strategis	Indikator		
1	2	3	4		6	7	- 11		10	11	12	11	14	15	1	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA			Dr. ARFAN M.Si								Meningkatka n kinerja reformasi	n kinerja Sakip	Inerja Sakip omasi Bappeda k okrasi Kota p i bersih Palu den p urabel p	Meningk atkan kinerja	Indeks Perenca noan	I
KEGIATAN: PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERIA PERANGKAT DAERAH			Moh Fahri SE. M.Si								yang bersih den			yang bersih Palu den	oaan pemban guoan	Pemban gunan Daerah
Penyusuran dokumen perencansan perangkat daerah	1 Dokumen renja Tahun N+1		Muh Aswin SD Mekoginta					APBD	Tersusumye Dekumen Perencensan Perengkat Daerah	Aumiah Dekumen Perencansan Perangkat Daerah					daerah	
Penyusuran Renja		Dokumen Renja Opd	Muh Aswin SD Mekoginta					APBD	Terautunnya Dokumen Perencansan Perangkat Daerah	Jumlah Dekumen Perencensan Perangkat Daerah						
Menyusus 5K Tim Pesyusunan Tim Renja	SK Tim Penyutunan Renja	Laporan	Muh Aswin SD Mokoginta												Ī	
Menyusus Bab I & III	Renja fab I &	† Laporen	Welan						1		-31				Ī	
Menyukus Bab II & III	Renja liah II S. III	† Laporas	Lla Andani												T	
Menyusus Bab IV & III	Renja Bab IV	t Laporen	Dewi						1						T	
Menyukus Bab V & III	Renja Rab V & III	† Laporan	Substri						1		3-5				T	
Mengikuti Verifikasi Renja	Mengituti Verifikasi Renja	1 Laporan	Moh Aswin SD Mokoginta												Ī	
Menyiapkan dokumen Renja Soft Copi dan Hard Copi	dakamen Renja faft Capi dan Hard Capi	1 Laporan	Nural								41					
Mengikut Orientasi dan penguatan penyusunan Dek Renja	Mengkuti Orientasi dan penguetan penyawanan Dak Revia	Laporan	Muh Aswin SD Mekoginta, Lia Andani													

Gambar 3.9 Cascading Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

**3.** Melakukan identifikasi dan pemetaan pada cascading kinerja yang dimiliki untuk melihat adanya potensi crosscutting kinerja dengan tugas dan fungsi dari PD lain yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja.

#### Tindak Lanjut:

❖ Melakukan pemetaan atas program yang akan menjadi target kinerja PD



Gambar 3.10 Pemetaan program menjadi target kinerja OPD

**4.** Menetapkan IKU pada level PD dilengkapi dengan definisi operasional, sumber data dan formulasi perhitungan yang tepat serta menjadikan IKU tersebut sebagai dasar penyusunanan perencanaan kinerja;

#### Tindak Lanjut:

❖ Telah dilaksanakan pendampingan penetapan IKU level Perangkat Daerah yang lengkap dengan definisi operasional, sumber data dan formasi perhitungan yang tepat, contoh pada Dinas Pariwisata.

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PARIMISATA DARRAH KOTA PALU
NOMOR :556/06/III/DISPAR/2023
TENTANG
INDIKATOR KINERUA UTAMA
DINAS PARIWISATA DARRAH KOTA
PALU

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PARIVISATA DABRAH KUTA PALU
NOMOR :556/06/HI/DISPAR/2023
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PABIPAISATA DARBAH KOTA

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA
1	2	3	4
ī	Meningkatnya ekuriomi kepariwisataan	Kuntribusi Pariwisata Terhadap PDRB	Rumus Statistik
2		Presentase Kunjangan Wisatawan	Church Kulongan irleationer tahun n-jumlah Kuchungan irleatairas cahun n-3 Jeniah Ningingan Mhatawan tahun n-1 € 1000

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA				
1 2 3		3	d				
1	Meningkatkan Pertumbuhan dan Daya Saing Sektor Ekonomi Potensial	Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB	NGai PORE Sektor Fariwischi x 100% Juniah PORE				
2	Daecah	Presentase Kunjungan Wisara	jumbel wisotawan telesi n-jumbel ofsetaman zickom.jii x 100% jumbel Wisotowan telesi n-t x 100%				

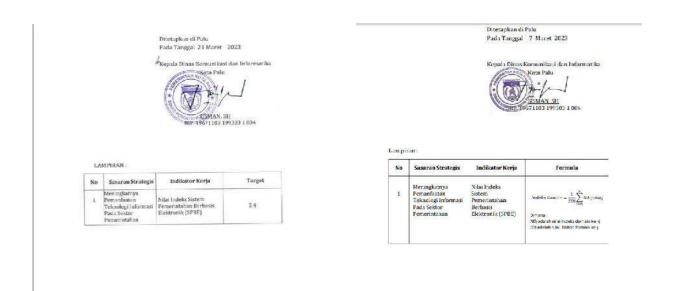
Palu. 06 Maret 2023

PIE. KEPALA DINAS PARIWISATA DARRAH KOTA PALU

Dr. KI HYOMAN SUHERMI, M.A.M.P.
NJ. 1870/2019 199/203 2 002



Gambar 3.11 IKU Dinas Pariwisata Sebelum & Setelah Perubahan

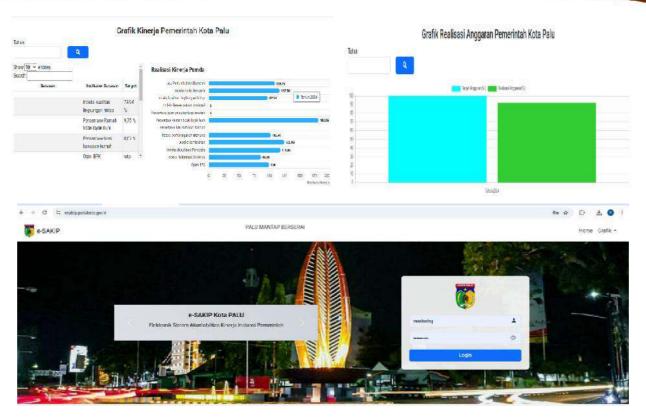


Gambar 3.11 IKU Dinas Kominfo Sebelum & Setelah Perubahan

**5.** mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi E-Sakip Kota Palu diikuti dengan sosialisasi kepada seluruh PD, dan memantau kepatuhan pengisian seluruh PD di aplikasi tersebut sebagai bagian dari proses pengumpulan data serta pengukuran kinerjanya secara real time.

#### Tindak Lanjut:

Telah dilaksanakan desk e-SAKIP dengan mengundang 41 OPD Melakukan pemantauan secara berkala terhadap kepatuhan perangkat daerah dalam mengumpulkan data dan mengupload pada aplikasi e-sakip



Gambar 3.12 Aplikasi e-SAKIP, Grafik Kinerja dan Realisasi

#### Anggaran Pemerintah Kota Palu

**6.** Meningkatkan kualitas laporan kinerja terutama pada perangkat daerah dengan memastikan keandalan dalam pengolahan dan analisis data kinerja, serta menyajikan analisis secara mendalam tentang faktor faktor yang mempengaruhi ketercapaian / tidak tercapainya kinerja organisasi pada setiap sasaran;

### Tindak Lanjut:

❖ Telah dilakukan pendampingan penyusunan laporan kinerja Perangkat Daerah sesuai Permenpan 53 Tahun 2014





**Gambar 3.13** pendampingan penyusunan laporan kinerja Perangkat Daerah sesuai Permenpan 53 Tahun 2014

7. Menggunakan informasi laporan kinerja sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam perbaikan perencanaan kinerja dan penetapan target kinerja tahun berikutnya

# Tindak Lanjut:

Telah dilakukan pengambilan kebijakan perbaikan perencanaan kinerja dan penetapan target kinerja berikutnya



**Gambar 3.14** Perbaikan Perencanaan Kinerja Dan Penetapan Target Kinerja Tahun Berikutnya

**8.** Melakukan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP unit kerja secara berkala, sehingga mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan PD.

#### ❖ Tindak Lanjut

mendorong OPD untuk melaksanakan perbaikan sesuai rekomendasi hasil evaluasi AKIP internal





**Gambar 3.15** Melaksanakan Perbaikan Sesuai Rekomendasi Hasil Evaluasi Akip Internal

**9.** Mendorong Inspektorat Kota Palu untuk menyusun rekomendasi yang spesifik dan relevan sesuai dengan masalah yang dihadapi masing-masing PD dan melakukan fungsi asistensi terkait tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh PD.

# Tindak Lanjut:





- **Gambar 3.16** Penguatan tim evaluator internal, yang dihadiri oleh Sekretaris daerah kota Palu, Asisten administrasi umum, Inspektur inspektorat,kepala Bappeda, Kepala Bagian Organisasi.
- **10.** Menyusun kebijakan *reward and punishment* dengan memanfaatkan hasil evaluasi SAKIP internal sehingga dapat menjadi penyemangat setiap PD untuk mendorong peningkatan kualitas implementasi SAKIP.

#### Tindak Lanjut:

❖ telah disusun kebijakan *reward and punisment* dengan menambahkan point pada Perwali Tambahan Penghasilan Pegawai ASN. Hal ini diatur dalam Perwali Kota Palu Nomor 33 Tahun 2024, Pasal 21.

Bagian Kedua
Penilaian Produktivitas Kerja
Pasal 21...

Pasal 21

(1) Penilaian produktivitas kerja meliputi:
a. pelaksanaan tugas dengan bobot 80% (delapan puluh persen) dari penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1);
b. capaian kinerja fisiak dan kinerja keuangan Perangkat Daerah dengan bobot masing-masing 5% (lima persen) dari penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1); dan
c. capaian nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan bobot 10% (sepuluh persen) dari penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
(2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hiruf a meliputi:
a. uraian tugas iabatan;
b. indikator kinerja individu.
(3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selaras dengan indikator kinerja individu atasan langsung secara berjenjang sesuai dengan jabatannya untuk mencapai kinerja output/outcome.
(4) Setiap ASN wajib membuat laporan produktivitas kerja setiap bulan mengacu pada pelaksanaan tugas dan kinerja proses bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat secara elektronik atau manual setiap hari kerja.
(6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat secara elektronik atau manual setiap hari kerja.

Pasal 22

(1) Laporan produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan capaian pelaksanaan tugas dan capaian kinerja fisik dan kinerja keuangan Perangkat Daerah, dengan ketentuan:
a. >60% kategori baik;
b. >40% sampai dengan 60% kategori cukup;
c. >30% sampai dengan 40% kategori sedang; dan d. 0 sampai dengan 30% kategori kurang.

(2) Besaran TPP produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
a. capaian pelaksanaan tugas dan capaian kinerja fisik dan kinerja keuangan Perangkat Daerah kategori baik sebesar 100% (seratus persen) dari nilai produktivitas kerja;

#### Gambar 3.17 Perwali TTP

11. Meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi internal agar mampu menggunakan instrumen evalusi secara maksimal, menerapkan professional judgement secara tepat, memberikan kesimpulan hasil evaluasi yang menggambarkan kondisi real penerapan SAKIP di setiap PD sehingga rekomendasinya dapat memacu perbaikan akuntabilitas kinerja PD

#### Tindak Lanjut:

Melakukan Bimtek guna menigkatkan kapasitas evaluator. sebagaimana telah tersedia anggarannya pada dokumen anggaran pada Bagian Organisasi, Setda Kota Palu dan dokumen anggaran pada Inspektorat Kota Palu.

Rp123.660.000,00

		and Programmer of the Commission of the					100	5.1.02.84	mannife La	Jalanan Dinas						
Pembawi	ium Narasumber atau ia Acera, dan Penille	Pembahas. Moderator,	2 Orang x 8	Orang /	Ro900.000.00	0% Rp	14,480,000,00	5.1.02.04.01	Betanja Per	jalanan Dinas Dalan	n Negeri					Pgr123.666,80
100000000000000000000000000000000000000	ss: Honorsrium Nersi h/yang disetarakan	umber Pejabat Eselan III	Jam x 1 Kali	Jam	P(39001.000/3C	U76 PAG	214,460.000,00	5.1.02.04.01.0001	1 Belanja Pa	jalanan Dinas Biasa	· ·					Rp102.560.00
[#]Pola	atihan Kantor Sendi Dana: Dena Alokasi					R	Rp7_200.000,00			Perjalanan Dinas Na na: Dana Alokasi Un					-7	Rp8.125.00
[-] Pelat	tihen Kantor Sendir	(PKS)				R	&p7,200,000,00			William Company of the Company	ium (DAO)			-	_	D 0 101 10
Pombawa Spesifika	ro Acara, dan Panitia	Pembahas, Moderator, sumber Pejabat Ession III	2 Grang x 4 Jam x 1 Kall	Orang / Jam	Rpsc0.000,00	0% R	Rp7.200.000,00		Jakarta	Ession III / Golongan	N Tiled Persont	1 Orang x 1 Kali	Orang /	Rp5.113.000,00	0%	Rps.125.00
		osialisasi, Bimbingan Tel	knis serta Pendi	dikan dan	Pelatihan	Rps	418.625.800,08		100000000000000000000000000000000000000		TE, THOUT GOODEL		100			
CONTRACTOR CONTRACTOR	Kursus Singkat/Pela	and the second section where the part of the second			real/seasons	Rpf	418.625.000,00		Sulawesi To		W. 10. To 12. To 20.	1 Crang x 2	Orang /			
	[ # ] Bimbek Peningkatan Kapabilitas APIP (128 Jam/Tahun) Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAW)			Rp3	390.000.000,00		Spesifikasi: Penginapar	Ession IV / Golongan	III / II / II / Non ASN,	Hari x 1 Kall	Hari	Rp951.000.00	0%	Rp1.902.000,		
( - ) Etimys	ya Kontribuai					RpS	390.000.000,00		Sulawesi Te	noah		1 Orang x 3	Orang /			71 -
	Singkat/Petatihan asi: Kontribusi Kursus	SingkavPelathan	25 Orang s: 4 Kali	Orang	Rp3.900.000,00	0% Rp3	390.000.000,00		S. auditoria	Uang Harian		Harl x 1 Kall	Hari	Rp370.000,00	0%	Rp1.110.00
[#] Kom		UNIVERSITY - ANNUALS	run			B	Rp9.600.000,00		Service and March	Peningkatan Kapat na: Dana Alokasi Us	num (DAU)	/Tahun)				Rp66.000.0
	Dans: Dana Alokas ya Kontribusi	Omum (DAU)					90,000,000,00	-		larian Dikiat						Rp66,000.0
	Singkat/Pelatihan	4					490.000.000,00			CONTRACTOR OF THE PARTY OF	Table Angura Coro	Total Control			-	npoa.occ.
	asi: Kontribusi Kursus il & Penjenjangan Jab	Singkat/Pelatinan atan Fungsional (Auditor)	1 Orang x 1 Kali	Crang	Rp9.600.000,00	0% R	Rp9.606.000,00		Uang Hana Spesifikasi	n Perjalanan Dinas Di Dikiat	alam Negeri	25 Orang x 2 x 2 Kali	Orang / Hari	Rp110.000,00	0%	Rp11.000.0
10000000	ntribusi Penjenjanga r Dena: Dana Aloksa	NAME OF TAXABLE PARTY.		93		R	p19.025.000,00		100000000000000000000000000000000000000	n Perjalanan Dinas D	alam Negeri	25 Orang x 5	Orang I	Rp110.000,00	0%	Rp55.000.0
	ya Kontribusi						p19.025.000,08		Spesifikasi	Diklat.		Hari x 4 Kati	Hari			
W			1 Orang x 1 Kali	Orang	Rp19.026.000,00	0% RE	p19.028.000,88		[#] CGCA						ij	Rp17.550.0
	Singkal/Pelatihan asi: Kontribusi Kursus	: Singkat/Pelatihan			l				Sumber Da	na: Dana Alokasi Ur	num (DAU)					S=
	asi: Kontribusi Kursus			Dallon Co	UN 1455.5	1301			Sumber De	ine: Dana Alokasi Ur	num (DAU)			(0)		
	asi: Kontribiusi Kursus	Singkat/Polatikan Cranjo Haybanan unun Cranjo Haybanan untuk	refleren venier.	NAME AND DESCRIPTION OF THE PERSON OF THE PE		NAME OF TAXABLE PARTY.		500.000		na: Dana Afokasi Ur	num (DAU)					
	asi: Kentribiusi Kuraus	coule work bound in which i	Kegiatan Kantor	NAME AND DESCRIPTION OF THE PERSON OF THE PE		000		500.000		15:300.000	num (DAU)		3.000.000			10.800.00
	asi: Kontribiusi Kuraus	cianje Aasybanan union Banje Alat/Bahan untuk	Kegjatan Kantor Uman Rapat	Bahan Po	500.0	000					num (DAU)		3.000.00			10.800.00
Spesitiva	as: Kontribusi Kursus 0 0 0 0 0 0 0	cionjo magnenarrumur. Banja Mat/Baharruntuk i Banja Makanar dan Win	Kegiatan Kantor Kegiatan Kantor uman Rapat uman Jamuan Ta	Bahan Po imu	\$ 500.0 \$0.900.0 1,000.0	000		1,800,000			num (DAU)		3,000,000			-0.1001
Spesitiva	ae: Kontribual Kursus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	elanja Matj Bahar umur. elanja Makanar dan Win elanja Makanar dan Win elanja Makanar dar Min konorarium Narasumber a	Kegiatan Kantor Kegiatan Kantor uman Rapat uman Jamuan Ta	Bahan Po imu	\$ 5000 \$09000 1,0000	000 000 000		1,800,000			num (DAU)		3.000.000			
	as: Kontribusi Kursus 3 8 8 8 8 8	elanja Matj banar umut. elanja Makanar dan Min elanja Makanar dan Min onorari um Narasumber a embawa Acara, dan Panli	ncepasan namur Kepatan Kantor- uman Rapat uman Jamuan Ta uman Jamuan Ta uman Jamuan Ta	Bahan Po imu	\$ 500.0 \$0,900.0 1,000.0 47,400.0	000 000 000 000		1,800,000		15.300,000		10.655,000	3.000.00i			10.800.00 13.000.00

**Gambar 3.18** DPA Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Evaluator dan DPA koordinasi dan penyusunan LAKIP.

# 3.7 Analisis Efesiensi Penggunaan Sumber Daya

Aspek efesiensi penggunaan sumber daya yang dimaksudkan dalam laporan kinerja ini adalah membandingkan antara capain target kinerja Tahun 2024 dengan realisasi angggaran Tahun 2024 dengan rincian realisasi capaian target kinerja Tahun 2024 pada tabel berikut:

Tabel 3.14
Perbandingan Target dan realisasi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2024	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Capaian Target (%)	Target Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi Anggaran 2024 (Rp)	Capaian Anggaran (%)
1	Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Sektor Ekonomi	Laju pertumbuhan ekonomi	4,20	4,61	109,76	67.411.448.811	58.253.986.903	86,42
2	Meningkatnya kualitas	Indeks risiko bencana	112,54	132,3	117,56	131.650.106.988	110.783.039.850	84,15
	lingkungan hidup dan kesiapsiagaan bencana	Indeks kualitas Lingkungan hidup	74,94	73,25	97,74	66.164.612.521	57.187.820.677	86,43
3	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	Indeks Kewaspadaan Nasional	62	75,09*	121,11	88.568.070.391	85.724.697.064	96,79
4	Meningkatnya struktur yang berketahanan	Persentase jalan yang berkeselamatan	6,27	4,50	71,77	139.611.892.602	118.206.252.628	84,67
		Persentase luas Kawasan kumuh	0,07	0,23	-128,57	80.720.737.394	67.047.361.727	83,06

		Persentase rumah tidak layak huni.	9,75	1,78	181,74	7.524.793.869	5.474.514.058	72,75
5.	Meningkatnya kualitas SDM	Indeks pembangunan manusia	82,10	84,12	102,46	649.571.684.714	626.839.819.518	96,50
6.	Menurunnya angka kemiskinan	Angka kemiskinan	4,75	5,94	74,95	22.093.143.850	17.022.737.992	77,05
7.	Meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan, kearifan lokal, dan kebangsaan	Indeks Aktualisasi Pancasila	70	83,2*	118,86	7.905.677.869	7.189.529.214	90,94
8.	Meningkatnya kualitas tata	Indeks Reformasi Birokrasi	86	74,03	86,08	526.286.442.812	429.461.989.860	81,60
	kelola Pemerintahan	Opini BPK	WTP	WTP	100	29.387.848.105	28.026.796.449	95,37

Sumber: Bappeda dan BPKAD Kota Palu Tahun 2024, diolah

Analisis efisiensi anggaran dapat dilihat dengan membandingkan ketercapaian target indikator sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasi anggaran pendukungnya. Tabel di atas menunjukkan kinerja fisik sasaran daerah secara keseluruhan pada tahun 2024 sebesar 87,79 % dan untuk realisasi anggaran mencapai 88,68 %, artinya anggaran yang ada belum digunakan secara optimal untuk mencapai target sasaran adapun pengurangan nilai tersebut karena adanya penggunaan perbandingan nilai terbalik pada indeks persentase luas kawasan kumuh yang cukup besar sehingga capaian kinerja fisik sasaran daerah turun jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya . Efisiensi anggaran tersebut merupakan upaya Pemerintah Kota Palu dalam penggunaan anggaran yang efektif dan berfokus pada *outcome* dan dampaknya terhadap pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Secara rinci efisiensi anggaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.15

Efisiensi Anggaran Pencapaian Target Sasaran Strategis Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2024	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Capaian Target (%)	Target Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi Anggaran 2024 (Rp)	Efisiensi Anggaran (%)
1.	Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Sektor Ekonomi	Laju pertumbuhan ekonomi	4,20	4,61	109,76	67.411.448.811	58.253.986.903	13,58
2.	Meningkatnya pengelolaan lingkungan	Indeks risiko bencana	112,54	132,3	117,56	131.650.106.988	110.783.039.850	15,85
	hidup dan kesiapsiagaan bencana	Indeks kualitas Lingkungan hidup	74,94	73,25	97,74	66.164.612.521	57.187.820.677	13,57
3.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	Indeks kewaspadaan nasional	62	75,09*	121,11	88.568.070.391	85.724.697.064	3,21
4.	Meningkatnya infrastruktur yang	Persentase jalan yang berkeselamatan	6,27	4,50	71,77	139.611.892.602	118.206.252.628	15,33
	berketahanan.	Persentase luas Kawasan kumuh	0,07	0,23	-128,57	80.720.737.394	67.047.361.727	27,25
		Persentase rumah tidak layak huni.	9,75	1,78	181,74	7.524.793.869	5.474.514.058	16,94

5.	Meningkatnya kualitas SDM	Indeks pembangunan manusia	82,10	84,12	102,46	649.571.684.714	626.839.819.518	3,50
6.	Menurunnya angka kemiskinan	Angka kemiskinan	4,75	5,94	74,95	22.093.143.850	17.022.737.992	22,95
7.	Meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan dan kearifan lokal dan kebangsaan	Indeks Aktualisasi Pancasila	70	83,2*	118,86	7.905.677.869	7.189.529.214	18,40
8.	Meningkatnya kualitas tata	Indeks Reformasi Birokrasi	86	74,03	86,08	526.286.442.812	429.461.989.860	4,63
	kelola Pemerintahan	Opini BPK	WTP	WTP	100,00	29.387.848.105	28.026.796.449	15,33

Selanjutnya, program yang mendukung pencapaian indikator sasaran Tahun 2024 diuraikan dalam Tabel 3.15 di bawah ini :

Tabel 3.16

Program dan Realisasi Anggaran Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024

NO	IKU DAN PROGRAM	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi		67.411.448.811	58.253.986.903
	Dinas Pariwisata	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	823.459.250	360.390.410
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.925.196.907	4.711.265.759
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	284.877.600	224.904.000
		Program Pemasaran Pariwisata	3.277.069.350	2.878.444.881
	Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	4.810.000	4.810.000
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	63.209.900	0

	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	531.572.540	333.245.223
	Program Pengembangan Umkm	6.216.673.092	4.463.338.450
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.708.824.019	5.104.702.105
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	538.925.000	74.766.000
	Program Penempatan Tenaga Kerja	53.224.250	52.666.650
	Program Hubungan Industrial	248.475.100	167.753.100
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	35.700.000	29.750.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.644.773.421	6.246.444.587
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2.620.450.800	2.483.523.740
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	899.230.000	816.345.000
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	182.215.000	158.099.064
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	2.181.458.242	1.393.889.248

	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	39.900.000	33.950.000
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	21.517.200	21.517.200
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1.225.000	1.225.000
	Program Promosi Penanaman Modal	76.000.000	75.865.260
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	592.729.750	583.799.750
Kawasan Ekonomi Khusus	Program Promosi Penanaman Modal	90.239.000	92.214.400
	Program Pelayanan Penanaman Modal	195.801.000	178.701.000
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	2.929.113.560	2.898.751.616
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	1.225.000	1.225.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	76.000.000	75.865.260
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Pelayanan Penanaman Modal	119.575.600	119.414.300

	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	60.175.000	45.175.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.725.389.301	5.514.515.732
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.653.667.000	1.635.792.360
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.299.247.400	771.832.649
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	141.078.200	78.749.800
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.078.352.500	2.231.424.415
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	327.097.000	257.773.140
	Program Perizinan Usaha Pertanian	11.242.250	11.242.250
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.739.507.235	13.351.202.382
	Rogram Penanganan Kerawanan Pangan	61.809.850	13.806.390
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	9.266.800	7.316.300

		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	391.588.244	290.197.594
		Program Penyuluhan Pertanian	360.989.350	307.002.100
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	245.793.100	228.180.048
2	Indoha Bisiha Banasa		121 650 106 000	110 702 020 050
	Indeks Risiko Bencana		131.650.106.988	110.783.039.850
	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	184.034.200	94.834.000
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.195.952.745	5.880.300.957
		Program Penataan Bangunan Gedung	505.539.750	414.363.350
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	36.785.200	35.930.200
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	20.795.250	18.195.250

		Program Penatagunaan Tanah	106.335.000	104.788.381
	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	662.792.700	623.023.856
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.575.638.547	10.182.033.640
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana	10.575.638.547	10.182.033.640
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	881.722.960	4.860.708.379
	Dinas Pekerjaan Umum	Program Penataan Bangunan Gedung	5.242.092.956	4.860.708.379
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		66.164.612.521	57.187.820.677
	Dinas Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	423.092.700	382.721.128
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	637.788.550	539.695.061
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	10.215.188.650	8.035.174.150

		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	124.653.050	40.385.600
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	2.788.389.200	2.579.409.220
		Program Pengelolaan Persampahan	39.146.870.810	34.363.800.455
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.828.629.561	11.246.635.063
4	Indeks Kewaspadaan Nasional		88.568.070.391	85.724.697.064
			88.308.070.391	85.124.091.004
	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	14.696.100.000	14.310.870.000
	Satuan Polisi Pamong Praja	Ketenteraman Dan Ketertiban		

		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	22.659.000	8.585.500
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	1.553.660.650	1.052.280.150
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	445.185.280	271.138.930
5	Persentase Jalan yang Berkeselamatan		139.611.892.602	118.206.252.628
	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	9.420.598.200	7.040.272.640
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.954.836.899	12.136.475.031
	Dinas Pekerjaan Umum	Program Penyelenggaraan Jalan	116.879.021.003	98.936.618.457
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	357.436.500	92.886.500
	_			
6	Persentase Rumah tidak layak huni		7.524.793.869	5.474.514.058

	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Program Pengembangan Perumahan	652.817.902	187887700
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.871.975.967	5286626358
7	Persentase Luas Kawasan Kumuh		80.720.737.394	67.047.361.727
	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Program Kawasan Permukiman	7.565.227.200	5.011.496.516
		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	8.121.884.300	1.865.587.202
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	52.589.724.499	49.210.748.721
	Dinas Pekerjaan Umum	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	2.054.269.600	2.028.207.655
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	5.867.823.240	5.218.641.778
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	268.686.400	212.235.800
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	4.253.122.155	3.500.444.055

8	Indeks Pembangunan Manusia		649.571.684.714	626.839.819.518
	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	105.672.045.562	100.256.896.638
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	88.032.600	86.464.608
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	339.092.799.006	333.641.661.479
		Program Pengembangan Kebudayaan	10.464.469.311	10.420.267.680
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	392.993.766	391.146.666
	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	73.933.782.879	69.883.283.488
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.147.273.800	877.711.750
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	426.900.850	476.910.000
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	4.038.433.250	4.070.870.122
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	85.605.234.749	81.049.278.211

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pengendalian Penduduk	288.462.500	275.215.300
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.663.662.536	6.163.261.263
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	2.934.861.511	2.462.786.301
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	2.669.669.860	2.403.063.660
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	7.163.050	5.226.100
	Program Perlindungan Perempuan	152.738.450	152.403.450
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	21.348.250	12.868.250
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.612.355.999	4.612.355.999
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	21.935.750	20.930.000
	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	105.891.000	103.642.600

		Program Perlindungan Khusus Anak	6.778.750	6.778.450
	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	6.126.738.800	5.162.257.240
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	193.886.200	192.130.200
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.904.226.285	4.112.410.063
9	Angka Kemiskinan		22.093.143.850	17.022.737.992
	Dinas Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	618.914.750	611.889.750
		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	23.520.000	23.423.340
		Program Rehabilitasi Sosial	776.184.950	629.510.100
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	12.756.315.250	8.106.949.275
		Program Penanganan Bencana	996.879.110	996.746.778
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.921.329.790	6.654.218.749
10	Indeks Aktualisasi Pancasila		7.905.677.869	7.189.529.214

	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	3.832.787.045	3.429.172.558
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.072.890.824	3.760.356.656
11	Indeks Reformasi		526.286.442.812	429.461.989.860
	Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	28.170.283.884	14.191.609.537
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	3.544.647.450	3.065.513.622
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	39.653.942.625	31.202.321.398
	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1.718.370.000	1.566.369.940
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	3.934.027.350	3.458.537.477
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.262.647.225	4.870.750.615
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	195.083.500	121.622.440

	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	108.758.250	95.299.583
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	Program Pengelolaan Arsip	45.972.100	45.972.100
	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	12.024.000	12.024.000
	Program Perizinan Penggunaan Arsip	3.850.000	3.850.000
	Program Pembinaan Perpustakaan	334.927.550	329.029.550
	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	5.785.000	5.785.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.200.000	5.400.000
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk	109.050.000	109.050.000
	Program Pencatatan Sipil	108.211.750	107.911.750
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	42.550.000	42.550.000
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	24.420.000	24.420.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.663.662.536	6.163.261.263

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	290.589.400	186.604.700
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.057.748.908	3.861.621.903
Badan Pendapatan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	9.007.854.700	7.759.537.872
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	25.704.163.559	19.916.911.712
Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumberdaya Manuasia Daerah	Program Kepegawaian Daerah	1.579.891.750	1.410.634.993
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.336.815.147	6.915.361.823
RSU. Anutapura	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	33.569.978.250	32.034.914.415
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	113.783.000	63.397.180
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	169.633.552.532	117.243.595.098

Sekretariat DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	17.508.121.500	16.592.150.932
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	169.633.552.532	117.243.595.098
Kecamatan Palu Selatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	17.508.121.500	16.592.150.932
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	29.888.327.732	27.924.092.355
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	8.425.350	5.925.350
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.774.553.700	8.650.086.977
Kecamatan Mantikulore	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	106.282.500	104.730.000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	9.487.447.360	8.995.093.213
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	23.356.800	21.156.800
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.292.319.161	10.241.328.623

Kecamatan Palu Barat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	232.450.000	229.950.000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	12.025.606.328	10.998.439.055
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	17.208.500	16.879.950
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.907.475.551	6.907.475.551
Kecamatan Palu Timur	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	281.996.000	251.566.000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	8.733.409.961	8.220.943.990
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	3.341.700	0
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.458.159.031	6.089.846.805
Kecamatan Tatanga	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	143.194.798	O
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	8.164.326.185	7.873.733.410
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	15.513.200	12.775.000

	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.639.631.625	7.304.757.639
Kecamatan Tawaeli	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	143.450.000	130.850.000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	8.981.548.605	8.426.875.747
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	18.519.850	18.519.850
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.602.838.524	7.517.114.100
Kecamatan Ulujadi	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	192.250.000	183.250.000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	7.185.141.915	6.661.063.406
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	21.211.600	21.211.600
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.114.379.760	8.923.938.173
Kecamatan Palu Utara	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	181.585.000	177.085.000

		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	8.344.701.457	7.866.341.027
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7.116.200	7.116.200
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.858.480.348	7.257.907.879
12	Opini BPK		29.387.848.105	28.026.796.449
	Inspektorat	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	34.513.450	32.938.450
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	693.124.300	645.521.892
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.961.677.617	10.543.927.648
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	4.539.232.650	4.410.244.501
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.445.435.200	1.409.553.087
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.713.864.888	10.984.610.871

#### 3.2 Realisasi Anggaran

Berpedoman pada indikator makro ekonomi dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, maka strategi kebijakan fiskal sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu Tahun 2021-2026 diarahkan kepada:

- 1. Mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari sumbersumber Pendapatan Asli Daerah melalui ekstensifikas;
- 2. Mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan;
- 3. Meningkatkan efisiensi pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dari sisi belanja dengan pendekatan money follow program berbasis *outcome*;
- 4. Meningkatkan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi; dan
- 5. Meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 1.832.026.953.429,00 dengan rincian sebagai Berikut:

#### 1. Pendapatan

Berdasarkan APBD Kota Palu Tahun 2024 pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada adnya peningkatan pendapatan melalui intensifikasi yang berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada Tahun 2024 pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp. 1.832.026.953.429. Adapun laporan realisasi pendapatan sebagai berikut :

Tabel 3.17 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Palu Tahun 2024

URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4
PAD	534.606.500.974	404.591.063.079,64	75,68
Pendapatan Transfer	1.274.115.401.003	1.276.918.837.070	100,22
Lain-lain Pendapatan yang Sah	23.305.051.452	21.102.038.891	90,55
Total	1.832.026.953.429	1.702.611.939.040,64	92,94

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palu, Tahun 2025

Tabel 3.17 menguraikan capaian PAD belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Tahun 2024 yakni sebesar Rp. 534.606.500.974 Realisasi PAD sebesar Rp 404.591.063.079,64 atau sebesar 75,68%. Realisasi pendapatan transferTtahun 2024 sebesar Rp. 1.276.918.837.070 atau mencapai 100,22% dari target yang direncanakan. Untuk realisasi lain-lain pendapatan yang sah hanya terealisasi sebesar Rp. 21.102.038.891 atau terealisasi 90,55 %.

#### 2. Belanja Daerah

Belanja Daerah APBD Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan pendekatan program dan kegiatan berbasis *outcome*. Hal ini dilakukan untuk mencapai visi misi pemerintah daerah yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan. Kebijakan Belanja daerah secara deskriptif dapat dituangkan ke dalam Tabel 3.18:

Tabel 3.18 Komposisi Belanja Pemerintah Kota Palu Tahun Anggaran 2024

No	URAIAN	TAHUN ANGGARAN REALISASI			
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%	
	1	2	3	4	
1	Belanja Operasi	1.491.126.825.449,31	1.404.696.843.083,36	94,20	
2	Belanja Modal	361.575.616.149,99	307.620.714.321	85,08	
3	Belanja Tak terduga	750.000.000,00	46.601.050,00	6,21	
	Total Belanja	1.853.452.441.599,30	1.712.364.158.454,36	92,39	

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palu, Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 3.18 di atas, diuraikan bahwa belanja Tahun 2024 sebesar Rp. 1.853.452.441.599,30 yang terdiri atas belanja operasi sebesar Rp. 1.491.126.825.449,31,-, belanja modal sebesar Rp. 361.575.616.149,99,-, dan belanja tak terduga sebesar Rp. 750.000.000,00,-. Sementara untuk realisasi belanja sebesar Rp. 1.712.364.158.454,36,-atau 92,39% yang terdiri atas belanja operasi sebesar Rp. 1.404.696.843.083,36, belanja modal sebesar Rp. 307.620.714.321,-, dan belanja tak terduga sebesar Rp. 46.601.050,00,-

#### 3. Pembiayaan

Sumber penerimaan pembiayaan daerah Tahun 2024 berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.19 berikut ini :

Tabel 3.19 Pembiayaan Pemerintah Kota Palu Tahun Anggaran 2024

No	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2024		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
	1	2	3	4
1	Penerimaan Daerah	21.425.488.170,3	21.425.488.170,3	100%
2	Pengeluaran Daerah	0	0	0%
	Pembiayaan Netto	21.425.488.170,30	21.425.488.170,30	100%

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palu, Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 3.19 di atas, penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2024 yang ditargetkan sebesar Rp. 21.425.488.170,30 terealisasi sebesar Rp. 21.425.488.170,30 atau 100% dan pengeluaran pembiayaan daerah yang ada dianggaran belanja tahun 2024 sebesar Rp. 0,-, atau tidak dianggarkan.

### 3.3 INOVASI PEMERINTAH KOTA PALU

Berdasarkan hasil pengukuran indeks inovasi daerah oleh Kementrian Dalam Negeri RI sesuai keputusan Menteri Dalam Negeri No. 400.10.11-4898. Tahun 2024 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2024 telah ditetapkan skor Indeks Inovasi Kota Palu sebesar 55,91 dengan predikat "Inovatif".

Pencapaian skor Indeks Inovasi Daerah tersebut di atas lebih tinggi dari target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu 60 sehingga angka capaian kinerja sasaran strategis mencapai 93,18 % dengan predikat sangat berhasil. Pencapaian sasaran strategis diatas diperoleh berdasarkan reperesentasi dari jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan oleh perangkat daerah lingkup Kota Palu selama kurun waktu dua tahun terakhir yang menjadi tolak ukur penilaian indeks inovasi trata Kelola pemerintahan maupun pelayanan publik yang jumlah usulan inovasi daerah sebanyak 16 usulan, 13 usulan diantaranya ditetapkan menjadi kebijakan inovasi daerah dengan status penerapan dan menjadi tolak ukur pengukuran indeks Kota Palu meliputi :

Tabel 3.19 Rekapitulasi Penerapan Kebijakan Inovasi Daerah yang Dilaporkan Tahun 2024

No	Nama Inovasi	Bentuk Inovasi	OPD Pelaksana
1	Nabelo Inovasi Program Layanan Kesehatan pada Sistem Pendaftaran Pasien secara Online	Pelayanan publik	Dinas Kesehatan Kota Palu
2	Rumah singgahnompieli ntodea	Pelayanan publik	Dinas Kesehatan Kota Palu
3	Program pemeliharaan pohon pelindung jalan	Pelayanan publik	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu
4	Pelayanan elektronik mantap bergerak	Pelayanan publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu
5	Kelurahan berbasis Agrowisata Tematik (KELURAHAN	Pelayanan publik	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu

	BERSINERGI)		
6	Bos keren	Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu
7	Keliling Layanan di Sekolah Gratis (KALEDO Gratis)	Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu
8	Sistem Percepatan Informasi Administrasi Kependudukan melalui Chatbot (SIRATUBOT)	Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu
9	Pelayanan Keliling bagi Masyarakat Rutan dan Lapas (PAKAI MASKERLA)	Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu
10	Kelurahan Sadar Administrasi Kependudukan yang Bersih, Gratis dan Praktis (KASIKU BERGERAK)	Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu
11	Layanan Mobile Pernikahan Dukcapil dengan KUA Se-Kota Palu (LAMAR AKU)	Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu
12	Klinik Perencanaan Pembangunan Daerah (KENCANA BANGDA)	Pelayanan Publik	Achmad Arwien Afries
13	Pelayanan Terintegrasi di Kecamatan (PELANGI DI KECAMATAN)	Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu
14	Palu Kota Kelor Indonesia (PAKKULI)	Pelayanan Publik	Badan Perencanaan Pembangunan Kota Palu
15	Sistem Informasi GIS Kota Palu (SIGISKA)	Tata kelola Pemerintahan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu
16	Tatopomu	Pelayanan Publik	Badan Perencanaan Pembangunan Kota Palu



# BAB IV

### **PENUTUP**

#### A. KESIMPULAN

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Pemerintah Kota Palu Tahun 2024 ini, merupakan bentuk akuntabilitas kinerja dan penggunaan sumber daya dalam lingkup tugas dan fungsi pemerintah kota Palu selama tahun 2024. LAKIP ini memuat hasil pengukuran kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran strategis RPJMD dan perjanjian kinerja Wali Kota Palu tahun 2024. dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kota Palu telah memperlihatkan pencapaian kinerja atas sasaran-sasaran strategis yang ditargetkannya. Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap Capaian kinerja (performance results) Pemerintah Kota Palu Tahun 2024 menggambarkan bahwa capaian kinerja Pemerintah Kota Palu selama Tahun 2024 menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan yang tertuang didalam RPJMD Pemerintah Kota Palu Tahun 2021-2026 dengan Sasaran strategis sebanyak 8 (delapan) sasaran sebagaimana yang telah ditargetkan, sedangkan target yang digunakan sebagai dasar pengukuran mencakup 12 indikator kinerja sasaran. Capaian dari 8 sasaran yang meliputi tujuh indikator kinerja sasaran di atas 100%, sementara satu indikator nilai – 128,57% karena perbandingan berbalik nilai yang dimaknai jika nilai bertambah atau polarisasi negatif. Polarisasi negatif yakni jika capaiannya lebih besar daripada target, maka persentase capaiannya akan berkurang. Selanjutnya, terdapat empat indikator capaian di bawah 100%. Secara keseluruhan indikator kinerja sasaran Pemerintah Kota Palu Tahun 2024 tercapai dengan rata-rata capaian sebesar 87,79 % dan untuk realisasi anggaran mencapai 88,68 %.

Pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kota Palu didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja dalam APBD Pemerintah Kota Palu Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 1.832.026.953.429 dengan realisasi sebesar Rp.

425.693.101.970,64 atau 23,24%, proses perencanaan dan penganggaran yang lebih fokus, tematik, holistik, dan integratif. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD 2021-2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2024, telah tercapai sesuai dengan target yang telah diperjanjikan.

Hal ini bisa memberikan gambaran bahwa implementasi perencanaan anggaran yang berbasis sasaran telah berjalan dengan baik. Olehnya, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan evaluasi internal menjadi kunci utama dalam pencapaian target kinerja serta mendukung efektivitas serta efisiensi dalam penggunaan anggaran Tahun 2024.

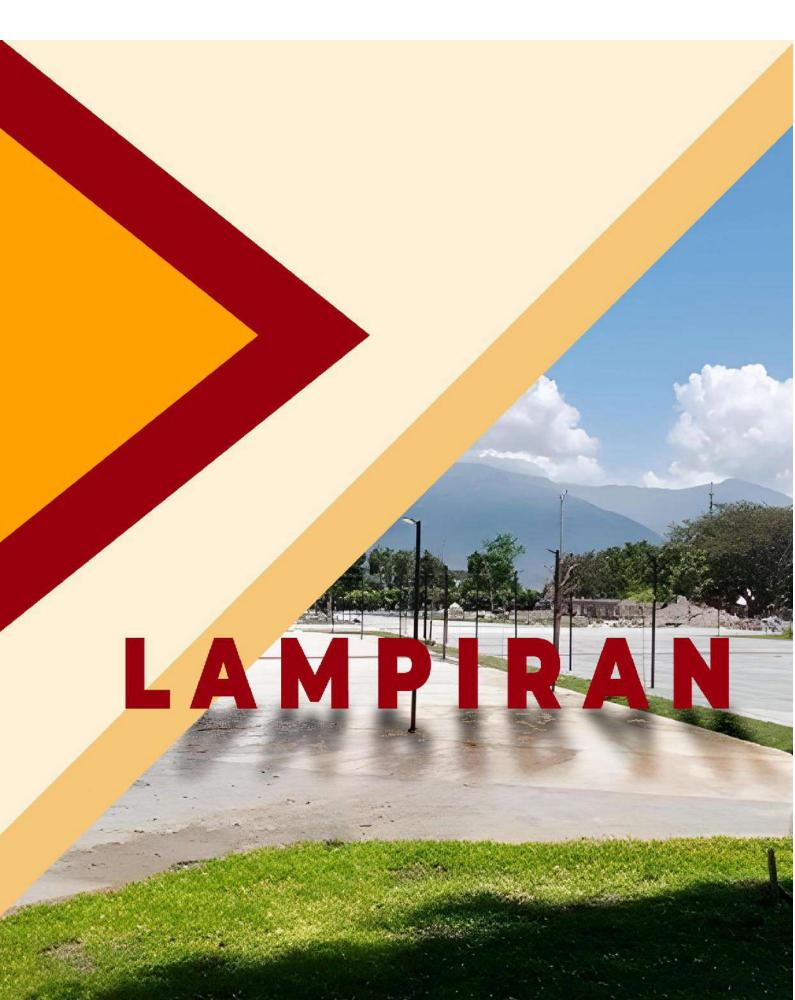
Demikian Laporan Kinerja Pemerintah Kota Palu Tahun 2024 ini dibuat. Secara garis besar disusun dalam rangka untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Palu di masa yang akan datang.

#### **B. LANGKAH SELANJUTNYA**

Capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah kota Palu tahun anggaran 2024, dapat diuraikan beberapa langkah korektif yang akan menjadi arahan kebijakan dalam perencanaan tahun anggaran 2025, antara lain sebagai berikut :

- 1. Perlu dilakukan peningkatan kinerja perangkat daerah dengan menyusun penjenjangan kinerja hingga ke level jabatan pengawas serta mendistribusikan tugas dan peran melalui penyusunan matriks peran dan hasil kerja pada jabatan pelaksana dan fungsional.
- 2. Perlu pemanfaatan anggaran secara efisien guna menunjang target sasaran yang telah ditetapkan dengan menyusun *logical framework* pada setiap program dan kegiatan.
- 3. Perlu dilakukan optimalisasi kinerja dan manajemen kepegawaian untuk mencapai tingkatan pelaksanaan tugas dan fungsi bagi seluruh ASN Pemerintah kota Palu.
- 4. Mendorong pemanfaatan teknologi informasi yakni sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam melaksanakan tugas untuk menunjang sistem kerja yang efektif sehingga target kinerja bisa dicapai secara optimal.

Akhir kata dengan disusunnya laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Palu diharapkan dapat memberikan informasi secara memadai kepada publik serta pihak-pihak. Semoga laporan ini dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan maupun merencanakan pembangunan serta penyelesaian isu-isu strategis dengan lebih efektif dan efesien.





# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 PEMERINTAH KOTA PALU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: H. HADIANTO RASYID, S.E

Jabatan : Wali Kota Palu

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Palu, 27 Februari 2024 WALI KOTA PALU

H. HADIANTO RASYID, S.E

# Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2024

## Pemerintah Kota Palu

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing sektor ekonomi	1.	Laju bertumbuhan ekonomi	4,20
2.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kesiapsiagaan bencana		Indeks risiko bencana	112,54
			Indeks kualitas Lingkungan hidup	74,94
3.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	4.	Indeks Kewaspadaan Nasional	62
		5.	Persentase jalan berkeselamatan	6,27
4.	<b>4.</b> Meningkatnya infrastruktur yang berketahanan		Persentase luas Kawasan kumuh	0,07
		7.	Persentase rumah tidak layak huni.	9,75
5.	Meningkatnya kualitas SDM	8.	Indeks Pembangunan Manusia	82,10
6.	Menurunnya angka kemiskinan	9.	Angka kemiskinan	4,75
7.	Meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan, kearifan lokal, dan kebangsaan	10.	Indeks Aktualisasi Pancasila	70
8.	8. Meningkatnya kualitas tata kelola		Indeks Reformasi	86
	Pemerintahan	12.	Birokrasi Opini BPK	WTP

No	IKU	Pagu Anggaran	Ket
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Rp. 67.411.448.811	_
2.	Indeks Risiko Bencana	Rp. 131.650.106.988	_
3.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Rp. 66.164.612.521	-
4.	Indeks Kewaspadaan Nasional	Rp. 88.568.070.391	_
5.	Persentase Jalan yang Berkeselamatan	Rp. 139.611.892.602	-
6.	Persentase Luas Kawasan Kumuh	Rp. 80.720.737.394	_
7.	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	Rp. 7.524.793.869	_
8.	Indeks Pembangunan Manusia	Rp. 649.571.684.714	_
9.	Angka Kemiskinan	Rp. 22.093.143.850	_
10	Indeks Aktualisasi Pancasila	Rp. 7.905.677.869	_
11.	Indeks Reformasi Birokrasi	Rp. 526.286.442.812	_
12.	Opini BPK	Rp. 29.387.848.105	-



## WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU NOMOR: 800/110/ORGANISASI/2023

## TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PALU NOMOR 800/116/ORGANISASI 2022 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA PALU TAHUN 2021-2026

#### WALI KOTA PALU,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Palu, perlu dilakukan penyesuaian indikator kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Palu yang berdampak pada perubahan baik penambahan maupun pengurangan indikator kinerja utama;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Palu tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Palu Nomor 800/116/org/2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palu Tahun 2021- 2026.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Nomor 39
   Tahun 2006 tentang Tata cara pengendalian dan
   evaluasi pelaksanaan Rencana pembangunan
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
   2007 Nomor 4663);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Atas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80)
- 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842)
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1981);
- 11. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 4, Tumbangan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);
- 12. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);
- 13. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 11);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Keputusan Wali Kota Palu tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Palu Nomor 800/116/org /2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palu Tahun 2021- 2026.

KESATU

Melakukan perubahan atas keputusan Wali Kota Palu Nomor 800/116/ORG/2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palu Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu merupakan ukuran keberhasilan yang mengambarkan kinerja utama organisasi perangkat daerah Pemerintah kota Palu sesuai tugas fungsi serta mandat yang diemban.

KETIGA

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu pada tanggal 27 Februari 2023

I KOTA PALU,

DIANTO RASYID

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA PALU TAHUN 2024

LAMPIRAN

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA

PALU

NOMOR: 800/116/ORGANISASI/2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA PALU

TAHUN 2021 - 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula	Penanggung Jawai
Meningkatnya     pertumbuhan     dan daya saing     sektor ekonomi     potensial     daerah	Laju     pertumbuhan     ekonomi	R = GNPt-1 GNPt-GNPt-1 x 100%	Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas PMPTSP, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus.
2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kesiapsiagaan bencana	2, Indeks risiko bencana	DR = H x V (Risiko Bencana = Bahaya x Kerentanan)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Pekerjaan Umum.
	3. Indeks kualitas lingkungan hidup	IKLH = (30%xIndeks Kualitas Air + 30%x Indeks Kualitas Udara + 40% x Indeks Kualitas Tutupan Lahan)	Dinas Lingkungan Hidup.
3. Meningkatnya keamanan dan	Indeks     kewaspadaan     nasional	Perhitungan dari Dirjen	Badan Kesbangpol, dan Satuan Polisi Pamong Praja.

ketertiban lingkungan		Politik dan PUM Kemendagri	
4. Meningkatnya infrastruktur	5. Persentase jalan yang kerkeselamatan	Panjang jalan Kota yang memenuhi standar keselamatan / panjang jalan kota x 100%	Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Perhubungan.
yang berketahanan	6. Persentase luas kawasan kumuh	Luas kawasan Permukiman kumuh (Ha) / Total Luas Wilayah (Ha) x 100%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Dinas Pekerjaan Umum.
	7. Persentase Rumah tidak layak huni	Jumlah rumah tidak layak huni / Jumlah Rumah di Kota Palu x 100%	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
5. Meningkatnya kualitas SDM	8. Indeks Pembangunan Manusia	Pertumbuhan IPM = (IPMt-IPMt- 1]x100 IPMt-1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Kesehatan, dan Dinas Pemuda & Olaraga.
6. Menurunnya angka kemiskinan	9. Angka kemiskinan	Persentase penduduk miskin = (jumlah penduduk miskin / jumlah penduduk total) x 100%	Dinas Sosial,
7. Meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan,	10. Indeks Aktualisasi Pancasila	Indeks Dj = $\frac{1}{n_j} (\sum X_i)$ Dj adalah Sila ke-j	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

kearifan lokal, dan kebangsaan		$n_j$ adalah banyaknya indikator di Sila ke-j $X_i$ adalah nilai indikator ke-i LAP = $\frac{1}{n}(\sum D_j)$ $D_j$ adalah nilai indeks Sila ke-j n adalah banyaknya sila (yang mana dalam IAP n=5)	
8. Meningkatnya kualitas tata Kelola Pemerintahan	I 1. Indeks Reformasi Birokrasi	RB = Nilai RB General + Nilai RB Tematik  Nilai RB General diperoleh dari: Nilai capaian strategi pelaksanaan RB General, Nilai tingkat implementasi kebijakan, Nilai capaian strategis.  Nilai RB Tematik diperoleh dari: Nilai strategi membangunn RB Tematik, Nilai capaian dampak RB Tematik.	Semua Organisasi Perangkat Daerah
	12. Opini BPK	Hasil Audit BPK	BPKAD, Inspektora







#### PIAGAM PENGHARGAAN PEMERINTAH KOTA PALU

1

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI menobatkan Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid sebagai Kepala Daerah Pendukung Pengelolaan Zakat Terbaik bersama 25 wali kota se-Indonesia.Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI menobatkan Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid sebagai Kepala Daerah Pendukung Pengelolaan Zakat Terbaik bersama 25 Wali Kota se-Indonesia.



29 Februari 2024

2

Pemerintah Kota Palu menerima penghargaan Piala Adipura Kategori Kota Sedang Tahun 2023. Adipura merupakan penghargaan sebagai kota yang berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan di Indonesia.



5 Maret 2024

3

Kota Palu menduduki urutan pertama se-Sulawesi Tengah, dalam capaian *Monitoring Center for Prevention* (MCP) tahun 2023.

Dalam hal ini, Kota Palu meraih skor tertinggi sebesar 83 di bandingkan seluruh daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah.



Kota Palu kembali meraih Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tahun 2024 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulteng. Pemkot Palu berhasil keluar sebagai peringkat pertama, penghargaan ini berkaitan dengan inovasi Pemkot Palu yang dinilai berhasil melaksanaan pembangunan daerah secara baik mulai dari menyiapkan perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian pembangunan daerah.



18 April 2024

5

Kota Palu kembali terbaik ke-2 Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2024 selama dua tahun berturut-turut oleh Kementerian PPN/ BAPPENAS RI. PPD diberikan oleh Kementerian PPN/BAPPENAS RI kepada Pemerintah Daerah atas prestasinya menghasilkan perencanaan yang berkualitas, pencapaian target-target pembangunan daerah, serta inovasi pembangunan yang telah dilakukan.



6 Mei 2024

6

Pemerintan Kota Palu meraih piagam penghargaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Penghargaan tersebut diberikan atas pencapaiannya memenuhi kelengkapan atribut pada sembilan variabel untuk mencapai Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) level 3 (proaktif).



13 Mei 2024

Pemerintah Kota Palu mendapatkan apresiasi dari Kemendikbudristek sebagai penerima penghargaan Kategori "Agen Perubahan Inspiratif"

Acarab ini digelar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI bekerja sama dengan Putera Sampoerna Foundation.



15 Mei 2024

8

Pemerintah Kota Palu kembali meraih prestasi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun anggaran 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulteng. Kota Palu dalam capaiannya, sudah 10 kali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian.



27 Mei 2024

9

Badan POM memeberikan Penghargaan kepada Dinas Kesehatan Kota Palu sebagai Instansi yang telah memberikan kepercayaan kepada pelayanan Publik Balai POM di Palu.



24 Juni 2024

Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Sulawesi Tengah memberikan Piagam Penghargaan kepada Dinas Kesehatan Kota Palu sebagai Instansi teraktif dalam pemenuhan layanan kesehatan bagia anak dan anak yang berhadapan dengan hukum.



31 Juli 2024

11

Pemerintah Kota Palu diwakili Sekretaris Daerah Kota Palu menerima penghargaan Paritrana Tahun 2023 sebagai Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota terbaik 1 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah.

Penghargaan bergengsi, Paritrana Tahun 2023, diserahkan atas capaian luar biasa pemerintah kabupaten kota dan desa dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS Tenaga Kerja) di Sulteng.



29 Agustus 2024

12

Kota Palu menjadi satu-satunya perwakilan dari Provinsi Sulawesi Tengah yang menerima penghargaan Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang memberikan penghargaan atas komitmen, inovasi, serta konsistensi dalam mengimplementasikan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) pada pemerintah daerah.



3 September 2024

13

Rumah Sakit Anutapura Palu meraih Piagam Penghargaan dari BPJS kesehatan sebagai "TERBAIK PERTAMA" Fasilitas Kesehatan Program JKN Tingkat Kedeputian Wilayah Tahun 2024 Kategori Rumah Sakit Kelas B



14

Rumah Sakit Anutapura Palu meraih Piagam Penghargaan sebagai " Terbaik Pertama " Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Berkomitmen dalam Pelayanan Kesehatan Program JKN Tingkat KC Palu Tahun 2024 Kategori Rumah Sakit B



**15** 

Pemerintah Kota Palu berhasil meraih Museum Rekor Indonesia (Muri) kategori Sajian Ikan Mujair Kuah Asam Terbanyak. Rekor Muri itu diberikan sebagai bagian dari perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-46 Kota Palu. Prestasi itu diraih berkat kerja sama dan antusiasme serta masyarakat berbagai pihak yang turut berpartisipasi dalam menyiapkan sajian khas Palu, ikan mujair Kuah Asam, yang jumlahnya mencapai ribuan porsi.



28 September 2024

Pemerintah Kota Palu berhasil meraih penghargaan Anugerah Revolusi Mental 2024 untuk kategori Pemerintah Daerah.

Anugerah Revolusi Mental ini merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah terhadap lembaga-lembaga baik dari sektor Pemerintah, Swasta, maupun masyarakat atau komunitas yang telah menunjukkan perubahan nyata, terukur, inspiratif, dan berkelanjutan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Revolusi Mental.



13 November 2024

17

Pemerintah Kota Palu berhasil meraih penghargaan sebagai terbaik keempat dalam kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten/Kota Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024



16 November 2024

18

Pemerintah Kota Palu mendapatkan penghargaan dari PT. PLN (Persero) UP3 Palu atas komitmen dan konsistensi dalam melunasi tagihan pemakaian listrik secara cepat dan tepat waktu, untuk kategori Instansi Pemerintah.

Penghargaan ini mencerminkan sinergi yang baik antara Pemerintah Kota Palu dan PT. PLN dalam memastikan pelayanan listrik yang optimal untuk masyarakat.

Dengan apresiasi ini, diharapkan kerja sama antara kedua pihak terus berlanjut untuk mendorong pembangunan daerah yang lebih baik.



18 November 2024

Pemerintah Kota Palu diwakili Sekretaris Daerah Kota Palu menghadiri acara Penganugerahan Siddhakarya Tahun 2024.

Kegiatan ini diharapkan dapat memotivasi dunia usaha yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah untuk menjadi Perusahaan yang memiliki standar of excellence.



25 November 2024

20

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini. Pendidikan dan Pendidikan Dasar, Menegah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memberikan Penghargaan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu sebagai Daerah Pelopor komitmen kategori Maju atas dalam transformasi mengimplementasikan digital untuk pembelajaran secara inovatif, efektif, dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas Pendidikan di Daerah.



4 Desember 2024

21

Menteri Kesehatan Republik Indonesia menganugerahkan Tanda Penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat kepada Kota Palu.



6 Desember 2024

Kota Palu kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan berhasil meraih Penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Award 2024 untuk Kategori Pratama Terbaik III. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Palu, H. Hadianto Rasyid, SE.

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen dan kerja keras Kota Palu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sanitasi yang layak melalui program STBM.



10 Desember 2024

23

Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memberikan Piagam Penghargaan kepada Pemerintah Kota Palu yang telah Mendapatkan Predikat Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Tahun 2023



10 Desember 2024

24

Kota Palu kembali mencatatkan prestasi gemilang di tingkat nasional dengan meraih penghargaan dalam Pemerintahan Apresiasi Kinerja Daerah ajang 2024. Kota Palu dianugerahi penghargaan pada kategori Pelayanan Publik Tingkat Kota dengan Fiskal Rendah Penghargaan Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2024 menjadi bukti nyata keberhasilan Kota Palu dalam menghadirkan pelayanan publik yang baik, sehingga dapat menumbuhkan investasi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



12 Desember 2024

Kota Palu masuk dalam lima besar pada Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Ombudsman Republik Indonesia.

Dalam ajang ini, Kota Palu menempati peringkat keempat se-Sulawesi Tengah dengan nilai 94,46, yang masuk dalam Zona Hijau, kategori kualitas tertinggi.

Dengan raihan ini, Kota Palu membuktikan diri



16 Desember 2024

26

Pemerintah Kota Palu mendapat Peringkat Kedua sebagai Pemerintah Daerah Terinovatif pada Penghargaan Pengelolaan Inovasi Daerah Tahun 2024. Penyerahan Penghargaan Inovasi Daerah Khusus Terhadap Pemerintah Daerah Terinovatif Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah Tahun 2024 ini diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sulawesi Tengah.



17 Desember 2024

27

Wakil Wali Kota Palu, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK.,M.Kes menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun anggaran 2024.

Kepala Perwakilan BPK Binsar dalam sambutannya menyebut bahwa penyerahan LHP kali ini merupakan wujud transparansi dan tanggungjawab BPK dalam mengemban amanat UUD 1945 dan peraturan pelaksanaannya, yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.



20 Desember 2024